



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan kondisi masyarakat dan pemerintahan yang inovatif dalam meningkatkan daya saing daerah perlu adanya penguatan sistem inovasi daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, perlu disusun *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah di Kota Palembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
9. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenkelatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : *ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018-2023*

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
6. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
7. *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut *Roadmap* Penguatan SIDA adalah dokumen kebijakan yang memuat kondisi *Roadmap* Penguatan SIDA saat ini, tantangan dan peluang *Roadmap* Penguatan SIDA, kondisi *Roadmap* Penguatan SIDA yang akan dicapai, arah kebijakan dan strategi penguatan *Roadmap* Penguatan SIDA, fokus dan program prioritas *Roadmap* Penguatan SIDA dan rencana aksi penguatan *Roadmap* Penguatan SIDA.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen arah kebijakan perencanaan pembangunan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program perencanaan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB II

ROADMAP PENGUATAN SIDA

Pasal 2

Roadmap Penguatan SIDA merupakan dokumen yang berisi kebijakan *roadmap* penguatan sistem inovasi, yang dihasilkan oleh Tim Koordinasi *Roadmap* SIDA, yang memuat kebijakan umum dan program percepatan pembangunan dengan pendekatan penguatan sistem inovasi.

Pasal 3

Roadmap Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan:

- a. salah satu acuan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan dengan inovatif dan progresif; dan
- b. salah satu landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja.

BAB III

BAB III

DOKUMEN ROADMAP PENGUATAN SIDA

Pasal 4

Dokumen *Roadmap* Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : pendahuluan
- b. BAB II : kondisi SIDA Saat Ini;
- c. BAB III : tantangan dan peluang;
- d. BAB IV : kondisi SIDA yang akan dicapai;
- e. BAB V : strategi dan arah kebijakan;
- f. BAB VI : Indikator dan program; dan
- g. BAB VII : Program dan rencana aksi.

Pasal 5

Strategi yang dikembangkan dalam upaya mewujudkan Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 meliputi:

- a. membangun basis data inovasi daerah;
- b. menyusun regulasi yang mendukung inovasi;
- c. mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif sebagai upaya untuk mendorong kegiatan yang inovatif;
- d. membangun sistem difusi inovasi berbasis teknologi informasi dan forum komunikasi antar pemangku kepentingan;
- e. membangun penguatan kelembagaan vertikal dan horizontal melalui komunikasi dan koordinasi antar lembaga; dan
- f. meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap keterbukaan informasi dan pengetahuan yang mendukung visi misi walikota.

Pasal 6

Dokumen *Roadmap* Penguatan SIDA dan penjelasan sistematika Dokumen *Roadmap* Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat berperan dalam pelaksanaan *Roadmap* Penguatan SIDA.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian data, gagasan/ide dan/atau informasi.
- (3) Data, gagasan/ide dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Walikota melalui perangkat daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.

BAB V

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 September 2021

WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

ttd

RATU DEWA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2021 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG,



ALLAN GUNERY
NIP. 198403232002121001

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 22/KPTS/BPP-LITBANG/2021
TENTANG *ROADMAP* PENGUATAN
SISTEM INOVASI DAERAH KOTA
PALEMBANG TAHUN 2018-2023

ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KOTA PALEMBANG
KOTA PALEMBANG TAHUN 2018-2023

Kota Palembang memiliki luas mencapai 400.61 km². Memperhatikan kondisi tersebut berbagai pelayanan dengan rentang kendali yang dekat dengan masyarakat. Secara administratif Kota Palembang terdiri dari 18 kecamatan dan 107 Kelurahan, kehadiran pemerintahan paling bawah diharapkan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Letak Kota Palembang menjadi penting dalam melihat keberhasilan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Menjadi ibu kota provinsi, kota Palembang diharapkan mampu memberikan kualitas kehidupan yang baik bagi masyarakatnya. Pada saat ini, Jumlah penduduk Kota Palembang tahun 2020 dengan total 1.668.848 jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki 837.031 Jiwa dan perempuan sebanyak 831.817 Jiwa dengan jumlah keluarga sebanyak 379.435 Keluarga.

Penduduk Kota Palembang pada kelompok produktif menjadi pekerja yang berada pada setiap sektor lapangan kerja yang tersedia. Penduduk yang termasuk pada angkatan kerja pada tahun 2020 sebanyak 839.317 orang dengan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 505.441 dan perempuan sebanyak 333.876. sedangkan jumlah pengangguran terbuka mencapai 82.771 orang. Jumlah penduduk yang menganggur hanya mencapai 4,96 % dari total jumlah penduduk Kota Palembang. Artinya pengangguran tersebut dapat dibilang masih rendah, hal ini menjadi keuntungan bagi Kota Palembang guna menyediakan berbagai program yang menjadikan jumlah pengangguran tersebut sebagai target pembangunan dengan intervensi tertentu yang tepat.

Kota Palembang pada tahun 2020 anak putus sekolah untuk Sekolah Dasar sudah mencapai 104,58 %, dan jenjang SMP baru mencapai 100,13 %, hal tersebut, menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pendidikan memberikan fokus pada pelayanan dasar dengan berkolaborasi bersama pemerintah Provinsi menghasilkan inovasi program layanan tak boleh berhenti sekolah) melalui sekolah anak jalanan dan anak putus sekolah kota Palembang.

Selain capaian IPM yang terukur pada tingkat tinggi pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kota Palembang mencapai 182,61 ribu orang (10,85 persen). Bertambah sebesar 1,94 ribu orang dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 yang sebesar 180,67 ribu orang (10,90 persen). Kondisi ini menjadi target pemerintah Kota Palembang guna mencari cara inovatif dalam menekan angka kemiskinan lebih rendah lagi seperti yang dicanangkan angka kemiskinan satu digit.

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Palembang menggunakan berbagai informasi terkait dengan kependudukan dan kondisi wilayah guna kesesuaiannya pada rancangan berbagai agenda kegiatan. Kota Palembang memiliki potensi dan modal yang cukup dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat dengan mengupayakan pembangunan dengan target penduduk dan juga investasi yang tercipta. Kapasitas penduduk serta potensi wilayah yang dimiliki Kota Palembang menjadi modal dalam memilih berbagai program guna memberdayakan dan menyelaraskan kehidupan masyarakatnya.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Pada prinsipnya kemandirian daerah otonom sebagian besar terletak pada kemampuan sumber daya daerah untuk mengembangkan sumber daya keuangan yang ada dan mengelolanya menjadi pendapatan yang unggul untuk mendanai pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Otonomi daerah dipandang sebagai sarana untuk memajukan pembangunan daerah, pematangan, dan memberikan corak kemandirian dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kewenangan kemandirian daerah suatu daerah otonom tidak dapat diartikan sebagai daerah yang dapat menyelenggarakan urusan otonomi dan fungsi otonomi secara penuh dengan bebas, tanpa memandang peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan nasional.

Kesejahteraan yang semakin tinggi dan adil bagi masyarakat merupakan cita-cita semua pihak. Kesejahteraan dalam suatu daerah dapat terwujud jika masyarakat telah merasa bahwa pendapatan yang diterima dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Selain itu, terjadi pemerataan pendapatan dalam masyarakat, sehingga tingkat kecemburuan sosial tidak akan muncul. Tak hanya kedua hal tersebut, masyarakat dalam suatu daerah dapat disebut memiliki hidup yang sejahtera yaitu ketika fasilitas pendidikan yang semakin mudah dan terjangkau sehingga masyarakat akan mendapatkan taraf hidup yang memadai, kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata, seperti tersedianya fasilitas yang dekat dengan masyarakat seperti puskesmas dan puskesmas. Dengan demikian, kesejahteraan menjadi salah satu bentuk faktor penentu keberhasilan suatu pemerintah untuk mewujudkan cita-cita masyarakat dan seringkali dijadikan sebagai tujuan utama dari otonomi daerah melalui program pembangunan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah kemampuan berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itu diperlukan standar objektif yang dapat dijadikan pedoman bagi pejabat daerah untuk melakukan kegiatan inovatif. Dengan cara ini, inovasi akan dirangsang dan dikembangkan tanpa khawatir menjadi objek ilegalitas dan tentunya kesejahteraan masyarakat daerah akan tercapai. Dimana, kemajuan suatu daerah sangat bergantung pada inovasi yang dilakukan di daerah tersebut. Untuk itu perlu adanya perlindungan terhadap kegiatan-kegiatan inovatif yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat daerah di kawasan untuk memajukan Kawasan serta perlu dilakukan upaya untuk merangsang kreativitas daerah untuk meningkatkan daya saing daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, terdapat penjelasan terkait dengan Inovasi Daerah, dimana Inovasi daerah ini bertujuan

untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Inovasi Daerah dapat berbentuk inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Gagasan tentang inovasi di daerah telah ada sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Pada tanggal 3 Mei 2012 diundangkannya Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Sedangkan, Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstansi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

Sistem Inovasi Daerah memberikan pedoman umum pembangunan daerah secara berkelanjutan karena sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional maupun Daerah. Peningkatan sistem inovasi daerah dianggap sebagai jembatan bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan, baik tantangan kehidupan lokal, nasional, dan global. Hal ini mendorong pemerintah untuk dapat melakukan inovasi secara terarah, terencana, dan berkelanjutan. SIDA menumbuhkan berbagai partisipasi sebagai bagian dari sistem pembangunan, dimana SIDA harus dapat menjamin kesejahteraan masyarakat. SIDA mampu menjadi dasar yang kuat terkait dengan pengelolaan pembangunan daerah secara kreatif, inovatif, dan komprehensif. Penguatan sistem inovasi daerah diwujudkan untuk menunjang penguatan sistem inovasi nasional. Dalam Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 3 Tahun 2012 dan No 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, SIDA harus dibangun dengan berlandaskan pada potensi lokal daerah dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya, menata efektifitas peran kelembagaan, meningkatkan jejaring usaha dan mekanisme pengelolaannya secara kohesif. Dalam kaitan ini, penguatan sistem inovasi akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;

- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

Kota Palembang sebagai salah satu Kota di Provinsi Sumatra Selatan, memerlukan proses percepatan pembangunan ekonomi, agar dapat membangun kesejahteraan masyarakatnya serta tidak tertinggal dari daerah lainnya. Menyadari hal tersebut, dalam melaksanakan pembangunan daerah 2016-2021, pendekatan yang dilakukan oleh Kota Palembang adalah dengan melaksanakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (PSIDa). Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat yang pada gilirannya diharapkan mampu meningkatkan daya saing. Selain itu, penguatan sistem inovasi daerah merupakan wahana dalam memperkuat pilar-pilar penumbuhkembangan kreativitas dan inovasi di daerah yang menjadi bagian integral penguatan sistem inovasi nasional. Dengan demikian, penguatan sistem inovasi daerah menjadi bagian penting dalam percepatan pembangunan daerah. Sistem Inovasi Daerah juga dapat dikatakan sebagai suatu kesatuan dari sehimpunan pelaku pembangunan, kelembagaan (termasuk kebijakan), hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusi inovasi, termasuk teknologi, dan praktek baik/terbaik serta proses pembelajarannya di Kota Palembang. Sistem Inovasi Daerah di Kota Palembang akan sangat dipengaruhi oleh dinamika interaksi dengan dunia luar, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Perencanaan pembangunan Kota Palembang Tahun 2018-2023 merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Pada Lima tahun pertama dan kedua RPJPD Kota Palembang telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti walaupun masih menyisahkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan rencana yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Pada dasarnya, tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran sebagai target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan

yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam rangka melaksanakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah di Kota Palembang, sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah perlu disusun dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (RPSIDa) yang merupakan salah satu acuan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan dengan lebih inovatif dan progresif.

Peta jalan atau *Roadmap* merupakan pedoman strategi dan dokumen perencanaan untuk pelaksanaan strategi yang ditampilkan secara singkat, yang didalamnya menggambarkan visi dan arah daerah dalam jangka waktu tertentu digambarkan secara visual. *Roadmap* merupakan alat efektif sebagai suatu mekanisme untuk mengintegrasikan beragam elemen organisasi (tatanan kelembagaan tertentu) secara kolaboratif, dalam merencanakan penguatan sistem inovasi secara sistematis. Substansi dokumen *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Palembang dikembangkan dari Visi dan Misi pembangunan daerah khususnya pembangunan ekonomi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu Visi "PALEMBANG EMAS DARUSSALAM 2023 (ELOK, MADANI, AMAN, SEJAHTERA)".

Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah desain pembangunan yang dirancang sebagai bagian dari pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Penyusunan rencana pembangunan tersebut disusun berdasarkan beberapa dokumen penting sebagai pedoman dan pertimbangan analisis konteks yang berkembang. Untuk kepentingan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Palembang Tahun 2018 - 2023, beberapa dokumen penting menjadi acuan, antara lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palembang Tahun 2005- 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019, Rencana Tata Ruang Kota Palembang Tahun 2014 - 2034 dan visi-misi kepala daerah terpilih.

Untuk menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi serta berdasarkan hasil evaluasi keselarasan tujuan dan sasaran terhadap isu strategis daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap tujuan dan sasaran serta indikator sasaran RPJMD dengan rincian sebagai berikut. Pertama, mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis teknologi dan informasi. Tujuan Pertama adalah Penyediaan Infrastruktur Penopang Pembangunan Daerah, dengan sasaran Meratanya Kebutuhan Infrastruktur sebagai Penopang Pembangunan Daerah. Tujuan Kedua adalah Pengelolaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup dengan sasaran Terlaksananya Tata Kelola Lingkungan Perkotaan secara lestari dan berkelanjutan. Tujuan Ketiga adalah Penyediaan Permukiman dan Kawasan Permukiman yang Layak dan Berwawasan Lingkungan Hidup dengan sasaran Tersedianya permukiman dan kawasan permukiman yang layak dan berwawasan lingkungan hidup.

Kedua, mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional.

Tujuan Pertama adalah Peningkatan Daya Saing dan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan sasaran meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia, dan meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja dan Masyarakat. Tujuan Kedua adalah Mewujudkan pranata sosial yang kokoh dan solid di tengah masyarakat dengan sasaran Berkembangnya Nilai-Nilai Pri Kehidupan Umat Beragama Dan Budaya Yang Mengayomi Semua Elemen Masyarakat. Tujuan Ketiga adalah Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel dengan sasaran Terlaksananya Good Governance Practices dan Reformasi Birokrasi.

Ketiga, mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan regional, nasional dan internasional yang kompetitif dan komparatif dengan menjamin rasa aman untuk berinvestasi. Tujuan Misi Ketiga adalah Membangun daya saing kota yang unggul sebagai pusat simpul pembangunan dan investasi tingkat kawasan ASEAN dengan Sasaran meratanya Sebaran Hasil Pembangunan, dan meningkatnya Investasi Daerah. Keempat, mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya saing tinggi. Tujuan Misi Keempat adalah Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berpusat pada masyarakat (community centered) berbasiskan inovasi dan daya kreasi dan berdaya saing tinggi dengan sasaran Berkembangnya ekonomi daerah berbasis inovasi dan daya kreasi yang digerakkan oleh masyarakat (community centered). Kelima, menjadikan Palembang Kota Pariwisata sungai dan budaya serta event olahraga kelas dunia yang harmoni antara kehidupan manusia dan alam. Tujuan Misi Kelima adalah Mewujudkan Palembang sebagai riverfront city dan pusat pengembangan olahraga terbaik di kawasan ASEAN dengan sasaran Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, kepemudaan dan olahraga.

Dokumen *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Palembang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen RPJMD dan RKPD yang akan menjadi dokumen acuan bagi seluruh program dan kegiatan kolaboratif di Kota Palembang yang melibatkan berbagai pihak dengan peran dan fungsi masing-masing.

1.2 Dasar Legal

1. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
2. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. UU 17 tahun 2004 tentang RPJPN;

1.3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Pembangunan Kota Palembang dengan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Palembang bertujuan untuk mempercepat proses pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 melalui terobosan inovatif. Sesuai dengan visi dan misi dari Walikota Palembang yang terpilih melalui pilkada langsung Kota Palembang tahun 2018, maka visi pembangunan Kota

Palembang sampai dengan tahun 2023, adalah “PALEMBANG EMAS DARUSSALAM 2023”. EMAS yang menjadi Visi mengandung makna Elok Madani, Aman dan Sejahtera. Sedangkan DARUSSALAM mengandung arti, Kota Palembang menjadi Kota yang Aman, Damai, Tenram, Makmur dan Sejahtera serta adanya harmoni antara kehidupan manusia dan alam. Makna dari masing-masing arti tersebut yaitu :

1. Elok : Kota Palembang memiliki lingkungan yang bersih, indah, hijau, tertata sehingga nyaman dan layak huni. Masyarakatnya ramah, santun, bersahabat, sehingga menarik untuk menjadi tempat tujuan melakukan berbagai aktivitas, baik ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, olahraga, dan investasi.
2. Madani : Kota Palembang masyarakatnya menjunjung tinggi norma, nilai-nilai dan hukum, yang ditopang oleh penguasaan teknologi, beradab, beriman, berilmu, tertib dan patuh kepada peraturan yang berlaku, memiliki peradaban yang tinggi, mengedepankan kesetaraan, transparansi, demokratis dan berkeadilan sosial serta memiliki toleransi dalam pluralisme, partisipasi sosial yang luas dan supremasi hukum.
3. Aman : Kota Palembang kondisinya kondusif, masyarakatnya aman untuk melakukan berbagai aktivitas, tidak terjadi konflik sosial baik vertikal maupun horizontal dan para investor aman untuk berinvestasi serta aman untuk menyelenggarakan event nasional maupun internasional.
4. Sejahtera : Kota Palembang memiliki masyarakat yang mempunyai taraf hidup berkualitas dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan, taraf dan pola konsumsi serta sosial lainnya.
5. Darussalam : Kota Palembang menjadi kota yang aman, damai, tenram, makmur dan sejahtera serta adanya harmoni antara kehidupan manusia dan alam.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 5 (lima) misi pembangunan Kota Palembang Periode 2018 - 2023, yaitu:

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis Teknologi dan informasi.
2. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan profesional.
3. Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan regional, nasional dan internasional yang kompetitif dan komparatif dengan menjamin rasa aman untuk berinvestasi.
4. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya saing tinggi.
5. Menjadikan Palembang Kota Pariwisata sungai dan budaya serta event olahraga khas dunia yang harmoni antara kehidupan manusia dan alam.

Upaya-upaya peningkatan daya saing yang dilakukan melalui penguatan sistem inovasi lebih mengedepankan pembangunan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (iptekin) yang dilaksanakan secara bersinergi, berkolaborasi dan berkelanjutan melalui peran aktif seluruh aktor pembangunan di daerah. Misi dua dari RPJMD Kota Palembang 2018-2023 menjadi dasar di implementasikannya penguatan SIDA. Penguatan sistem inovasi untuk percepatan pencapaian pembangunan Kota Palembang dilakukan melalui terobosan kreativitas keinovasian dalam meningkatkan daya saing daerah.

1.4 Sistematika Roadmap

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012, maka sistematika terdiri dari muatan-muatan :

BAB 1 : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang pentingnya roadmap, dasar legal, keterkaitan RPJMD dan roadmap dan sistematika

BAB 2 : Kondisi Sistem Inovasi Saat ini

Bab ini menyajikan profil daerah dan daya saing daerah serta mendeskripsikan kondisi SIDA saat ini

BAB 3 : Tantangan dan Peluang

Bab ini menguraikan isu-isu strategis yang penting dan sangat menentukan dalam Penguatan SIDA di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar; atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang

BAB 4 : Kondisi Sistem Inovasi yang diharapkan

Bab ini berisi kondisi SIDA yang akan dicapai dalam beberapa tahun ke depan (misalkan 5 tahun yang akan datang) berdasarkan hasil analisis kondisi SID saat ini serta hasil analisis tantangan dan peluang Penguatan SID

BAB 5 : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menjelaskan keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta strategi penguatan SIDA digambarkan melalui pilar-pilar atau lima prakarsa strategis. Arah kebijakan Penguatan SIDA adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran penguatan SIDA.

BAB 6 : Indikasi Program Prioritas

Fokus program prioritas merupakan uraian rinci dari setiap elemen KKI yang menggambarkan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan serta program yang harus dijalankan.

BAB 7 : Rencana Aksi

Rencana aksi Penguatan SID merupakan wujud implementasi strategi Penguatan SID dalam jangka waktu tertentu yang mencakup berbagai arah kebijakan, fokus, program prioritas, dan kegiatan serta dilengkapi dengan indikator kinerja penguatan SID, pendanaan, dan penanggung jawab.

1.5 Keterkaitan Dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Keterkaitan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1

Gambar 1.1. Keterkaitan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah



BAB II KONDISI SAAT INI

21. Aspek Geografi dan Demografi

21.1. Kondisi Geografi

Kota Palembang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia dan secara geografis terletak antara 2° 52' sampai 3° 5' Lintang Selatan dan 104° 37' sampai 104° 52' Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut. Batas administrasi wilayah Kota Palembang sebagai berikut :

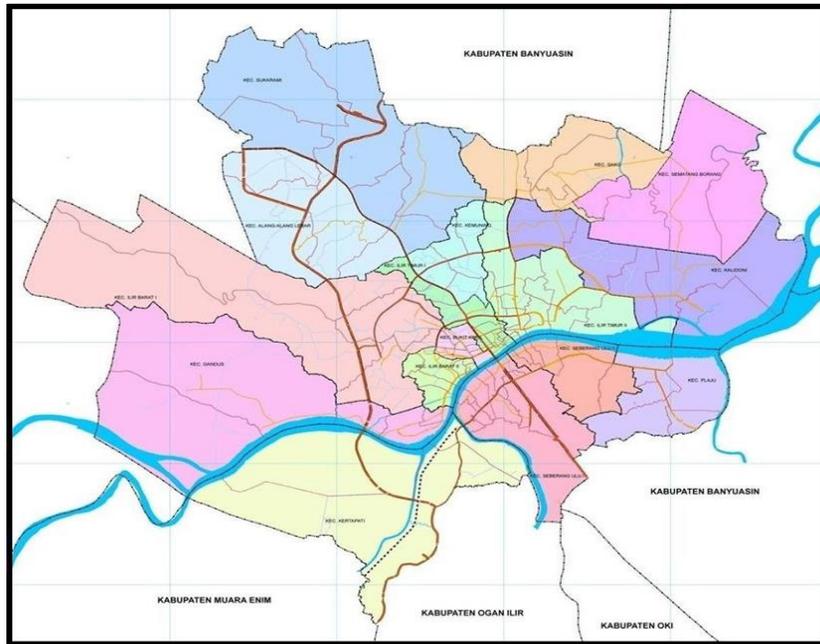
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pangkalan Benteng, Desa Gasing, dan Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Balai Makmur Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bakung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir dan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

Luas wilayah Kota Palembang sebesar 400,61 Km² (sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988) dan secara administrasi terbagi atas 18 Kecamatan dan 107 Kelurahan.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Palembang
Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km ²)
1	Ilir Barat Dua	7	6,22
2	Gandus	5	68,78
3	Seberang Ulu Satu	5	8,28
4	Jakabaring	5	9,16
5	Kertapati	6	42,56
6	Seberang Ulu Dua	7	10,69
7	Plaju	7	15,17
8	Ilir Barat Satu	6	19,77
9	Bukit Kecil	6	9,92
10	Ilir Timur Satu	11	6,50
11	Kemuning	6	9,00
12	Ilir Timur Dua	6	10,82
13	Ilir Timur Tiga	6	14,76
14	Kalidoni	5	27,92
15	Sako	4	18,04
16	Sematang Borang	4	36,98
17	Sukarami	7	51,46
18	Alang-Alang Lebar	4	34,58
Jumlah		107	400,61

Sumber: BPS Kota Palembang 2021 (PDA Tahun 2021)



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Palembang

21.2 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kota Palembang pada pertengahan Tahun 2020 adalah sebesar 1.668.848 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,38% dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar 1.662.893 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk ini, bersifat alami atau karena faktor kelahiran dan kematian, walaupun masih pula dipengaruhi oleh migrasi. Jumlah penduduk Kota Palembang dari Tahun 2019-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Gambar 2.2 berikut ini :

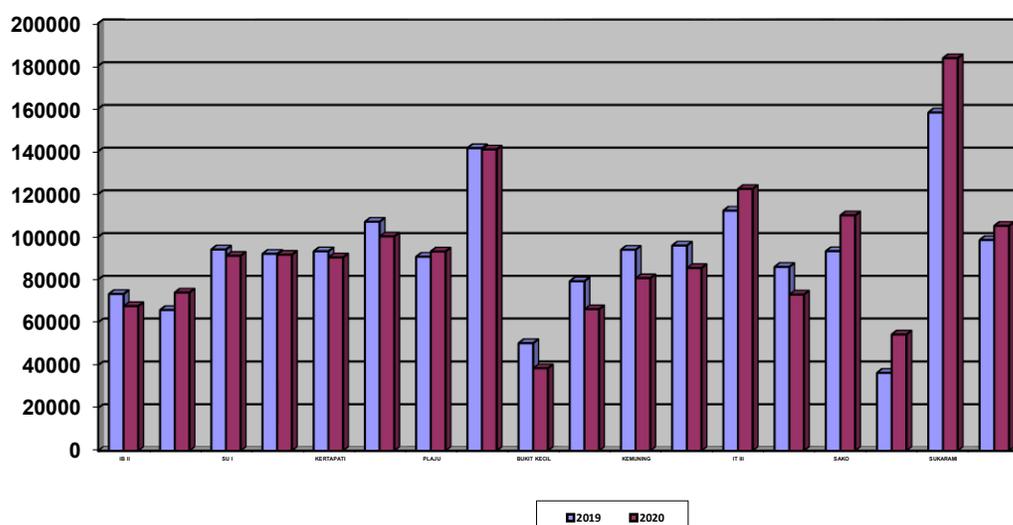
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Palembang, 2010, 2019 dan 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
		2010	2019	2020	2010-2020	2019-2020
1	Iilir Barat Dua	64.440	73.269	67.614	0,84	0,84
2	Gandus	57.887	65.782	73.953	2,18	2,60
3	Seberang Ulu Satu	165.236	94.122	91.166	1,29	1,10
4	Jakabaring	81.014	92.084	91.661	1,65	1,34
5	Kertapati	-	93.271	90.415	1,48	1,10
6	Seberang Ulu Dua	94.227	107.101	100.232	0,55	0,83
7	Plaju	79.809	90.734	93.171	0,06	1,65
8	Iilir Barat Satu	125.315	141.544	140.945	1,34	1,24
9	Bukit Kecil	43.892	50.301	38.585	-0,35	-1,26
10	Iilir Timur Satu	69.716	79.268	66.168	-0,22	-0,48
11	Kemuning	82.495	93.997	80.685	0,23	-0,24
12	Iilir Timur Dua	160.037	95.963	85.460	0,79	-0,04
13	Iilir Timur Tiga	-	112.932	122.474	2,01	2,07
14	Kalidoni	100.394	85.971	73.010	0,48	-0,04
15	Sako	82.964	93.326	110.079	2,04	2,91
16	Sematang Borang	32.290	36.445	54.362	7,74	5,37
17	Sukarami	140.686	158.246	183.667	2,44	2,82

18	Alang-Alang Lebar	87.605	98.537	105.201	2,17	1,99
T O T A L		1.468.007	1.662.893	1.668.848	1,47	1,38

Sumber: BPS Kota Palembang 2021 (PDA Tahun 2021)

Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Kota Palembang Tahun 2019-2020



Dari Tabel 2.2 dan Gambar 2.2 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kota Palembang pada Tahun 2020 sebesar 1.668.848 jiwa. Kecamatan yang terbanyak penduduknya adalah Kecamatan Sukarami dengan jumlah penduduk sebesar 183.667 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit ada di Kecamatan Bukit Kecil, dengan jumlah penduduk sebesar 38.585 jiwa.

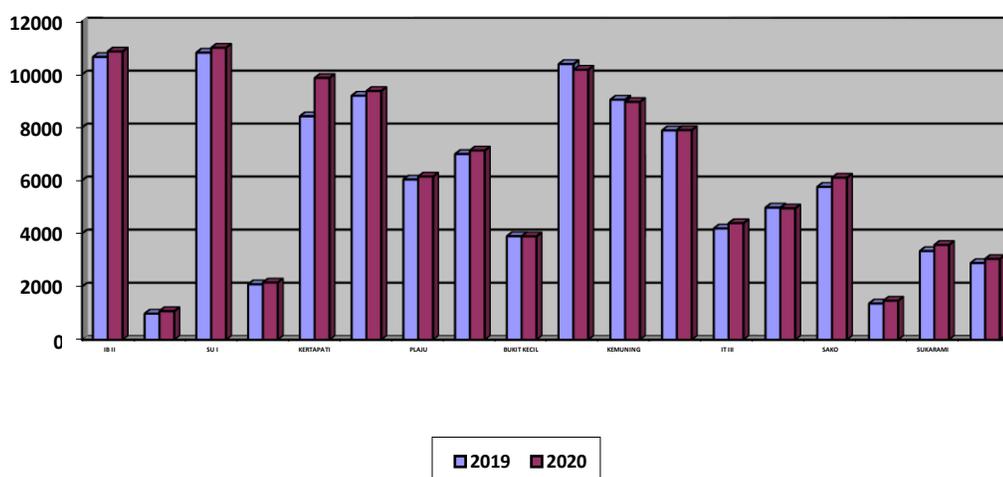
Tabel 2.3 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Palembang Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²	
				2019	2020
1	Ilir Barat Dua	6,22	4,05	10.633	10.870
2	Gandus	68,78	4,43	982	1.075
3	Seberang Ulu Satu	8,28	5,46	10.827	11.010
4	Jakabaring	42,56	5,49	2.085	2.154
5	Kertapati	9,16	5,42	9.420	9.871
6	Seberang Ulu Dua	10,69	6,62	9.198	9.376
7	Plaju	15,17	5,58	6.031	6.142
8	Ilir Barat Satu	19,77	8,45	6.995	7.129
9	Bukit Kecil	9,92	2,31	3.897	3.890
10	Ilir Timur Satu	6,50	3,96	10.392	10.180
11	Kemuning	9,00	4,83	9.049	8.965
12	Ilir Timur Dua	10,82	5,12	7.886	7.898
13	Ilir Timur Tiga	27,92	7,34	4.189	4.387
14	Kalidoni	14,76	4,37	4.974	4.946
15	Sako	18,04	6,60	5.755	6.102
16	Sematang Borang	36,98	3,26	1.365	1.470
17	Sukarami	51,46	11,01	3.338	3.569
18	Alang-Alang Lebar	34,58	6,30	2.886	3.042

T O T A L	400,61	100	4.033	4.166
-----------	--------	-----	-------	-------

Sumber: BPS Kota Palembang 2021 (PDA Tahun 2021)

Gambar 2.3 Kepadatan Penduduk Kota Palembang per Kecamatan Tahun 2019-2020



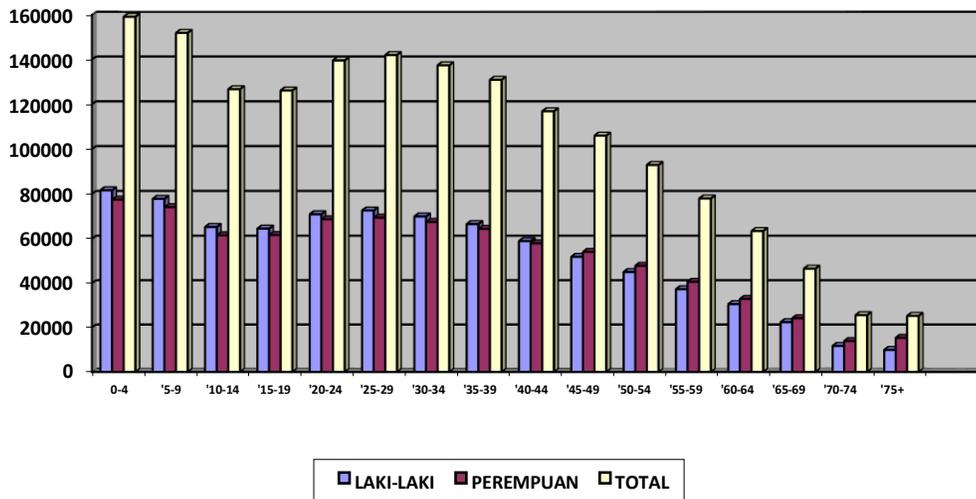
Dari Tabel 2.3 dan Gambar 2.3 dilihat kepadatan penduduk Kota Palembang Tahun 2020 sebesar 4.166 jiwa/km². Kecamatan yang terpadat adalah Kecamatan Seberang Ulu Satu dengan kepadatan sebesar 11.010 jiwa/km², sedangkan tingkat kepadatan yang terendah adalah Kecamatan Gandus, dengan tingkat kepadatan sebesar 1.075 jiwa/km². Untuk sebaran penduduk per kecamatan, terlihat penduduk Kota Palembang Tahun 2020 terakumulasi di Kecamatan Sukarame sebesar 10,63% (183.667 jiwa), urutan kedua di Kecamatan Ilir Barat Satu sebesar 8,45% (140.945 jiwa) dan di urutan ketiga di Kecamatan Kalidoni sebesar 7,24% (122.474 jiwa).

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Palembang Tahun 2020

NO.	KELOMPOK UMUR	PENDUDUK		JUMLAH
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0-4	81.645	77.482	159.127
2	5-9	77.809	74.118	151.927
3	10-14	65.236	61.548	126.784
4	15-19	64.506	61.689	126.195
5	20-24	70.913	68.703	139.616
6	25-29	72.603	69.414	142.017
7	30-34	69.949	67.488	137.437
8	35-39	66.538	64.417	130.955
9	40-44	58.957	57.957	116.914
10	45-49	51.932	54.123	106.055
11	50-54	45.060	47.881	92.941
12	55-59	37.294	40.674	77.968
13	60-64	30.573	32.887	63.460
14	65-69	22.397	24.170	46.567
15	70-74	11.702	13.911	25.613
16	75 +	9.917	15.355	25.272
	Jumlah	837.031	831.817	1.668.848

Sumber: BPS Kota Palembang 2021 (PDA Tahun 2021)

Gambar 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Palembang Pada Pertengahan Tahun 2020



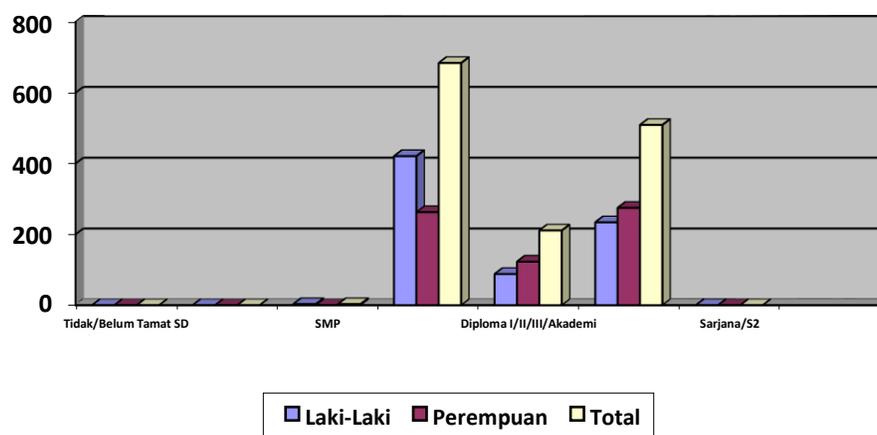
Selanjutnya pada Tabel 2.4 dan Gambar 2.4, berdasarkan komposisi penduduk Kota Palembang tahun 2020, jumlah penduduk terbesar merupakan usia 25-29 tahun yaitu 142.017 jiwa, terdiri dari 72.603 jiwa penduduk laki-laki dan 69.414 jiwa Perempuan. Jumlah penduduk produktif (15-64) berjumlah 1.007.363 jiwa menanggung sebanyak 661.485 jiwa penduduk bukan usia produktif, dengan kata lain angka beban ketergantungan di kota ini tahun 2020 setiap 1 orang penduduk berusia non produktif ditanggung 1,69 orang usia produktif.

Tabel 2.5 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan jenis Kelamin di Kota Palembang Tahun 2020

Pendidikan yang Ditamatkan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Tidak/Belum Tamat SD	-	-	- Orang
Sekolah Dasar	-	-	- Orang
Sekolah Menengah Pertama	3	-	3 Orang
Sekolah Menengah Atas	421	263	684 Orang
Diploma I/II/III/Akademi	88	123	211 Orang
Sarjana Strata 1/S1	234	275	509 Orang
Sarjana / S2	-	-	- Orang
Jumlah	746	661	1.407 Orang

Sumber: BPS Kota Palembang 2021 (PDA Tahun 2020)

Gambar 2.5 Jumlah Pencari Kerja di Kota Palembang Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Palembang Pada Tahun 2020



Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu dan jenis Kelamin di Kota Palembang Tahun 2020

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Tahun 2020	Tahun 2019
	Laki-laki	Perempuan		
Angkatan Kerja	505.441	333.876	839.317	759.115
Bekerja	454.847	301.699	756.546	698.873
Pengangguran Terbuka	50.594	32.177	82.771	60.242
Bukan Angkatan Kerja	129.701	314.063	443.764	482.111
Sekolah	49.461	60.367	109.828	133.956
Mengurus Rumah Tangga	33.077	234.583	267.660	284.968
Lainnya	47.163	19.113	66.276	63.187
Tingkat Partisipasi Angk. Kerja	79,58	51,53	65,41	61,16
Tingkat Pengangguran	10,01	9,64	9,86	7,94

Sumber: BPS Kota Palembang 2021 (PDA Tahun 2021)

Pada tahun 2020 jumlah angkatan kerja di Kota Palembang sebanyak 839.317 orang lebih tinggi dari tahun 2019 sebesar 759.115 orang, Angkatan Kerja yang bekerja pada tahun 2020 sebesar 756.546 orang, lebih tinggi dari tahun 2019 sebesar 698.873 orang sedangkan pengangguran terbuka pada tahun 2020 sebesar 82.771 orang, lebih besar dari tahun 2019 sebesar 60.242 orang. Tingkat Pengangguran pada Tahun 2020 sebesar 9,86 lebih besar dari tingkat pengangguran pada tahun 2019 yaitu sebesar 7,94. Angka pengangguran ini dihitung dengan mendefinisikan menganggur sebagai mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan dan sudah mendapat pekerjaan tetap tetapi belum mulai bekerja.

22. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Analisis aspek kesejahteraan masyarakat dilakukan untuk menganalisis kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Dalam menyusun Rancangan RKPD Kota Palembang, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator menurut Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah di wilayah Kota Palembang.

2.2.1 Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator yang digunakan untuk menganalisa pertumbuhan ekonomi kota adalah dengan melihat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Laju pertumbuhan

PDRB Kota Palembang rata-rata tahun 2020 Menurut Lapangan Usaha mengalami kontraksi sebesar -0,25% bila dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 5,94%. Kontraksi pertumbuhan ekonomi dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19 yang menyerang sejak awal tahun 2020 yang berakibat kepada pembatasan aktifitas masyarakat termasuk aktifitas ekonomi. Namun demikian, masih terdapat beberapa sektor yang tetap tumbuh positif. Lima peringkat sektor-sektor yang tetap tumbuh di atas rata-rata pada tahun 2020 adalah (1) Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (11,06%); (2) Informasi Komunikasi (9,92,88%); (3) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (7,93%); dan (4) Pengadaan Listrik dan Gas (6,98%); serta (5) Pertambangan dan Penggalian (5,55%). Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini:

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen)

NO	SEKTOR	TAHUN				
		2016	2017	2018*	2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,86	2,88	2,23	2,77	0,40
2.	Pertambangan dan Penggalian	5,38	2,11	2,97	3,19	5,55
3.	Industri Pengolahan	3,02	4,79	4,00	3,38	-0,54
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	20,40	5,17	8,96	6,42	6,98
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,08	2,95	9,34	9,88	7,93
6.	Konstruksi	8,90	9,15	9,11	5,77	-3,23
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,97	7,47	11,27	9,72	-1,70
8.	Transportasi dan Pergudangan	6,25	7,85	8,71	10,05	-5,71
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,28	10,60	13,14	15,85	-8,08
10.	Informasi Komunikasi	6,87	8,43	8,08	8,71	9,92
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,28	2,53	2,65	-1,50	1,35
12.	Real Estate	8,15	7,33	8,16	10,19	2,17
13.	Jasa Perusahaan	5,74	6,89	9,83	11,88	-2,24
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,24	3,39	2,72	1,10	2,05
15.	Jasa Pendidikan	2,89	1,06	3,14	5,79	-2,03
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,24	3,19	2,35	6,45	11,06
17.	Jasa Lainnya	2,52	4,41	6,57	7,52	1,23

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,74	6,21	6,69	5,94	-	0,25
--------------------------------	------	------	------	------	---	------

Sumber: BPS Kota Palembang 2021 (PDA Tahun 2021)

Keterangan: r : Angka Revisi / *Revised Figures*

* : Angka Sementara/ *Preliminary Figures*

** : Angka Sangat Sementara/ *Very Preliminary Figures*

Tabel 2.8 Distribusi Persentase PDRB Kota Palembang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Palembang Tahun 2016-2020 (Persen)

NO	SEKTOR	TAHUN				
		2016 r	2017	2018*	2019**	2020
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0.53	0,51	0,49	0,47	0,48
2.	Pertambangan dan Penggalian	0.01	0,01	0,01	0,00	0,00
3.	Industri Pengolahan	33.48	33,10	32,11	31,28	31,26
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0.17	0,18	0,18	0,17	0,19
5.	Pengadaan Pengelolaan Air, Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.29	0,29	0,30	0,31	0,34
6.	Konstruksi	18.27	18,35	18,39	17,90	17,19
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.22	15,74	16,73	17,50	17,51
8.	Transportasi Dan Pergudangan	4.58	4,71	4,91	5,21	4,51
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.72	2,89	3,12	3,47	3,28
10.	Informasi Komunikasi	6.63	6,87	6,98	7,11	7,80
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.17	5,05	4,89	4,52	4,47
12.	Real Estate	4.60	4,65	4,70	4,93	5,12
13.	Jasa Perusahaan	0.17	0,18	0,19	0,20	0,20
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.89	2,52	2,25	2,10	2,24
15.	Jasa Pendidikan	3.55	3,28	3,11	3,11	3,17
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.69	0,68	0,64	0,65	0,75
17.	Jasa Lainnya	1.03	1,01	1,02	1,06	1,09
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Palembang 2021 (PDA Tahun 2021)

Keterangan: r : Angka Revisi / *Revised Figures*

* : Angka Sementara/*Preliminary Figures*

** :Angka Sangat Sementara/*Very Preliminary Figures*

2.2.2 Laju Inflasi

Inflasi Kota Palembang maupun secara nasional mengalami penurunan dan terjaga tetap stabil seperti tersaji pada Tabel 2.9. Inflasi Kota Palembang sebesar 3,05% di tahun 2015 menjadi 3,68% di tahun 2016, inflasi Provinsi Sumatera Selatan naik dari 3,1% pada tahun 2015 menjadi 3,58% pada tahun 2016, Sedangkan inflasi nasional sedikit menurun dari 3,35% di tahun 2015 menjadi 3,02% di tahun 2016. Pada Tahun 2020, inflasi kota Palembang menurun sampai pada angka 1,05% bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 2,06%.

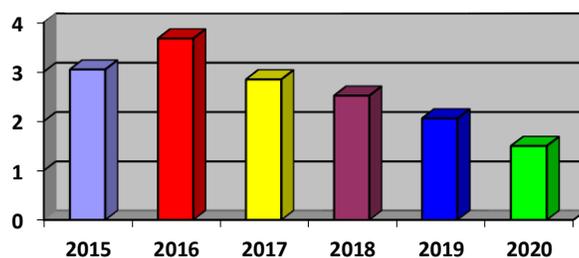
Tabel 2.9 Laju Inflasi Kota Palembang tahun 2016-2020

TAHUN	PALEMBANG	SUMSEL	INDONESIA
2016	3.68	3.58	3.02
2017	2.85	2.96	3.61
2018	2.52	2.60	3.13
2019	2,06	2,06	2,72
2020	1,5	0,57	1,68

Sumber: BPS Kota Palembang 2021

Laju inflasi Kota Palembang selama Tahun 2016-2020 yang relatif terkendali tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk mengendalikan inflasi melalui koordinasi, baik koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Provinsi maupun Nasional. Pengendalian inflasi, pemantauan terhadap kenaikan harga daging ayam ras dan barang kebutuhan pokok (sembako) dan barang penting lainnya bersama Kementerian Perdagangan Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri dan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.

Gambar 2.6 Laju Inflasi Kota Palembang tahun 2015-2020



Sumber: BPS Kota Palembang (Data diolah) 2021

Tabel 2.10 Laju Inflasi Kota Palembang per Bulan Tahun 2016-2020

Bulan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	0,32	0,53	0,60	0,14	0,62
Februari	-	0,09	-	-0,24	0,26
Maret	0,22	-0,10	0,39	-0,01	0,04
April	-	-0,08	0,29	0,55	-
Mei	0,66	0,64	0,15	0,38	0,13
Juni	0,46	0,86	0,65	0,56	0,19
Juli	1,12	0,13	-	0,39	-
			0,01		0,28

Agustus	-	-0,20	-	-0,16	-
	0,26		0,17		0,35
September	0,24	-0,09	-	-0,16	-
			0,40		0,05
Oktober	-	0,08	0,14	-0,16	0,18
	0,08				
November	0,57	0,35	0,21	-0,09	0,31
Desember	0,67	0,62	0,96	0,3	0,58
Kumulatif	3,68	2,85	2,78	2,06	1,51

Sumber: BPS Kota Palembang 2021

2.2.3 PDRB per Kapita

PDRB perkapita menunjukkan besarnya pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata. Besaran ini merupakan hasil bagi PDRB dengan jumlah penduduk. Dengan melihat pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk dapat dilihat peningkatan dalam pendistribusian PDRB per kapita maupun pendapatan regional perkapita.

Angka pendapatan perkapita lazim digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk. Namun, hal ini perlu diinterpretasikan secara hati-hati karena angka ini belum memperhitungkan net factor income, yaitu selisih antara income out flow dengan income in flow.

Pendapatan perkapita penduduk Kota Palembang dari tahun 2015 hingga tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan. PDRB Perkapita penduduk Kota Palembang menurut Lapangan Usaha pada Tahun 2020 sebesar Rp104.525,04,- sedangkan Tahun 2015 sebesar Rp82.345,07,- .

Tabel 2.11 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Palembang Tahun 2016-2020

Tahun	PDRB Per Kapita ADHB
2016	87.073,35
2017	92.476,41
2018	98.661,07
2019	104.525,63
2020	104.525,04

Sumber: BPS Kota Palembang 2021 (PDA Tahun 2021)

2.2.4 Kemiskinan

Indikator kemiskinan di Kota Palembang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Secara umum, persentase penduduk miskin dari tahun 2014 (12,93%) sampai tahun 2020 mengalami penurunan (10,89%).

Tabel 2.12 Jumlah Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman, Indeks Keparahan, dan Garis Kemiskinan di Kota Palembang Tahun 2016-2020

Indikator Kemiskinan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk	191.950	184.410	179.320	180.670	182.610
Persentase Penduduk Miskin (%)	12,04	11,40	10,95	10,90	10,89
Indeks Kedalaman	2,18	1,76	1,70	1,86	1,86

Kemiskinan						
Indeks Kemiskinan	Keparahan	0,53	0,41	0,39	0,50	0,40
Garis (Rp/Kap/Bln)	Kemiskinan	456.25	480.73	510.99	521.48	548.56
		5	5	4	9	3

Sumber: BPS Kota Palembang 2021

Pada Tabel 2.12 memperlihatkan perkembangan secara umum gambaran Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Palembang dari tahun ketahun. Meskipun Garis Kemiskinan meningkat tetapi persentase penduduk miskin cenderung menurun dari tahun ke tahun. Namun demikian perlu menjadi perhatian bersama terkait dengan penambahan jumlah penduduk miskin Kota Palembang selama tiga tahun terakhir karena persentase penduduk miskin berkurang tetapi jumlah orang miskin bertambah.

Indikator kemiskinan di Kota Palembang lima tahun terakhir cenderung membaik, hal ini searah dengan indikator kesejahteraan rakyat lainnya seperti indikator kesehatan, indikator pendidikan, indikator ketenagakerjaan, kondisi perekonomian dan indikator perumahan.

Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, melalui berbagai program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palembang tentunya dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Selain itu kondisi perekonomian Kota Palembang yang terus tumbuh, menyerap tenaga kerja dari masyarakat lokal yang pada akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Palembang. Kondisi ini merupakan faktor pemicu terus menurunnya persentase kemiskinan di Kota Palembang secara gradual.

Pada tahun 2020 Kota Palembang menduduki peringkat ke empat persentase penduduk miskin terendah diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, sama seperti pada tahun 2019.

2.2.5 Pendidikan

2.2.5.1 Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu Program Wajib Belajar.

Tabel 2.13 Angka Harapan Lama Sekolah Kota Palembang Tahun 2016-2020

Tahun	Total
2016	13,71
2017	14,11
2018	14,39
2019	14,40
2020	14,41

Sumber: BPS Kota Palembang 2021 (PDA Tahun 2021)

Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2019 adalah sebesar

14,40 tahun dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 14,41 tahun. Jadi pada tahun 2020 terjadi peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 0,069% dari tahun sebelumnya.

2.2.5.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator rata-rata lama sekolah (Years Means School) merupakan salah satu indikator komposit yang digunakan oleh pemerintah dalam menghitung Indikator Pembangunan Manusia (IPM). Rata-rata lama sekolah menunjukkan tingkat pendidikan yang mampu dicapai oleh masyarakat disuatu wilayah, dalam hal ini wilayah Kota Palembang. Rata-rata lama sekolah di Kota Palembang terus cenderung mengalami peningkatan dari tahun ketahun sampai tahun 2020. Pada Tabel 2.14 terlihat rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas di Kota Palembang pada tahun 2015 sebesar 10,25 dan meningkat menjadi 10,53 pada tahun 2020. Artinya rata-rata penduduk Kota Palembang telah mengenyam pendidikan SLTA kelas 1 (tingkat X).

Tabel 2.14 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Kota Palembang Tahun 2016-2020

Tahun	Total
2016	10,35
2017	10,36
2018	10,37
2019	10,40*
2020	10,53

Sumber: BPS Kota Palembang 2021

2.2.5.3 Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar menurut jenjang pendidikan mengukur banyaknya penduduk bersekolah lewat suatu jenjang pendidikan dari setiap 100 penduduk usia sekolah. Tabel 2.15 menunjukkan bahwa APK Sekolah Dasar di Kota Palembang tahun 2020 mencapai angka 100,36. Hal ini karena banyaknya anak usia 5-6 tahun yang memasuki pendidikan di SD, juga adanya penduduk berusia diatas 12 tahun yang masih melakukan pendidikan di SD, sehingga banyaknya penduduk yang masih bersekolah di SD jauh lebih besar dibandingkan jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Untuk jenjang SLTP, APK sebesar 103,91.

Tabel 2.15 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan Kota Palembang Tahun 2020

Kelas	Total
APK SD (7-12)	100,36
APK SLTP (13-15)	103,91
APK SLTA (16-18)	103,28*

Sumber: LKjIP Disdik Kota Palembang 2020

2.2.5.4 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tiap jenjang pendidikan pada umumnya lebih rendah bila dibanding dengan Angka Partisipasi Kasar (APK). Karena APM merupakan perbandingan antara banyaknya murid pada masing-masing

jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk kelompok umur untuk jenjang pendidikan bersangkutan (7-12 untuk SD, 13-15 untuk SMP, dan 16-18 untuk SMA).

Tabel 2.16 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Kota Palembang Tahun 2020

Jenjang Pendidikan	Total
SD	108,51
SMP	91,88
SMA	100,96

Sumber: BPS Kota Palembang 2021 (PDA Tahun 2021)

Dari Tabel 2.17 dapat dilihat bahwa tahun 2020, APM untuk Sekolah Dasar sebesar 108,51 artinya dari jumlah anak usia 7-12 tahun sebanyak 108,51 % masih bersekolah di SD. Sedangkan APM untuk Tingkat SMP dan SMA masing-masing sebesar 91,88% dan 100,96%.

2.2.6 Kesehatan

2.2.6.1 Angka Harapan Hidup

Kesadaran yang semakin meningkat terhadap gizi dan kesehatan diri dan keluarga ikut mempengaruhi peningkatan Angka Harapan Hidup di Kota Palembang. Terlihat dari tabel 2.17 Angka Harapan Hidup dari Tahun 2013 sampai tahun 2020 terus meningkat, pada Tahun 2013 Angka Harapan Hidup sebesar 69,80 dan pada tahun 2020 sebesar 70,79.

Tabel 2.17 Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Palembang Tahun 2016-2020

Tahun	AHH
2016	70,05
2017	70,10
2018	70,32
2019	70,54
2020	70,79

Sumber: BPS Kota Palembang 2021 (PDA Tahun 2021)

2.2.6.2 Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu di Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia sebesar 359 per 100.000. Jumlah kematian ibu tahun 2020 di Kota Palembang, berdasarkan laporan sebanyak 14 orang (Dinas Kesehatan Kota Palembang). Penyebabnya kematian terbanyak adalah hipertensi dalam kehamilan 28,57% (4 orang), *haemorrhagic post partum* 28,57% (4 orang), Gangguan Metabolik 7,14% (1 orang), gangguan sistem peredaran darah 7,14% (1 orang) dan lainnya sebanyak 28,57% (4 orang).

2.2.6.3 Cakupan Balita Gizi Buruk

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dari Tabel 2.18 terlihat kasus gizi buruk dari tahun 2014-2020. Pada Tahun 2014 kasus gizi buruk ada 22 kasus, pada tahun dan pada tahun 2019 terdapat 17 kasus, sedangkan pada tahun 2020 terjadi

penurunan menjadi 7 kasus. Dari semua kasus gizi buruk yang ada semuanya telah mendapatkan penanganan dan telah memenuhi target standar pelayanan minimum yaitu 100%.

Tabel 2.18 Jumlah Bayi Bergizi Buruk di Kota Palembang Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	GIZI BURUK
1	2016	19
2	2017	18
3	2018	15
4	2019	17
5	2020	7

Sumber: Dinkes Kota Palembang 2021

2.2.6.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kemajuan Pembangunan Manusia di suatu daerah secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Dengan melihat perkembangan angka IPM tiap tahun, kemajuan yang dicapai Kota Palembang dalam pembangunan manusia tidak terlalu signifikan. Walaupun angka IPM Kota Palembang adalah yang tertinggi di Sumatera Selatan. Angka IPM Kota Palembang mengalami sedikit penurunan dari 78,44 pada tahun 2019 menjadi 78,33 pada tahun 2020. Turunnya IPM tahun 2020 ini dapat dipahami, mengingat dampak dari banana non alam pandemic covid-19 yang terjadi secara global dan berpengaruh terhadap indikator penyusun capaian IPM Kota Palembang terutama pada pendapatan per kapita penduduk.

Tabel 2.19 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palembang Tahun 2016-2020

TAHUN	IPM
2016	76,59
2017	77,22
2018	77,89
2019	78,44
2020	78,33

Sumber: BPS Kota Palembang 2021 (PDA Tahun 2021)

2.2.7 Ketenagakerjaan

Angkatan kerja merupakan bagian dari aspek demografi penduduk yang mempunyai kecenderungan bertambah atau menurun sejalan dengan perubahan yang dialami oleh penduduk itu sendiri. Hal ini terjadi Karena faktor alamiah seperti kelahiran, kematian maupun perpindahan yang menyebabkan bergesernya pola kependudukan secara keseluruhan.

Tabel 2.20 Persentase Penduduk Usia 15 tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Palembang Tahun 2020

Jenis Utama	Kegiatan	2020		2019	
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
I Angkatan Kerja					
a	Bekerja	454.847	301.699	756.546	698.873
b	Menganggur	50.594	32.177	82.771	60.242
JUMLAH		505.441	333.876	839.317	759.115
I Bukan Angkatan Kerja					
a	Sekolah	49.461	60.367	109.828	133.956
b	Mengurus Rumah Tangga	33.077	234.583	267.660	284.968
c	Lainnya	47.163	19.113	66.276	63.187
JUMLAH		129.701	314.063	443.764	964.222
Tingkat Pengangguran		10,01	9,64	9,86	7,94
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		79,58	51,53	65,41	61,16

Sumber: BPS Kota Palembang 2021 (PDA Tahun 2021)

2.2.8 Seni Budaya dan Olahraga

Berbagai kegiatan seni budaya dan kejuaraan olahraga baik skala nasional maupun internasional telah dilaksanakan di Kota Palembang. Keberhasilan berbagai kegiatan seni dan budaya, serta kejuaraan olahraga mendorong berkembangnya kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Berbagai prasarana dan sarana seni budaya, dan olah raga akan dimanfaatkan secara optimal. Kawasan jakabaring sebagai pusat kegiatan olahraga berstandar internasional dapat dikembangkan sebagai wisata olahraga selain dimanfaatkan sebagai pusat pendidikan keolahragaan bagi siswa.

Tantangan Kota Palembang ditahun mendatang setelah terjadinya wabah (*pandemic*) *Covid-19* adalah dengan melakukan pemulihan ekonomi, sosial dan budaya serta olah raga dengan tetap memperhatikan prosedur kesehatan yang ketat dan standar. Aktifitas ekonomi, sosial dan budaya serta olah raga harus dibangkitkan dengan berbagai upaya mendesak, terstruktur dan sistematis dengan berbagai pendekatan program yang holistik.

23. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Palembang dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penyusunan Rancangan RKPD Kota Palembang Tahun 2022 disusun ke dalam tabel capaian indikator setiap variabel yang dianalisis menurut Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Pada aspek pelayanan umum ini dibagi menjadi tiga, yaitu :

Urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang. Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perhubungan; lingkungan hidup; pertanahan; kependudukan dan catatan sipil; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; sosial; ketenagakerjaan; koperasi dan usaha kecil menengah; penanaman modal; kebudayaan; kepemudaan dan olahraga; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian, dan persandian; ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.

A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

A.1. Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Urusan Wajib Pendidikan pada Tahun Anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp430.636.294.462,87 dan dapat direalisasikan sebesar Rp419.716.737.172,- atau sebesar 97,46 % dari total alokasi pagu anggaran tersedia. Indikator capaian program perangkat daerah dari aspek Pendidikan di tahun 2017 – 2020 antara lain adalah:

- 1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 2) Tersedianya satuan Pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil
- 3) Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis
- 4) Di setiap SMP/MTs tersedianya ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal 1 (satu) set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik
- 5) Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia 1 ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya dan setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya dan setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari guru
- 6) Di setiap SD/MI tersedia 1 orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 orang guru untuk setiap satuan pendidikan dan untuk daerah khusus 4 orang guru setiap satuan Pendidikan
- 7) Di setiap SD/MTs tersedia 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran dan untuk daerah khusus tersedia 1 orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran
- 8) Di setiap SD/MI tersedia 2 orang guru yang memenuhi kualitas akademik S1 atau D-IV dan 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil
- 9) Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik

- S1 dan D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%
- 10) Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan satuan kualifikasi akademik S1 dan D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 orang untuk mata pelajaran matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Pendidikan Kewarganegaraan
 - 11) Di setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S1 dan D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
 - 12) Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S1 dan D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
 - 13) Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan Pendidikan Kewarganegaraan dengan perbandingan 1 set untuk setiap peserta didik
 - 14) Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan Pendidikan Kewarganegaraan dengan perbandingan 1 set untuk setiap peserta didik
 - 15) Setiap SD/MI menyediakan 1 set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe) contoh peralatan optik, KIT IPA untuk eksperimen dasar dan poster/carta IPA
 - 16) Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul pengayaan dan 20 buku referensi
 - 17) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Paket A, Paket B, dan Paket C
 - 18) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
 - 19) Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
 - 20) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs, dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
 - 21) Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S1 dan D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
 - 22) Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif
 - 23) Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan
 - 24) Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku
 - 25) Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam perminggu di satuan pendidikannya, termasuk merencanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan
 - 26) Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu pertahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut
 - 27) Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata

- pelajaran yang diampunya.
- 28) Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik
 - 29) Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
 - 30) Kepala Sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru 2 kali dalam setiap semester
 - 31) Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik
 - 32) Lapangan olahraga
 - 33) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
 - 34) Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan Laporan Hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orangtua peserta didik menyampaikan rekap kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Agama di Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota pada setiap akhir semester
 - 35) Cakupan Kegiatan Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
 - 36) Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan olahraga
 - 37) Jumlah Organisasi olahraga
 - 38) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%), SD/MI/Paket A (%), SMP/MTs/Paket B (%)
 - 39) Rasio ruang kelas SD ataupun SMP Dengan Murid(%)
 - 40) Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)
 - 41) Rata-rata Nilai UN SD/MI, SMP/MTs
 - 42) Persentase Guru Berkualifikasi S2/S3 (%)
 - 43) Jumlah Guru yang Tersertifikasi (%)
 - 44) Rata-rata nilai UKG (dalam angka) (%)
 - 45) Persentase Ruang kelas SD dan SMP Baik (%)
 - 46) Rasio Toilet dengan Siswa (%)
 - 47) Rasio Siswa Dengan Buku (%)
 - 48) Persentase Meubelair dengan kondisi baik (%)
 - 49) Persentase Meubelair dengan kondisi baik (%)
 - 50) Persentase Alat dan media Pembelajaran (%)
 - 51) Persentase Capaian SPM Pendidikan Kategori Baik (%)
 - 52) Persentase Sekolah Berakreditasi A (%)
 - 53) Jumlah Prestasi Tingkat Nasional
 - 54) Jumlah sekolah berbudaya baca
 - 55) Jumlah Sekolah Cerdas Berintegritas
 - 56) Jumlah Sekolah Berbudaya Iman dan Taqwa
 - 57) Jumlah Sekolah Berbudaya Karakter

2. Kesehatan

Urusan wajib Kesehatan pada Tahun Anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 283.701.271.064,09 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 238.088.892.742,00 atau sebesar 83,92% dari total alokasi pagu anggaran tersedia. Indikator capaian program perangkat daerah dari aspek Kesehatan di tahun 2017 – 2020 antara lain adalah:

- 1) Tersedianya obat esensial generik di sarana kesehatan
- 2) Tersedianya obat esensial generik di sarana kesehatan
- 3) Cakupan pelayan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/kota

- 4) Cakupan Puskesmas pengembangan penyakit tidak menular
- 5) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (BPJS)
- 6) Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa
- 7) Puskesmas yang merekomendasi obat asli Indonesia
- 8) Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat
- 9) Cakupan Desa Siaga Aktif
- 10) Cakupan rumah tangga yang menerapkan PHBS
- 11) Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan kepada keluarga miskin
- 12) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
- 13) Cakupan tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan
- 14) Cakupan rumahtangga yang menggunakan air bersih
- 15) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB Paru BTA positif ditangani
- 16) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
- 17) Cakupan penemuan penderita diare
- 18) Cakupan penemuan pneumonia balita
- 19) AFT Rate per 100.000 penduduk yang < 15 tahun
- 20) Cakupan desa/kelurahan UCI
- 21) Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
- 22) Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO
- 23) Cakupan alat kesehatan esensial Puskesmas yang terkalibrasi
- 24) Jumlah Puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan
- 25) Jumlah Rumah Sakit Pratama yang dibangun
- 26) Tersedianya sarana RS Pratama sesuai standar
- 27) Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan
- 28) Cakupan pelayanan anak balita
- 29) Cakupan pelayanan kesehatan lansia
- 30) Cakupan tempat pengolahan makanan memenuhi syarat kesehatan
- 31) Cakupan kunjungan ibu hamil K4
- 32) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
- 33) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
- 34) Cakupan pelayanan nifas
- 35) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
- 36) Cakupan kunjungan bayi
- 37) Cakupan peserta KB aktif
- 38) Penyediaan 21 jenis layanan RS sesuai Standar Pelayanan Minimal RS
- 39) Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar pelayanan antenatal
- 40) Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- 41) Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- 42) Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar
- 43) Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- 44) Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- 45) Persentase Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus
- 46) Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- 47) Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberculosis (TB)
- 48) Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko

- terinfeksi HIV
 Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
- 49) Persentase Balita Stunting
 - 50) Persentase Imunisasi Dasar Lengkap
 - 51) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC
 - 52) Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS
 - 53) Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan
 - 54) Persentase Kelurahan yang STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
 - 55) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
 - 56) Persentase Puskesmas yang terakreditasi
 - 57) Persentase kepuasan pelanggan terhadap pelayanan kesehatan
 - 58) Jumlah Puskesmas yang mengembangkan pelayanan pengobatan tradisional
 - 59) Jumlah Puskesmas/Sarana prasarana yang sesuai standar
 - 60) Jumlah jenis layanan spesialis yang tersedia di RSUD Gandus
 - 61) Persentase sarana dan prasarana dan alat kesehatan RSUD Gandus
 - 62) BOR (Bed Occupancy Ratio) / angka penggunaan tempat tidur
 - 63) AVLOS (Average Length of Stay) / rata-rata lamanya pasien dirawat
 - 64) Persentase Peralatan Kesehatan Sesuai Standar Rumah Sakit Kelas B
 - 65) Kepatuhan Dokter terhadap PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan) dan Clinical Pathway
 - 66) Indikator Kinerja Keuangan
 - 67) SDM yang Mendapat Pelatihan Minimal 20 jam per tahun
 - 68) Persentase Pemenuhan SDM Berkompeten Sesuai Standar Rumah Sakit Kelas B
 - 69) Nilai Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan
 - 70) Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Bari
 - 71) Meningkatkan
 - 72) kualitas kesehatan
 - 73) masyarakat
 - 74) Cakupan Kegiatan
 - 75) Penanganan Covid-19

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun Anggaran 2020 dapat alokasi anggaran sebesar Rp614,028,463,951.26 dan dapat direalisasikan sebesar Rp111,751,804,114.00 atau sebesar 18,20% dari total alokasi pagu anggaran tersedia. Indikator capaian program perangkat daerah dari aspek pekerjaan umum dan penataan ruang di tahun 2017 - 2020 antara lain adalah:

- 1) Cakupan kegiatan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh**
- 2) Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter /orang /hari*
- 3) Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter /orang /hari*
- 4) Tersedianya sistem air limbah setempat yg memadai *
- 5) Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota*

- 6) Terpenuhinya Usulan Masyarakat untuk Ketersediaan penerangan Jalan dan keamanan masyarakat
- 7) Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan*
- 8) Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Rinci Tata Ruang Beserta Peta Analog dan Digital
- 9) Tersedianya Sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan
- 10) Tersedianya Jalan yang menghubungkan Pusat-pusat Kegiatan dalam Wilayah Kota
- 11) Tersedianya Jalan yang Memudahkan Masyarakat per Individu Melakukan Perjalanan
- 12) Tersedianya Jalan yang Menjamin Pengguna Jalan Berkendaraan dengan Selamat
- 13) Tersedianya Jalan yang menjamin Kendaraan -kendaraan dapat Berjalan dengan Selamat dan Nyaman
- 14) Tersedianya Jalan yang Menjamin Perjalanan dapat Dilakukan Sesuai dengan Kecepatan Rencana
- 15) Jalan Penghubung dari Ibu Kota Kecamatan ke Kawasan Permukiman Penduduk (minimal dilalui roda 4)
- 16) Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase /Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5)
- 17) Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat
- 18) Rasio Panjang Turap/Talud/Bronjong Terhadap Panjang Rawan Longsor
- 19) Panjang jalan Kota Dalam Kondisi Baik
- 20) Talud/Bronjong dalam Kondisi Baik
- 21) Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau bangunan Rumah Liar
- 22) Sistem Informasi/Database Jalan dan jembatan
- 23) Rasio Pemenuhan Kebutuhan Saprak Kebinamargaan
- 24) Rasio Saluran Sungai dalam Kondisi Bersih
- 25) Tersedianya Air Minum Baku untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-hari
- 26) Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar
- 27) Terlaksananya Penjaringan Aspirasi Masyarakat Melalui FKB dalam Penyusunan RTR
- 28) Terlaksananya Tindakan Awal Terhadap Pengaduan Masyarakat Tentang Pelanggaran Tata Ruang
- 29) Terlayannya Masyarakat dalam Mengurus Izin Pemanfaatan Ruang Sesuai Perda RTRW
- 30) Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan
- 31) Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya
- 32) Persentase tingkat kondisi jalan baik dan sedang
- 33) Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi wilayah kota
- 34) persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman
- 35) persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai
- 36) persentase penduduk yang terlayani jaringan drainase skala kota
- 37) Persentase pengurangan genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih 2 kali setahun
- 38) Persentase jumlah izin mendirikan bangunan (IMB)
- 39) Persentase tersedianya layanan izin usaha jasa konstruksi

(IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 hari kerja

- 40) Persentase kawasan yang dimanfaatkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kota beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Wajib Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Tahun Anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 247,215,510,071.68 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 208,534,162,839.00 atau 84,35 % dari total alokasi pagu anggaran tersedia. Indikator capaian program perangkat daerah dari aspek perumahan rakyat dan Kawasan permukiman di tahun 2017 - 2020 antara lain adalah:

- 1) Cakupan ketersediaan rumah layak huni*
- 2) Cakupan lingk yg sehat dan aman yg didukung PSU*
- 3) Lingkungan permukiman kumuh
- 4) Cakupan layanan rumah layak huni yg terjangkau*
- 5) Rasio perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial**
- 6) Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk
- 7) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
- 8) Tingkat Waktu Tanggap
- 9) Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi
- 10) Jumlah Mobil Damkar di atas 3000-5000 Liter dalam WMK
- 11) Persentase Jalan Lingkungan yang Terpelihara dengan Baik
- 12) Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum yang Aman
- 13) Persentase Rumah Tangga Berakses Air Limbah
- 14) Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan
- 15) Persentase Ketersediaan Rumah layak Huni
- 16) Persentase Lampu Penerangan dari Jalan/Sarana Umum
- 17) Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- 18) Rasio TPU per Satuan Penduduk
- 19) Persentase ketersediaan rumah layak huni bagi korban relokasi dan bencana
- 20) Persentase sebaran perencanaan dan pengembangan pembangunan

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp30,118,947,113.80 dan dapat direalisasikan sebesar Rp27,791,313,062.00 atau mencapai 92,29% dari total pagu anggaran tersedia. Indikator capaian program perangkat daerah dari aspek ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di tahun 2017 - 2020 antara lain adalah:

- 1) Cakupan Penegakkan Perda dan Perkada
- 2) Cakupan Patroli Siaga Trantibmas
- 3) Cakupan Rasio Petugas Linmas
- 4) Cakupan Patroli Petugas Satuan Polisi Pamong Praja
- 5) Rasio Jumlah Polisi PP per 10.000 pddk
- 6) Jumlah Linmas per jumlah 10.000 pddk
- 7) Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan
- 8) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3
- 9) Kegiatan Pembinaan Perlindungan Masyarakat se Kota Palembang
- 10) Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi PP
- 11) Rasio jumlah FPK per jumlah kecamatan

- 12) Rasio konflik yang diselesaikan
- 13) Pembinaan perlindungan masyarakat
- 14) Jumlah kegiatan pembinaan politik
- 15) Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
- 16) Jumlah Konflik Sosial
- 17) Jumlah Konflik SARA
- 18) Jumlah Ormas dan OKP yang Sesuai Aturan
- 19) Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Pilih
- 20) Persentase Pelayanan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada
- 21) Tingkat kepuasan masyarakat atas layanan perangkat daerah

6. Sosial

Urusan wajib Sosial pada Tahun Anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp4,951,201,991.00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp4,917,086,570.00 atau sebesar 99,31% dari total pagu anggaran. Indikator capaian program perangkat daerah dari aspek sosial di tahun 2017 - 2020 antara lain adalah:

- 1) Persentase PMKS Skala Kab Kota yang Memperoleh Bantuan sosial untuk pemenuhan Kebutuhan dasar
- 2) Persentase PMKS Skala Kab Kota yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenisnya
- 3) Persentase Panti Sosial skala Kab Kota yang menyediakan sarana prasarana
- 4) Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana prasaran Pelayanan Kesejahteraan Sosial
- 5) Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social
- 6) Sarana sosial seperti Panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
- 7) Persentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
- 8) Persentase korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
- 9) Persentase penyandang cacat fisik dan mental ,serta lanjut usia tidak pontesial yang telah menerima jaminan sosial
- 10) Persentase PMKS yang tertangani
- 11) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Perangkat Daerah
- 12) Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti
- 13) Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti
- 14) Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti
- 15) Persentase galndangan dan pengemis terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti
- 16) Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota

A.2. Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Ketenagakerjaan

Urusan wajib Ketenagakerjaan pada Tahun Anggaran 2020

endapat alokasi anggaran sebesar Rp4,427,101,550.00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp4,357,835,171.00 atau mencapai 98,44% dari total alokasi pagu anggaran. Indikator capaian program perangkat daerah dari aspek ketenagakerjaan di tahun 2017 – 2020 antara lain adalah:

- 1) Angka Partisipasi Angkatan Kerja
 - 2) Ketersediaan Angkatan Kerja Terlatih
 - 3) Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja
 - 4) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
 - 5) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
 - 6) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan
 - 7) Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
 - 8) Tingkat pengangguran
 - 9) Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
 - 10) Keselamatan dan perlindungan
 - 11) Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
 - 12) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek
 - 13) Besaran pemeriksaan perusahaan
 - 14) Besaran pengujian peralatan di perusahaan
2. Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun Anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp4,714,501,971.80 dan dapat terealisasi sebesar Rp4,707,831,017.00 atau sebesar 99,86% dari total alokasi pagu anggaran tersedia. Indikator capaian program perangkat daerah dari aspek pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tahun 2017 – 2020 antara lain adalah:

1. Cakupan keluarga balita mendapat penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak
2. Cakupan remaja mendapat informasi dan konseling KRR
3. Cakupan siswa SMP/SMU mendapat penyuluhan narkoba dan PMS
4. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan
5. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu
6. Angka Melek Huruf Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas
7. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
8. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum
9. Cakupan Peran Serta Lembaga yang Berbasis Gender dalam Pembangunan
10. Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR
11. Rasio KDRT
12. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu
13. Persentase OPD yang sudah Melaksanakan
14. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

3. Pangan

Urusan pilihan Pangan pada Tahun Anggaran 2020

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2,036,356,550.00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1,772,198,000.00 atau 87,08% dari total alokasi pagu anggaran tersedia. Indikator capaian program perangkat daerah dari aspek pangan di tahun 2017 - 2020 antara lain adalah:

- 1) Ketersediaan energi dan protein perkapita
- 2) Penguatan cadangan pangan
- 3) Ketersediaan Informasi Pasokan harga dan akses pangan di daerah
- 4) Stabilitas harga dan pasokan pangan
- 5) Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PHH)
- 6) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
- 7) Penanganan daerah rawan pangan
- 8) Regulasi ketahanan pangan
- 9) ketersediaan pangan utama
- 10) Rasio penyakit ternak ditemukan terhadap penyakit ternak yang tertanggulangi
- 11) Cakupan kegiatan peningkatan produksi hasil peternakan
- 12) Tingkat pemasaran produksi hasil peternakan
- 13) Tingkat produksi peternakan pertahun
- 14) Rasio kelompok ekonomi masyarakat pesisir terbina
- 15) Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
- 16) Ketersediaan Pangan Utama
- 17) Per% Daerah Rawan Pangan
- 18) Tidak Ditemukannya Bahan Berbahaya pada Pangan Segar

4. Pertanian

Urusan Wajib Pertanian pada Tahun Anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp329,656,245.00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp327,943,745.00 atau sebesar 99,48%. Indikator capaian program perangkat daerah dari aspek pertanian di tahun 2017 - 2020 antara lain adalah:

- 1) Luas lahan bersertifikat
- 2) Penyelesaian kasus tanah negara
- 3) Persentase penataan batas wilayah yang terlaksana

5. Lingkungan Hidup

Urusan wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 78,415,846,316.20 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 64,625,166,580.00 atau sebesar 82,41% dari total pagu anggaran tersedia. Indikator capaian program perangkat daerah dari aspek lingkungan hidup di tahun 2017 - 2020 antara lain adalah:

- 1) Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan*
- 2) Penanganan sampah
- 3) Tempat pembuangan sampah (TPS) per 1000 penduduk
- 4) Kebersihan Pasar
- 5) Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan* (Bank Sampah)
- 6) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL.
- 7) Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air*
- 8) Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti*
- 9) Persentase Ketersediaan data/informasi jumlah timbulan B3
- 10) Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status

kerusakannya*

- 11) Ketersediaan informasi data SDA dan lingkungan hidup
- 12) Rasio kendaraan yang lulus uji emisi
- 13) Ketersediaan dokumen evaluasi implementasi Rencana Aksi Udara Bersih***
- 14) Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara*
- 15) Tersedianya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (20% dari luas kota/kawasan perkotaan)*
- 16) Penanggung jawab usaha atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan atau SPPL dan penyampaian laporan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL
- 17) Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan pengelolaan lingkungan
- 18) Penghargaan yang diterima dalam pengelolaan lingkungan hidup
- 19) Tersedianya sistem pengangkutan sampah di perkotaan

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun Anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp12,651,334,653.00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp11,972,840,618.00 atau 94,64% dari pagu anggaran tersedia. Pelaksanaan program dan kegiatan Belanja Langsung berupa program dan kegiatan rutin. Indikator capaian program perangkat daerah dari aspek administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tahun 2017 – 2020 antara lain adalah:

- 1) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 2) Penerapan KTP Berbasis NIK
- 3) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
- 4) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
- 5) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
- 6) Rasio Pasangan Berakte Nikah
- 7) Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik
- 8) Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun
- 9) Persentase Pasangan Berakte Nikah Non Muslim
- 10) Persentase Pelayanan yang Sesuai dengan SOP
- 11) Lamanya Waktu Pelayanan
- 12) Jumlah OPD yang melakukan pemanfaatan data kependudukan
- 13) Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
- 14) Jumlah Inovasi Pelayanan

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan pada Tahun Anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp424,997,200.00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp420,204,700.00 atau sebesar 98,87%. Indikator capaian program perangkat daerah dari aspek pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan di tahun 2017 – 2020 antara lain adalah:

- 1) LPM Berprestasi
- 2) Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga Pembinaan Masyarakat (LPM)
- 3) Rata-rata jumlah Lembaga Kemasyarakatan (LK) yang dibina di 107 kelurahan
- 4) PKK aktif

- 5) Pelatihan keterampilan usaha bagi lembaga ekonomi desa
 - 6) Rasio komponen masyarakat yang hadir dalam musrenbang kelurahan
 - 7) Bimbingan teknis bagi aparatur pemerintah desa/kelurahan
 - 8) Posyandu aktif
 - 9) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun Anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp9,149,761,515.20 dapat direalisasikan sebesar Rp7,306,574,321.00 atau sebesar 79,86% dari pagu anggaran tersedia. Indikator capaian program perangkat daerah dari aspek pengendalian penduduk dan keluarga berencana di tahun 2017 - 2020 antara lain adalah:
- 1) Prevalensi peserta KB aktif
 - 2) Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I
 - 3) Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun
 - 4) Cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun 3.5%
 - 5) Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif 65%
 - 6) Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi 5%
 - 7) Cakupan anggota bina keluarga balita ber KB 70%
 - 8) Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
 - 9) Rasio petugas lapangan KB (Penyuluh KB PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 desa/kelurahan
 - 10) Rasio pembantu pembina KB PPKBD 1 petugas di setiap desa
 - 11) Cakupan Keluarga Balita Mendapat Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak
 - 12) Cakupan Remaja Mendapat Informasi dan Konseling KRR
 - 13) Cakupa Siswa SMP/SMA Mendapat Penyuluhan Narkoba dan PMS
 - 14) Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kel 100% setiap tahun
 - 15) Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
 - 16) Terpenuhinya kebutuhan model operasional BKB Posyandu PAUD
 - 17) Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
 - 18) Total Fertility Rate (TFR) / jumlah rata-rata anak yang dilahirkan wanita selama masa reproduksi
 - 19) Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB
 - 20) Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk
 - 21) Pengendalian Penduduk
 - 22) Jumlah kebijakan (Peraturan daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk
 - 23) Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan)
 - 24) Ratio Akseptor KB
 - 25) Rata-rata jumlah anak per keluarga

- 26) Angka Pemakaian kontrasepsi/CPR bagi
 - 27) perempuan menikah usia 15-49
 - 28) Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun
 - 29) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - 30) Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi
 - 31) Peserta KB baru
 - 32) Penambahan peserta KB baru (Additional User)
 - 33) Persentase Keluarga Pra Sejahtera
 - 34) Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB
 - 35) Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB
 - 36) Cakupan anggota Bina keluarga Lansia (BKL) ber KB
 - 37) Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan
 - 38) Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk
 - 39) Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB mandiri
 - 40) Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
 - 41) Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan
 - 42) Cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa/Kelurahan
 - 43) Rata-rata usia kawin pertama wanita
 - 44) Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD
9. Perhubungan

Urusan wajib Perhubungan pada Tahun Anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp24,226,147,813.80 dan dapat direalisasikan sebesar Rp23,973,868,859.00 atau sebesar 98,96%. Indikator capaian program perangkat daerah dari aspek perhubungan di tahun 2017 – 2020 antara lain adalah:

- 1) Jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
- 2) Rasio Prasarana dan Fasilitas LLAJ terpelihara
- 3) Tersedianya angkutan umum yg melayani wilayah yg telah tersedia jaringan jalan kota
- 4) Tersedianya angkutan umum yg melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal/terpencil dg wil yang telah berkembang pd wil telah tersedia jaringan jl kota*
- 5) Tersedianya kapal sungai untuk melayani jaringan trayek dalam Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai yang dapat dilayari
- 6) Tersedianya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kota
- 7) Jumlah arus penumpang angkutan umum
- 8) Tersedianya terminal angkutan umum penumpang pada wil yg telah dilayani angkutan umum dlm trayek
- 9) Tersedianya halte pada wil yg telah dilayani angkutan umum dlm trayek
- 10) Tersedianya SDM bidang terminal
- 11) Jumlah Angkutan Laut/Udara/Terminal Bis/Dermaga

- 12) Tersedianya pelabuhan sungai untuk melayani kapal sungai yang beroperasi pada trayek dalam Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai
 - 13) Tersedianya kapal sungai yang melayani trayek dalam Kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai yang dapat dilayari
 - 14) Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota
 - 15) Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam Kota
 - 16) Angkutan darat
 - 17) Rasio ijin trayek
 - 18) Kepemilikan KIR angkutan umum
 - 19) Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan dan penerangan jalan umum pd jln kota*
 - 20) Pemasangan Rambu-rambu
 - 21) Tersedianya SDM bidang MRL, evaluasi andalalin, pengelolaan parkir*
 - 22) Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor*
 - 23) Tersedianya SDM bidang pengujian kendaraan bermotor*
 - 24) Tersedianya SDM yg berkopetensi sbg pengawas kelaikan kendaraan pd setiap perusahaan angkutan umum*
 - 25) Jumlah uji kir angkutan umum
 - 26) Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)
 - 27) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
 - 28) Persentase Titik Kemacetan yang teratasi
 - 29) Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum
 - 30) Tingkat Okupansi Moda Angkutan Umum (satuan LF)
 - 31) Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah
10. Komunikasi dan Informatika
- Urusan wajib Komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp25,892,775,666.51 dan dapat direalisasikan sebesar Rp24,412,297,370.00 atau 94,28% dari total alokasi pagu anggaran tersedia. Indikator capaian program perangkat daerah dari aspek komunikasi dan informatika di tahun 2017 - 2020 antara lain adalah:
- 1) Pelaksanaan desiminasi dan pendistribusian informasi nasional*
 - 2) Jumlah jaringan komunikasi
 - 3) Jumlah surat kabar nasional/lokal
 - 4) Jumlah penyiaran radio/TV lokal
 - 5) Pameran/expo
 - 6) Web site milik pemerintah daerah
 - 7) Jumlah kajian dan penelitian bidang komunikasi dan informatika
 - 8) Rasio pegawai yang telah mengikuti diklat bidang kominfo**
 - 9) Jumlah Pelatihan di Bidang Kominfo
 - 10) Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di tk kecamatan 50%
 - 11) Indeks Keterbukaan Informasi Pembangunan (melalui survey Kepuasan Masyarakat)
 - 12) Jumlah Sistem E-Gov Yang Terintegrasi
 - 13) Persentase OPD Yang Terhubung Jaringan E-Gov
 - 14) Rata-rata Kecepatan Jaringan E-Gov

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 Urusan Wajib Koperasi dan UKM pada Tahun Anggaran 2019 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.507.827.500,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp2.212.732.179,- atau 88,23% dari total alokasi pagu anggaran tersedia. Indikator capaian program perangkat daerah dari aspek koeprasi, usaha kecil dan menengah di tahun 2017 – 2020 antara lain adalah:
 - 1) Persentase Usaha Mikro dan Kecil
 - 2) Cakupan bina kelompok pengrajin
 - 3) Tingkat penanganan perlindungan pelaku usaha dan konsumen
 - 4) Jumlah UKM non BPRL/LKM UKM
 - 5) Jumlah BPRL/LKM
 - 6) Cakupan bina UKM
 - 7) Persentase Usaha Mikro dan Kecil
 - 8) Persentase Koperasi aktif
 - 9) Jumlah SDM Koperasi yang ikut Pelatihan dan Pendampingan
 - 10) Jumlah SDM UKM yang ikut Pelatihan dan Pendampingan
 - 11) Persentase Penilaian Kesehatan koperasi
12. Penanaman Modal
 Urusan Wajib Penanaman Modal pada Tahun Anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp22,620,016,342.43 dan dapat direalisasikan sebesar Rp20,639,195,357.00 atau sebesar 91,24% dari total pagu anggaran tersedia. Indikator capaian program perangkat daerah dari aspek penanaman modal di tahun 2017 – 2020 antara lain adalah:
 - 1) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
 - 2) Tingkat Pertumbuhan Investasi Daerah
 - 3) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
 - 4) Daya Serap Tenaga Kerja PMDN/PMA
 - 5) Indikator Nilai PAD dari Izin Gangguan
 - 6) Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan 1 sektor/bidang usaha pertahun
 - 7) Terselenggaranya fasilitasi Pemerintah Daerah dalam rangka kerjasama UMKMK-pengusaha provinsi/nasional 1 kali pertahun
 - 8) Terlaksananya promosi peluang investasi penanaman modal Kota Palembang, dari target 2 kali pertahun
 - 9) Terlaksananya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha 1 kali pertahun
 - 10) Rasio daya serap tenaga kerja
 - 11) Kenaikan/penurunan nilai realisasi investasi
 - 12) Terimplementasikannya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE)
 - 13) Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB
 - 14) Penerbitan IUJK
 - 15) Terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan bidang PM melalui PTSP
 - 16) Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah
13. Kepemudaan dan Olahraga
 Urusan wajib bukan pelayanan dasar Kepemudaan dan Olah Raga pada Tahun Anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp4,275,380,692.20 dan dapat direalisasikan sebesar Rp4,228,972,268.00 atau sebesar 98,91% dari total alokasi pagu anggaran tersedia. Indikator capaian program perangkat daerah dari aspek kepemudaan dan olahraga di tahun 2017 – 2020 antara

lain adalah:

- 1) Cakupan kegiatan upaya pencegahan Penyalahgunaan narkoba
- 2) Cakupan Kegiatan Pengembangan dan keserasian Kebijakan Pemuda
- 3) Jumlah Kegiatan Kepemudaan
- 4) Jumlah Kegiatan Olahraga
- 5) Jumlah Organisasi Olahraga
- 6) Jumlah Pemuda yang mendapatkan pelatihan wirausaha
- 7) Jumlah Event olahraga tingkat lokal, regional, nasional dan internasional

14. Statistik
Urusan Wajib Statistik belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palembang. Saat ini masih dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kota Palembang.

15. Persandian
Urusan Wajib Persandian melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, tetapi belum ada.

16. Kebudayaan
Urusan wajib Kebudayaan pada Tahun Anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp6,241,140,550.73 dan dapat direalisasikan sebesar Rp5,532,227,864.00 atau 88,64% dari total pagu anggaran tersedia. Indikator capaian program perangkat daerah dari aspek kebudayaan di tahun 2017 - 2020 antara lain adalah:

- 1) Persentase Jenis Budaya yg Dilestarikan
- 2) Presentase Jenis Budaya yang Terkelola
- 3) Tingkat Pengelolaan Keragaman Budaya
- 4) Tingkat Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
- 5) Misi kesenian
- 6) Cakupan Sumber Daya Manusia kesenian
- 7) Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
- 8) Cakupan kajian seni
- 9) Cakupan gelar seni
- 10) Cakupan fasilitasi seni
- 11) Penyelenggaraan festival seni dan budaya
- 12) Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
- 13) Cakupan Organisasi
- 14) Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu
- 15) Jumlah Karya Budaya yang di revitalisasi dan inventarisasi

17. Perpustakaan
Urusan Wajib Perpustakaan pada Tahun Anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp338,257,500.00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp337,957,500.00 atau sebesar 99,91%. Indikator capaian program perangkat daerah dari aspek perpustakaan di tahun 2017 - 2020 antara lain adalah:

- 1) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
- 2) Persentase Pengunjung perpustakaan
- 3) Lamanya Waktu Pelayanan
- 4) Hasil Survei Kepuasan masyarakat
- 5) Jumlah Pemustaka

18. Kearsipan
Urusan Wajib Kearsipan pada Tahun Anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp117,620,989.00 dan dapat

direalisasikan sebesar Rp115,306,589.00 (98,03%). Indikator capaian program perangkat daerah dari aspek kearsipan di tahun 2017 – 2020 antara lain adalah:

- 1) Penerapan pengelolaan arsip secara baku
- 2) OPD yang telah melaksanakan pengarsipan digital
- 3) Sarana dan prasarana kearsipan yang berfungsi dengan baik
- 4) Kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia pengelola kearsipan
- 5) OPD yang menerapkan sistem Administrasi
- 6) kearsipan yang baik
- 7) Arsip yang dikelola
- 8) Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana kearsipan
- 9) yang terpelihara dengan baik
- 10) Jumlah Pengelola kearsipan di OPD

A. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

1. Kelautan dan Perikanan

Urusan pilihan Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp8,193,466,550.00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp6,791,205,612.00 atau sebesar 82,89% dari total alokasi pagu anggaran tersedia. Indikator capaian program perangkat daerah dari aspek kelautan dan perikanan di tahun 2017 – 2020 antara lain adalah:

- 1) Rasio penyakit ternak ditemukan terhadap penyakit ternak yang tertanggulangi
- 2) Cakupan kegiatan peningkatan produksi hasil peternakan
- 3) Tingkat pemasaran hasil produksi hasil peternakan kecamatan
- 4) Tingkat produksi peternakan pertahun
- 5) Rasio kelompok ekonomi masyarakat pesisir terbina
- 6) Produksi perikanan Budidaya
- 7) Produksi perikanan kelompok nelayan
- 8) Cakupan bina kelompok nelayan
- 9) Konsumsi ikan per kapita
- 10) Kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
- 11) Produksi Benih Ikan
- 12) Produksi Perikanan Tangkap
- 13) Produksi Olahan Hasil Perikanan

2. Pariwisata

Urusan wajib Pariwisata pada Tahun Anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp18,362,614,554.59 dan dapat direalisasikan sebesar Rp9,200,894,757.00 atau sebesar 50,11% dari total alokasi pagu anggaran tersedia. Indikator capaian program perangkat daerah dari aspek pariwisata di tahun 2017 – 2020 antara lain adalah:

- 1) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
- 2) Jumlah Kunjungan Wisata per Tahun (orang)
- 3) Ketersediaan Tempat Wisata yang Representatif
- 4) Tingkat Kerjasama Pariwisata
- 5) Indikator Peningkatan Jumlah Wisatawan
- 6) Cakupan tempat wisata
- 7) Cakupan Organisasi
- 8) Kunjungan wisatawan
- 9) Jumlah destinasi wisata yang ada
- 10) Jumlah kerjasama kemitraan bidang pariwisata
- 11) Lama Kunjungan Wisata

- 12) Jumlah PAD/jumlah retribusi pemakaian asset yang dikelola bidang pariwisata
- 13) Jumlah Ekonomi Kreatif yang tersedia

3. Pertanian

Urusan Pilihan Pertanian pada Tahun Anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1,206,952,100.00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1,092,136,100.00 atau sebesar 90,49%. Indikator capaian program perangkat daerah dari aspek pertanian di tahun 2017 – 2020 antara lain adalah:

- 1) kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
- 2) Pasar produksi hasil pertanian dan perkebunan disetiap kecamatan
- 3) Cakupan kegiatan peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
- 4) Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya
- 5) Cakupan bina kelompok petani
- 6) Cakupan kegiatan peningkatan teknologi perkebunan/kehutanan
- 7) Terpenuhinya bimtek/pelatihan pembinaan dan penyuluhan tentang pembangunan pertanian yang berwawasan lingkungan bagi petani dan pelaku
- 8) agribisnis
- 9) Produksi Padi
- 10) Produksi Tanaman Perkebunan (Karet)
- 11) Produktivitas Tanaman Perkebunan (Karet)
- 12) Tingkat Produksi Peternakan Pertahun
- 13) % Peningkatan Pendapatan Rata-Rata Petani

4. Kehutanan

Urusan Pilihan Kehutanan bukan urusan Pemerintah Kota Palembang, urusan itu menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral bukan urusan Pemerintah Kota Palembang, urusan itu menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

6. Perdagangan

Urusan pilihan Perdagangan pada Tahun Anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp4,723,854,989.00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp4,121,025,875.00 atau sebesar 87,24% dari total alokasi pagu anggaran tersedia. Indikator capaian program perangkat daerah dari aspek perdagangan di tahun 2017 – 2020 antara lain adalah:

- 1) Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dengan migas
- 2) Ekspor Bersih Perdagangan
- 3) Tingkat Kerjasama Perdagangan Internasional
- 4) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
- 5) Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
- 6) Jumlah Promosi dan pembinaan perdagangan
- 7) Cakupan usaha informal yang tersosialisasi
- 8) Jumlah alat ukur perdagangan yang tertera dan tera ulang

7. Perindustrian

Urusan pilihan Perindustrian pada Tahun Anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp5,664,577,226.20 dapat direalisasikan sebesar Rp5,489,884,042.00 atau 96,92% dari total alokasi pagu anggaran tersedia. Indikator capaian program perangkat daerah dari aspek perindustrian di tahun 2017 – 2020

antara lain adalah:

- 1) Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
- 2) Persentase Pertumbuhan industri kecil dan menengah
- 3) Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri
- 4) Persentase industri yang telah tertata
- 5) Cakupan Bina Kelompok Pengerajin
- 6) Cakupan bina kelompok pengrajin
- 7) Jumlah Pengembangan Sentra IKM

8. Transmigrasi

Urusan Pilihan Transmigrasi bukan urusan Pemerintah Kota Palembang, urusan itu menjadi kewenangan Pusat.

B. Urusan Penunjang Yang Dilaksanakan

1. Administrasi Pemerintahan

Urusan Penunjang Administrasi pemerintahan pada tahun anggaran 2020 menerima alokasi anggaran sebesar Rp100,540,142,834.00 dan dapat terealisasi sebesar Rp90,070,336,825.00 atau 89,59% dari total alokasi pagu anggaran tersedia. Indikator capaian program perangkat daerah dari aspek administrasi pemerintahan di tahun 2017 - 2020 antara lain adalah:

- 1) Cakupan kegiatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
- 2) Kerjasama antar pemerintah daerah yang dikuatkan dengan MoU
- 3) Rasio keputusan Walikota yang ditetapkan
- 4) Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
- 5) Rasio perda yang ditetapkan
- 6) Skor Evaluasi SAKIP Kota Palembang Minimal B
- 7) Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintahan
- 8) Indeks Kepuasan Masyarakat
- 9) Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
- 10) Pemerintah Daerah (EKPPD)
- 11) Persentase Berita Kegiatan Pemerintah yang disebarluaskan
- 12) Persentase Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja "BAIK"
- 13) Persentase Pelayanan Keprotokolan atas Kegiatan Pemerintah Kota Palembang
- 14) Persentase Penataan Batas Wilayah yang terlaksana
- 15) Persentase Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan Pemerintah
- 16) Persentase Jumlah Tempat Ibadah yang mendapat Bantuan Pemerintah
- 17) Rasio Tempat Ibadah
- 18) Nilai Evaluasi SAKIP Kota Komponen
- 19) Pelaporan Kinerja
- 20) Persentase Jumlah Produk Hukum Daerah (Perda/Perwali) yang sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum
- 21) Daerah
- 22) Persentase Perangkat Daerah yang tertata Kelembagaannya
- 23) Persentase Unit Kerja dengan Nilai IKM "BAIK"
- 24) Jumlah Pelaksanaan Workshop/Lokakarya
- 25) Pihak Eksekutif dengan Pelaku Usaha
- 26) Jumlah Promosi/Pameran/Event di Bidang
- 27) Perekonomian

- 28) Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan yang diselesaikan tepat waktu
- 29) Persentase Paket Lelang yang selesai diproses melalui ULP/LPSE

2. Pengawasan

Urusan Penunjang Pengawasan pada Tahun Anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp4,025,894,410.59 dan dapat direalisasikan sebesar Rp3,586,644,798.00 atau 89,09% dari total alokasi pagu anggaran tersedia. Indikator capaian program perangkat daerah dari aspek pengawasan di tahun 2017

– 2020 antara lain adalah:

- 1) Opini BPK Atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
- 2) Temuan Hasil Pemeriksaan Yang Ditindaklanjuti Tuntas
- 3) Persentase pengaduan masyarakat yang
- 4) ditindaklanjuti
- 5) Rasio Peningkatan Jenjang Sertifikasi Aparatur Pengawasan
- 6) Jumlah Aparatur Pengawasan yang Mempunyai Keahlian Tertentu
- 7) Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- 8) Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti
- 9) Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai evaluasi AKIP Inspektorat minimal BB
- 10) Indeks RB Kota Palembang Kategori A.
- 11) Level pembangunan budaya integritas Kota Palembang B
- 12) Persentase penurunan pengaduan masyarakat yang diterima
- 13) Jumlah Unit Kerja yang berpredikat WBK
- 14) Level IACM
- 15) Persentase unit kerja yang telah mengimplementasikan pada level terdefinisi

3. Perencanaan

Urusan Penunjang Perencanaan pada Tahun Anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3,716,722,317.00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp3,092,022,286.00 atau 83,11%. Indikator capaian program perangkat daerah dari aspek perencanaan di tahun 2017 – 2020 antara lain adalah:

- 1) Ketersediaan MoU Kerjasama Pembangunan
- 2) Ketersediaan Dokumen Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- 3) Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- 4) Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD)
- 5) Konsistensi Penjabaran Program RPJMD dan RKPD
- 6) Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- 7) Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
- 8) Tersedianya Informasi Mengenai RTRW Beserta Rencana Rinci Peta Analog dan Digital
- 9) Persentase keselarasan Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah
- 10) Persentase keselarasan Renja Perangkat Daerah terhadap RKPD
- 11) Persentase keselarasan Renstra Perangkat Daerah terhadap RPJMD
- 12) Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD
- 13) Persentase pagu Belanja Langsung RKPD yang

mengakomodir usulan masyarakat melalui Musrenbang

- 14) Persentase penyelesaian dokumen perencanaan tepat waktu
- 15) Jumlah Perangkat Daerah yang mengintegrasikan data dalam sistem Palembang Satu Data

4. Keuangan

Urusan Penunjang Keuangan pada Tahun Anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp11,055,178,708.19 dan dapat direalisasikan sebesar Rp8,339,483,557.00 atau 75,44%. Indikator capaian program perangkat daerah dari aspek keuangan di tahun 2017 – 2020 antara lain adalah:

- 1) Realisasi PAD terhadap potensi PAD
- 2) Rasio PAD terhadap realisasi pendapatan
- 3) Sistem informasi pelayanan perizinan dan administrasi pemerintah
- 4) Sistem Informasi Manajemen keuangan Pemda
- 5) Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang tepat waktu
- 6) Sistem informasi Manajemen Aset/barang Pemda
- 7) Jumlah asset yang tidak digunakan (Idle)
- 8) Persentase SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan
- 9) Persentase RKA Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan
- 10) Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan Keuangan yang sesuai ketentuan
- 11) Persentase Penataan Inventarisasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan
- 12) Persentase aset tidak bergerak milik Pemerintah Kota Palembang yang sudah memiliki alas hak
- 13) Penerimaan Pajak Daerah
- 14) Penerimaan Pajak Daerah
- 15) Aparatur yang memiliki sertifikasi perpajakan daerah

5. Kepegawaian

Urusan Penunjang Kepegawaian pada Tahun Anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp11,809,991,950.40 dan dapat direalisasikan sebesar Rp10,914,870,353.00 atau 92,42%. Indikator capaian program perangkat daerah dari aspek kepegawaian di tahun 2017 – 2020 antara lain adalah:

- 1) Pejabat yang telah memenuhi persyaratan diklat
- 2) Rasio PNS yang Kompeten dibidangnya
- 3) Keberadaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 4) Pelaksanaan analisa beban kerja sebagai acuan penilaian kinerja
- 5) Persentase Aparatur Sipil Negara yang lulus diklat teknis Fungsional
- 6) Persentase Aparatur Sipil Negara yang lulus diklat Kepemimpinan
- 7) Persentase Administrasi Kepegawaian yang Selesai Tepat Waktu
- 8) Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai ASN
- 9) Persentase tingkat pelaksanaan system informasi kepegawaian
- 10) Persentase tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

6. Penelitian dan Pengembangan

Urusan Penelitian dan Pengembangan pada Tahun

Anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3,932,857,500.00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp2,609,739,095.00 atau sebesar 66,36%. Indikator capaian program perangkat daerah dari aspek penelitian dan pengembangan di tahun 2017 – 2020 antara lain adalah:

- 1) Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2) Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis
- 3) Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pengembangan Kota
- 4) Rasio Aparat Perencana Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 5) Persentase implementasi rencana kelitbangan
- 6) Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah

24. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator : ketersediaan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, ketersediaan air bersih, sarana pemakaman, penggunaan telepon selular dan sarana transportasi.

Pembangunan merupakan realisasi dari aspirasi dan tujuan suatu bangsa untuk melakukan perubahan secara struktural melalui upaya sistematis. Dimanapun pembangunan manusia atau peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting. Penekanan terhadap pentingnya peningkatan SDM dalam pembangunan menjadi suatu kebutuhan karena kualitas manusia (SDM yang tangguh) disuatu wilayah memiliki andil besar dalam menentukan keberhasilan pengelolaan pembangunan di wilayahnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2018-2023, Pemerintah Kota Palembang dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkesinambungan, tiga aspek penting yang menjadi perhatian, yaitu peningkatan kualitas fisik (kesehatan), intelektualitas (pendidikan), maupun kemampuan ekonominya (daya beli) seluruh komponen masyarakat. Tingkat pendidikan dan kesehatan individu penduduk merupakan faktor dominan yang perlu mendapat prioritas utama dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Dengan tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk yang tinggi di Kota Palembang menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk itu sendiri yang semuanya bermuara pada aktivitas perekonomian yang maju. Oleh sebab itu, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia, termasuk dalam konteks ekonomi daerah.

Kebijakan pembangunan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia hanya akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah lain. IPM merupakan wujud dari komitmen tujuan nasional yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Agar keberhasilan peningkatan pembangunan menyentuh sasaran dan terkorrelasi terhadap upaya peningkatan kualitas hidup manusia

maka diperlukan pengukuran dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Analisis kinerja atas sumber daya manusia salah satunya dilakukan terhadap indikator mutu lulusan/tingkat pendidikan terakhir, baik itu Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sarjana (S1), Magister (S2), maupun Program Doktorat (S3). Data tersebut dapat dilihat dari jumlah rasio pencari kerja berdasarkan tingkat pendidikan di Kota Palembang.

Fokus Pembangunan Infrastruktur Kota Palembang terbagi atas beberapa sektor, yaitu:

1. Sektor Sumber Daya Air
 - Restorasi Sungai Sekanak Lambidaro;
 - Pembangunan Turap Sungai Musi;
 - Pembangunan Embung Konservasi 100 Ha Gandus;
 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kalidoni;
 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Gandus;
 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Karang Anyar 2.
 2. Sektor Bina Marga
 - Pembangunan Flyover Sekip Ujung;
 - Pembangunan Underpass Simpang RS. Charitas;
 - Pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (Jalan Nurdin Panji sampai ke Pelabuhan Boom Baru);
 - Pembangunan Akses Jembatan Musi IV menuju Jalan A. Yani;
 - Pelebaran Jalan Parameswara.
 3. Sektor Cipta Karya
 - Penataan lanjutan Taman dan Air Mancur di Bawah Jembatan Musi II;
 - Pengembangan Taman dan Air Mancur Kambang Iwak;
 - Penataan Jogging Track dan Pembangunan Air Mancur Taman Kolam Retensi Simpang Polda;
 - Penimbunan TPU Keramasan;
 - Pembangunan Air Mancur Menari Kawasan Kampung Kapitan;
 - Penataan Pedestrian Jl. Kol Atmo;
 - Penataan Kawasan Jl. Beringin Janggut – Rustam Effendi;
 - Penataan Pedestrian Jl. Letkol Iskandar;
 - Pengembangan Taman dan Air Mancur Kambang Telaga.
 4. Sektor Perhubungan
 - Pemanfaatan Ruang bawah struktur LRT Sumsel;
 - Pengoperasian Kembali Kereta Api Khusus Mahasiswa.
 5. Sektor Pariwisata
 - Penataan Kawasan Pulau Kemaro;
 - Pembuatan Pasar Wisata di Kawasan Sekanak;
 - Penataan Kawasan Kota Lama/Tua Sekanak Kerihin.
 6. Sektor Lingkungan Hidup
 - Pembuatan IPAL Industri Kecil;
 - Pusat Daur Ulang Sampah Kota Palembang;
 - Bank Sampah Induk Kota Palembang;
 - Penyediaan Sarana Pengelolaan Sampah;
 - Pengelolaan Sampah dengan Teknologi Tinggi yang Ramah Lingkungan (sesuai Perpres No. 35 Tahun 2015).
- 25. Kondisi Permasalahan Daerah Kota Palembang Saat Ini**
Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari

kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak dibatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan mendalam tentang kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi.

Perencanaan pembangunan Kota Palembang Tahun 2018-2023 merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya.

Pada Lima tahun pertama dan kedua RPJPD Kota Palembang telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti walaupun masih menyisahkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan rencana yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Krisis ekonomi yang dibarengi dengan krisis ekologi, krisis energi, krisis pangan dan ancaman perubahan iklim yang tak terbendung yang terjadi di seluruh belahan dunia, turut pula dirasakan di Indonesia. Kota Palembang sebagai motor penggerak perekonomian Provinsi Sumatera Selatan juga terkena dampaknya. Inflasi Kota Palembang Tahun 2020 sebesar 1,5% lebih besar dibandingkan dengan inflasi Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 0,57% dan lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 1,68%.

Selanjutnya, pandemic Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Pembatasan sosial dan perubahan pola hidup menjadikan tekanan yang sangat berarti pada aktivitas perekonomian masyarakat, tergambar dari pertumbuhan ekonomi Kota Palembang terkontraksi sebesar 0.25% pada tahun 2020.

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai Pandemi dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menyatakan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Penyebaran Covid-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Demikian halnya juga terjadi penyebaran Covid-19 di Kota Palembang. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi penyebaran Pandemi Covid-19 antara lain:

- Sosialisasi Terkait Pandemi Covid-19 kepada masyarakat;
- Menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, alat pengukur suhu, disinfektan, Alat Pelindung Diri (APD), masker serta penyemprotan disinfektan kawasan permukiman, pasar, tempat ibadah, sekolah, dan

perkantoran dengan melibatkan masyarakat (Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan partisipasi swasta lainnya), dan TNI/Polri;

- Melakukan Social/Physical Distancing.
- Work From Home (WFH) untuk Perkantoran;
- Melakukan Proses Belajar Mengajar secara dalam jaringan (daring).

Namun demikian upaya ini belum memberikan pengaruh yang besar dalam mencegah meluasnya penyebaran Pandemi Covid-19. Hal ini antara lain dikarenakan kurangnya pemahaman, masih adanya masyarakat yang kurang patuh terhadap protap penanganan Pandemi Covid-19. Oleh karena itu untuk mengantisipasi semakin meluasnya Pandemi Covid-19, perlu diambil langkah-langkah kebijakan strategis dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Untuk itu diperlukan kesiapan daerah untuk memastikan ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat tercukupi.

Menurut data dari Dinas Kesehatan Kota Palembang per tanggal 31 Desember 2020, jumlah kontak erat sebanyak 4.462 orang, dengan rincian: 202 orang dalam pemantauan, suspek 645 orang, konfirmasi 1.791 orang, dan discarded sebanyak 1.824 orang. Jumlah kasus suspek sebanyak 19.066 kasus, dengan rincian 2.601 kasus dalam proses pemeriksaan, 1.791 kasus konfirmasi, kasus discarded 12.632 kasus dan probable 153 kasus.

Jumlah Kasus Probabel sebanyak 153 kasus dengan rincian: dirawat 12 kasus, sembuh 19 kasus, dan meninggal 122 kasus. Sedangkan untuk jumlah kasus konfirmasi sebanyak 5.480 kasus, dengan rincian asimtomatik 1.791 kasus dan simtomatik sebanyak 3.689 kasus. Untuk kasus asimtomatik, 120 kasus isolasi mandiri, 1.664 kasus sembuh dan 7 kasus meninggal, sedangkan kasus simtomatik, yang dirawat 326 kasus, isolasi mandiri 524 kasus, 2.577 kasus sembuh dan meninggal 262 kasus.

Jumlah kasus Corona per tanggal 11 Februari 2021 kasus Covid-19 yaitu, Kasus Konfirmasi 7.247, Suspek 22.919, Probable 153, Kontak Erat 5.514, Sembuh 5.730, Meninggal 316, Discarded kasus Suspek 14.974 (Sumber data Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2020). Permasalahan dan Isu Penting pembangunan Kota Palembang tahun 2022 sebagaimana identifikasi dan analisa lingkungan daerah yang telah diuraikan diatas, dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.21 Identifikasi Masalah dan Isu Strategis Tahun 2022 Berdasarkan Misi, Prioritas, Urusan, Sasaran RPJMD Kota Palembang Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Sasaran	Permasalahan	Rekomendasi	Isu Strategis
Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata, bekeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis Teknologi dan Informasi	Penyediaan Infrastruktur Penopang Pembangunan Daerah,	Meratanya Kebutuhan Infrastruktur sebagai Penopang Pembangunan Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya jumlah ruas jalan yang memiliki rasio kendaraan berbanding kapasitas yang tinggi, sehingga pada ruas-ruas tersebut sangatlah rawan kemacetan. 2. efektivitas moda transportasi berbasis non-jalan raya masih belum terlalu signifikan memberikan dampak terhadap pengurangan kemacetan di Kota Palembang. 3. Masih adanya warga yang belum terlayani air bersih melalui PDAM dan Perusahaan Air lainnya. 		Permukiman kumuh dan air bersih Banjir dan sampah Kemacetan
	Pengelolaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Tata Kelola Lingkungan Perkotaan secara lestari dan berkelanjutan..	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya 66 titik rawan banjir di Kota Palembang menunjukkan adanya permasalahan dalam tata kelola jaringan pengairan. 2. Masih rendahnya partisipasi warga untuk berperan aktif dalam kegiatan bank sampah maupun 		

Misi	Tujuan	Sasaran	Permasalahan	Rekomendasi	Isu Strategis
			<p>pemanfaatan bank sampah yang ada.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengelolaan sampah melalui TPS 3R yang belum berjalan optimal 4. Masih tingginya biaya instalasi IPAL Komunal. 5. Masih kurangnya sosialisasi, menyebabkan masyarakat merasa enggan untuk berpartisipasi dalam program IPAL Komunal. 		
	Penyediaan Permukiman dan Kawasan Permukiman yang Layak dan Berwawasan Lingkungan Hidup	Tersedianya permukiman dan kawasan permukiman yang layak dan berwawasan lingkungan hidup..	Luas wilayah kumuh sebesar 2.032,11 ha (2016). Hal merupakan sebuah luasan yang sangat besar bagi sebuah kota yang merupakan ibukota provinsi dan juga salah satu pusat perekonomian di kawasan Sumatera Selatan.	permasalahan lingkungan kumuh ini harus segera diatasi, untuk meningkatkan daya saing kota, dan juga untuk menjadikan kota yang lebih layak huni.	
Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung	Peningkatan Daya Saing dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya sarana prasarana pendidikan. 2. Kurangnya jumlah SDM pendidik, khususnya pada jenjang sekolah menengah. 		Pendidikan Kesehatan Reformasi Birokrasi

Misi	Tujuan	Sasaran	Permasalahan	Rekomendasi	Isu Strategis
oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional			Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja dan Masyarakat		
	Mewujudkan pranata sosial yang kokoh dan solid di tengah masyarakat	Berkembangnya Nilai-Nilai Pri Kehidupan Umat Beragama Dan Budaya Yang Mengayomi Semua Elemen Masyarakat.			
	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel	Terlaksananya Good Governance Practices dan Reformasi Birokrasi			
Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan regional, nasional dan internasional yang kompetitif dan komparatif dengan menjamin rasa aman untuk berinvestasi	Membangun daya saing kota yang unggul sebagai pusat simpul pembangunan dan investasi tingkat kawasan ASEAN	Meratanya Sebaran Hasil Pembangunan Meningkatkan Investasi Daerah			Peningkatan pelayanan publik

Misi	Tujuan	Sasaran	Permasalahan	Rekomendasi	Isu Strategis
Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya saing tinggi	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berpusat pada masyarakat (community centered) berbasiskan inovasi dan daya kreasi dan berdaya saing tinggi	Berkembangnya ekonomi daerah berbasis inovasi Berkembangnya daya kreasi yang digerakkan oleh masyarakat (community centered).	1. Masih rentannya struktur perekonomian Kota Palembang terhadap potensi krisis. 2. Adanya tren peningkatan angka inflasi dalam lima tahun ke belakang. Ketimpangan pertumbuhan antar wilayah		Perekonomian Perdagangan dan investasi daerah Kemiskinan Pengangguran Pandemi Covid-19
Menjadikan Palembang Kota Pariwisata sungai dan budaya serta event olahraga kelas dunia yang harmoni antara kehidupan manusia dan alam	Mewujudkan Palembang sebagai riverfront city dan pusat pengembangan olahraga terbaik di kawasan ASEAN	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata Meningkatnya daya saing sektor kepemudaan dan olahraga.	1. Atraksi wisata atau destinasi wisata yang masih kurang menarik untuk dikunjungi 2. Kurangnya fasilitas pendukung 3. Lemahnya alternatif akses menuju destinasi wisata menyebabkan rendahnya kunjungan wisatawan menuju destinasi-destinasi tersebut		Pariwisata

BAB III TANTANGAN DAN PELUANG PENGUATAN SIDA

Kota Palembang yang mempunyai posisi strategis dan tempat tujuan wisata yang cukup potensial di Indonesia, membutuhkan penguatan sistem inovasi daerah agar proses percepatan pembangunan di daerah ini dapat diwujudkan segera. Penguatan sistem inovasi dapat memainkan peranan penting dalam meningkatkan daya saing, pertumbuhan dan kesejahteraan, peningkatan produktivitas dan penghematan sumber daya, baik pada skala nasional maupun daerah. Penguatan sistem inovasi merupakan pilar penting dalam membawa Indonesia ke era ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*) dan masyarakat berpengetahuan (*knowledge-based society*). Karena itu, pembangunan Indonesia yang progresif perlu menjadikan penguatan sistem inovasi.

Dalam mengimplementasikan penguatan sistem inovasi daerah, Kota Palembang tentu harus mengenali tantangan dan peluang yang dihadapinya. Adapun tantangan dan peluang penguatan sistem inovasi daerah di Kota Palembang akan diuraikan di bawah ini. Isu strategis pembangunan daerah Kota Palembang Tahun 2021 berdasarkan evaluasi dan analisis saat ini adalah sebagai berikut :

Isu Pelayanan dan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang mencakup permasalahan :

- Banyaknya jumlah ruas jalan yang memiliki rasio kendaraan berbanding kapasitas yang tinggi, sehingga pada ruas-ruas tersebut sangatlah rawan kemacetan.
- efektivitas moda transportasi berbasis non-jalan raya masih belum terlalu signifikan memberikan dampak terhadap pengurangan kemacetan di Kota Palembang.
- Masih adanya warga yang belum terlayani air bersih melalui PDAM dan Perusahaan Air lainnya;
- Adanya 66 titik rawan banjir di Kota Palembang menunjukkan adanya permasalahan dalam tata kelola jaringan pengairan.
- Masih rendahnya partisipasi warga untuk berperan aktif dalam kegiatan bank sampah maupun pemanfaatan bank sampah yang ada.
- Pengelolaan sampah melalui TPS 3R yang belum berjalan optimal
- Masih tingginya biaya instalasi IPAL Komunal.
- Masih kurangnya sosialisasi, menyebabkan masyarakat merasa enggan untuk berpartisipasi dalam program IPAL Komunal.
- Luas wilayah kumuh sebesar 2.032,11 ha (2016). Hal merupakan sebuah luasan yang sangat besar bagi sebuah kota yang merupakan ibukota provinsi dan juga salah satu pusat perekonomian di kawasan Sumatera Selatan.

Isu Pendidikan dan Kesehatan yang mencakup permasalahan:

- Masih kurangnya sarana prasarana Pendidikan di Kota Palembang.
- Kurangnya jumlah SDM pendidik, khususnya pada jenjang sekolah menengah.

Isu Perekonomian, Perdagangan, Kemiskinan, Pengangguran, dan Pandemi Covid-19 yang mencakup permasalahan :

- Masih rentannya struktur perekonomian Kota Palembang terhadap potensi krisis.
- Adanya tren peningkatan angka inflasi dalam lima tahun ke belakang.
- Ketimpangan pertumbuhan antar wilayah

Isu Pariwisata yang mencakup permasalahan:

- Atraksi wisata atau destinasi wisata yang masih kurang menarik untuk dikunjungi
- Kurangnya fasilitas pendukung
- Lemahnya alternatif akses menuju destinasi wisata menyebabkan rendahnya kunjungan wisatawan menuju destinasi-destinasi tersebut.

3.1 TANTANGAN

Tantangan dalam penguatan sistem inovasi bagi Kota Palembang adalah sebagai berikut:

3.1.1 Pelayanan dan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

Visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan ini perlu diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan filosofis yang terkandung, sehingga seluruh pihak yang terkait dan berkepentingan dapat secara sinergis, harmonis, dan optimal dalam memberikan kontribusi pencapaian visi. Sumatera Selatan Sumatera Selatan diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimilikinya.

3.1.2 Pendidikan dan Kesehatan

Palembang memiliki luas wilayah 400,61 km² dengan jumlah penduduk 1.843.488 jiwa (BPS 2018), sebanyak 318.749 sebagai pelajar (Dapodikdasmen, 2018). Tahun 2018 angka putus sekolah di Kota Palembang mencapai 1.278 kasus atau 17% dari jumlah kasus di Sumsel sebesar 7.322 kasus. Provinsi Sumatera Selatan menduduki peringkat 6 besar nasional dari jumlah kasus di Indonesia sebanyak 187.824 (Pusat Data Statistik Pendidikan/PDSP, 2018). Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyatakan bahwa anak tidak bersekolah tahun 2018 mencapai 4.586.332 kasus. Artinya, kasus anak belum terpenuhi hak dasar untuk mendapatkan pendidikan masih sangat tinggi.

Kebijakan pembangunan pemerintah pusat sangat terpengaruh oleh pandemi COVID-19, sehingga Bappenas, mengantisipasi perencanaan pembangunan pada tahun 2021 dengan Unprecedented Policies yaitu kebijakan percepatan pemulihan ekonomi yang sangat tergantung pada kombinasi antara kebijakan pemutusan sebaran virus dengan intervensi ekonomi. Pemerintah Daerah Kota Palembang melakukan beberapa kebijakan terhadap pasca COVID 19 melalui penggunaan APBD masih tetap diprioritaskan untukantisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

3.1.3 Perekonomian, Perdagangan, Kemiskinan, Pengangguran, dan Pandemi Covid-19

Besarnya tingkat pengangguran yang ada di setiap kota dan daerah di Indonesia, dengan kemajuan zaman dan tingkat perekonomian yang tidak stabil saat ini membuat pemerintah terkait berupaya untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka akan semakin besar kerawanan sosial yang ditimbulkan.

Tantangan pokok dalam pengurangan kemiskinan diantaranya adalah meliputi kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan. Dalam hal kemiskinan, semakin rendah tingkat kemiskinan maka makin sulit pula penanggulangannya. Selanjutnya dalam hal kerentanan, sebagian yang di atas garis kemiskinan sesungguhnya masih rentan jatuh ke kemiskinan. Terakhir dalam hal kesenjangan, laju pertumbuhan pendapatan kelompok penduduk 40% terbawah cenderung rendah. Kebijakan pengurangan kemiskinan yang sudah dilakukan di Kota Palembang adalah dengan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang bertugas melakukan koordinasi dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Palembang.

3.1.4 Pariwisata

Melalui pengembangan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara yang didukung oleh percepatan bidang informasi dan teknologi, Sumatera Selatan akan menjadi motor penggerak perekonomian regional dalam upaya menjadi provinsi termaju baik secara regional maupun nasional. Adanya outlet di Sumatera Selatan, perdagangan dari dan ke dalam kawasan ini akan memberikan nilai tambah yang besar kepada perekonomian Sumatera Selatan secara keseluruhan. Sektor-sektor yang akan memanfaatkan eksternalitas dari adanya pola pergerakan barang dan jasa yang tercipta adalah sektor jasa itu sendiri, termasuk di dalamnya sektor pariwisata, serta sektor keuangan dan perbankan. Dengan dukungan akses sarana transportasi dan komunikasi yang memadai diharapkan para pelaku usaha di sektor jasa ini dapat terus berkembang.

3.2 PELUANG

Peluang dalam penguatan sistem inovasi bagi Kota Palembang adalah sebagai berikut :

3.2.1. Perdagangan Bebas

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015 sebagai wujud kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya secara langsung akan memberi dampak langsung bagi perekonomian Indonesia dan Kota Palembang pada khususnya. Kerjasama ekonomi regional dan perjanjian bilateral dan multilateral memberikan peran secara khusus bagi Kota Palembang.

3.2.2 Penerapan *green economy* (Ekonomi Ramah Lingkungan)

Aktivitas-aktivitas ekonomi yang sangat mempertahankan kelangsungan fungsi lingkungan menjadi prasarat untuk perdagangan global. Peluang ini sangat memungkinkan untuk

dimanfaatkan Kota Palembang yang telah mulai merintis penerapan aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan.

3.2.3 Terbitnya PP 38 tahun 2017 tentang Inovasi daerah

OPD diwajibkan untuk membuat minimal 1 inovasi, Inovasi harus diimplementasikan pada masyarakat dan akan diukur tingkat ke manfaatannya

3.2.4 Berkembangnya pembangunan yang berorientasi pada globalisasi

Globalisasi yang ditandai oleh meningkatnya perpindahan barang dan jasa, modal, dan informasi lintas daerah dan lintas negara secara bebas, serta interaksi pasar lokal, pasar daerah, pasar dalam negeri dan pasar internasional secara lebih terbuka memberi peluang bagi masa depan Kota Palembang, yaitu:

- a. Perluasan pasar regional dan internasional akan meningkatkan kegiatan investasi, produksi dan perdagangan terutama komoditi yang dihasilkan Kota Palembang seperti pertanian konvensional dan organik serta hasil perkebunan.
 - b. Perluasan jaringan inovasi dan kerjasama internasional akan mendorong perubahan nilai, etos kerja dan budaya kerja yang lebih produktif, efisien dan efektif bagi masyarakat, pelaku usaha dan aparatur Pemerintah Kota Palembang
 - c. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan menciptakan berbagai kemudahan dan fasilitas dalam penyebaran informasi, ilmu pengetahuan teknologi, dan inovasi yang akan mendorong perbaikan manajemen pembangunan daerah Kota Palembang
 - d. Pengembangan klaster industri Agro - Mina -Wisata Berbasis Usaha Kreatif akan dapat menciptakan peluang bagi perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat
 - e. Mendorong tumbuhnya usaha baru berbasis iptekin di kalangan muda dan komunitas melalui pengembangan incubator bisnis serta berkembangnya industry agroteknowisata termasuk pangan organik, produk kerajinan dan industry pendukung pariwisata lainnya.
- ### 3.2.5 Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin pesat dan mengatasi hambatan jarak dan waktu

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mempengaruhi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media. Revolusi telekomunikasi membuat dunia menjadi seperti kampung global yang menghilangkan seat batas teritorial suatu negara. Akibat adanya saling ketergantungan membuat guncangan di sebuah negara dan kawasan bisa dalam waktu sekejap mengguncangkan negara dan kawasan lainnya.

3.2.6 Pembangunan Berbasis Pengetahuan

Pengetahuan merupakan modal penting bagi suatu daerah dalam meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi di zaman sekarang dan masa mendatang. Penerapan pengetahuan dalam pembangunan perekonomian suatu daerah akan memberi kesempatan tumbuhnya sistem ekonomiyang mempunyai daya saing dan inovatif.

Bank Dunia pun telah merumuskan empat pilar penting yang dibutuhkan dalam menumbuh kembangkan ekonomi berbasis pengetahuan.

Pertama, sebuah rezim ekonomi dan kelembagaan yang memberikan insentif bagi efisiensi penggunaan pengetahuan

yang ada dan baru dan berkembangnya kewirausahaan.

Kedua, populasi yang terdidik dan terampil yang dapat membuat, berbagi dan menggunakan pengetahuan dengan baik.

Ketiga, sebuah sistem inovasi efisien perusahaan, pusat penelitian, universitas, konsultan dan organisasi lain

Keempat, teknologi informasi dan komunikasi yang efisien dan fasilitatif.

Salah satu prinsip dasar dari ekonomi berbasis pengetahuan adalah inovasi. Ekonomi di Kota Palembang sudah seharusnya bergerak dari ekonomi yang mendorong pada investasi menjadi inovasi. Pemerintah, swasta dan universitas di Kabupaten ini harus saling bersinergi guna mewujudkan sistem ekonomi inovatif di Kabupaten tersebut. Lembaga-lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi dan sekolah kejuruan dan sekolah teknis, harus menghidupkan kembali perannya sebagai pemimpin penelitian dan inovasi, lebih proaktif dalam melayani penciptaan pengetahuan daripada sekedar transfer pengetahuan.

Salah satu cara untuk meningkatkan daya saing dan telah terbukti berhasil diterapkan di banyak negara maju adalah memperkuat sistem inovasi. Sistem inovasi mampu membangkitkan kreativitas dan inovasi yang diperlukan agar produk-produk sebuah daerah dapat bersaing secara langsung dengan produk daerah/negara lain, baik di pasar domestik maupun internasional.

Dengan mencermati persoalan yang dihadapi oleh Kota Palembang dan memetik pelajaran berharga dari negara/daerah lain yang dinilai berhasil, dapat diidentifikasi empat elemen strategis yang perlu diperbaiki dalam penguatan sistem inovasi di Kota Palembang guna menghadapi tantangan pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan, yaitu :

1. Perbaikan dalam kondisi dasar sebagai prasyarat penguatan sistem inovasi, yakni terkait hal-hal berikut :
 - a. Masih terbatasnya pemahaman pembuat kebijakan dan para pemangku kepentingan di Kota Palembang tentang penguatan sistem inovasi.
 - b. Masih sedikitnya kepakaran, praktik atau contoh keberhasilan, dan praktisi dalam mendorong gerakan yang dapat memberikan pengaruh signifikan pada penguatan sistem inovasi di berbagai bidang dan/atau tataran/konteks tertentu.
 - c. Belum adanya sinkronisasi penguatan sistem inovasi dalam pembangunan berbagai urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh OPD di Kota Palembang.
 - d. Keterbatasan basis data dan indikator sistem inovasi yang berkualitas sebagai landasan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah, serta proses pembelajaran dan perbaikan kebijakan.
2. Perbaikan dalam enam isu pokok kerangka kebijakan penguatan sistem inovasi, yaitu perbaikan dalam hal :
 - a. Kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan inovasi dan bisnis, terutama berkaitan dengan elemen basis data (*database*), regulasi, insentif, infrastruktur dasar pengembangan klaster industri, penembangan jaringan inovasi dan pengembangan teknopreneur.
 - b. Kelembagaan iptekin/litbangyasa, daya dukung

- iptekin/litbangyasa serta kemampuan absorpsi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang saat ini masih terbatas.
- c. Interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis dalam pengembangan klaster industri dan pengembangan teknopreneur yang hingga kini juga masih terbatas.
 - d. Pengembangan budaya kreatif-inovatif dalam masyarakat Kota Palembang (pelaku bisnis, pembuat kebijakan, para pelaku litbang, lingkungan akademis dan masyarakat secara umum), terutama dalam mendukung pengembangan klaster industri, pengembangan teknopreneur dan pengembangan tematik sistem inovasi.
 - e. Fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan daerah, terutama dalam hal pengembangan klaster industri (perikanan dan perbatikan) yang hingga kini belum berjalan sebagaimana diharapkan, pengembangan jaringan inovasi, pengembangan teknopreneur (wirausaha baru) dan pengembangan tematik sistem inovasi.
 - f. Internalisasi dinamika global, terutama berkaitan dengan aspek lingkungan, standarisasi, HKI dan ketenagakerjaan.
3. Perbaiki dalam kepeloporan dan kepemimpinan (formal maupun nonformal) yang visioner dan transformasional dengan komitmen tinggi untuk melakukan perubahan dalam perspektif jangka panjang.
 4. Perbaiki koherensi kebijakan di berbagai bidang pembangunan daerah, baik dalam konteks urusan wajib maupun urusan pilihan.

BAB IV
KONDISI SIDA YANG AKAN DICAPAI

Kondisi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Palembang yang akan dicapai secara umum menggambarkan bagaimana kondisi SIDa Kota Palembang yang diharapkan (target) terjadi pada akhir periode, yakni Tahun 2021. Capaian-capaian tersebut diharapkan menjadi pendukung utama keberhasilan pencapaian Visi pembangunan Kota Palembang. Isi dari Bab IV ini merupakan rencana capaian (target) dari kondisi yang saat ini ada, sebagaimana dicantumkan di dalam Bab I. Rencana capaian (target) Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kondisi SIDa Yang Akan Dicapai Kota Palembang

No	Pilar Prakarsa Penguatan SIDa	Kerangka Kebijakan Inovasi	Kondisi SIDa yang akan dicapai tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pilar Sosial	Elemen 1: mengetaskan segala bentuk kemiskinan	a) <i>Perlunya meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, pengurangan beban dan kegiatan ekonomi produktif;</i>
			b) <i>Peningkatan ketersediaan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Sanitasi</i>
		Elemen 2: menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosika n pertanian berkelanjutan	c) <i>Melakukan intervensi penurunan angka stunting</i>
			d) <i>Menambah lahan pertanian untuk pangan dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan</i>
		Elemen 3: menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	e) <i>Peningkatan akses pelayanan kesehatan</i>
		Elemen 4: Pendidikan Berkualitas	f) <i>Pemerataan kualitas pendidikan</i>
			g) <i>Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan</i>

		Elemen 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	<i>h) Peningkatan Kelembagaan Terkait Pengarustamaan Gender, Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Pengarustamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Data Gender dan Anak</i>
2	Pilar Ekonomi	Elemen 1: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	<i>i) Menciptakan peluang investasi agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan</i>
			<i>j) Menciptakan tempat wisata baru</i>
		Elemen 2: berkurangnya kesenjangan	<i>k) Perlu adanya inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua untuk mengurangi ketimpangan pendapatan.</i>
		Elemen 3: Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	<i>l) Memaksimalkan PAD dari sumber pajak dengan kemudahan dan peningkatan pelayanan</i>
3	Pilar Lingkungan	Elemen 1: Air Bersih dan Sanitasi Layak	<i>m) Penambahan alokasi anggaran untuk pelayanan air minum layak dan sanitasi layak</i>
		Elemen 2: menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	<i>n) Penambahan alokasi anggaran untuk pembangunan Rumah Layak Huni a.</i>
4	Pilar Hukum dan Tata Kelola	Elemen 1: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang kokoh	<i>o) Penguatan kelembagaan yang efektif, akuntabel dan transparan</i>
			<i>p) Kemudahan akses penduduk terhadap informasi publik</i>

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN SIDA

Strategi yang digunakan untuk penguatan sistem inovasi daerah (SIDa) dikembangkan dari pilar-pilar strategis penguatan sistem inovasi sesuai dengan konteks sasaran. Sedangkan arah kebijakan yang bertujuan untuk merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya, menggunakan enam elemen Kerangka Kebijakan Inovasi sesuai dengan konteks sasaran yang akan dicapai. Strategi dan arah kebijakan penguatan SIDA tersebut diperlukan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan melalui penguatan sistem inovasi Kota Palembang. Secara umum, strategi dan arah kebijakan penguatan sistem inovasi Kota Palembang dapat disampaikan sebagai berikut :

5.1. Strategi Penguatan Sistem Inovasi di Kota Palembang

Strategi Penguatan Sistem Inovasi yang dimaksud adalah prakarsa strategis yang perlu dilakukan dalam rangka upaya penguatan sistem inovasi di Kota Palembang. Strategi ini ditempuh melalui Prioritas Pembangunan SIDA Kota Palembang :

Prioritas Pembangunan 1. Pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata dan berwawasan lingkungan

Strategi ini bertujuan sebagai Penyediaan infratrusrktur penopang pembangunan daerah dengan sasaran meratanya kebutuhan infrastruktur sebagai penopang pembangunan daerah. Tujuan kedua yaitu pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup dengan sasaran terlaksananya tata Kelola lingkungan perkotaan secara lestari dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui strategi atau pendekatan :

- a. Mengembangkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi intermoda dan antarmoda yang terpadu untuk angkutan massal yang berbasis Teknologi dan informasi
- b. Mengembangkan keterpaduan jaringan jalan dan jembatan yang mendukung mobilitas barang dan jasa melalui penambahan kapasitas dan peningkatan jalan dan jembatan
- c. Mengembangkan sarana dan prasarana penganggulangan bencana berbasis Teknologi dan Informasi
- d. Penataan seluruh pedestrian
- e. Mengembangkan Kawasan baru dan pembangunan ruang public serta ruang terbuka hijau di setiap kecamatan dan kelurahan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
- f. Pelestarian ikan belida dan ikan gabus
- g. Mempertahankan lahan pertanian yang ada di Kota Palembang
- h. Mengembangkan system dan manajemen pengelolaan sampah, sanitasi Kawasan dan perkotaan dan pengelolaan persampahan jangka Panjang dilaksanakan juga melalui pengelolaan sampah dengan teknologi tinggi dan mendukung TPA tingkat regional yang dapat menkomodir Kab/kota
- i. Mengembangkan perbaikan system drainase dan manajemen banjir dengan memperbanyak membuat kolam retensi dan normalisasi sungai

Prioritas Pembangunan 2. Pemerataan Kualitas Pendidikan

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja kreativitas-keinovasian, difusi dan pembelajaran di daerah secara bersistem (sistemik dan sistematis) dalam konteks Pemerataan Kualitas Pendidikan sebagai bagian integral pembangunan daerah.

Hal ini dilakukan melalui pendekatan :

- a. Mengembangkan kualitas pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah unggulan di setiap kecamatan dan kelurahan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan

Prioritas Pembangunan 3. Peningkatan Akses dan Layanan Kesehatan

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja kreativitas-keinovasian, difusi dan pembelajaran di daerah secara bersistem (sistemik dan sistematis) dalam konteks peningkatan akses dan layanan Kesehatan sebagai bagian integral pembangunan daerah Kota Palembang.

Hal ini dilakukan melalui pendekatan :

- a. Mengembangkan kualitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan bagi masyarakat dengan membangun dan menjadikan seluruh puskesmas rawat inap yang terakreditasi paripurna dan membangun puskesmas pembantu diseluruh kecamatan di Kota Palembang dan pemenuhan SPM Bidang Kesehatan
- b. Pengembangan pembangunan wilayah berbasis Kota Layak Anak, Kota Ramah Lansia, Kota Sehat, dan Kota Kreatif

Prioritas Pembangunan 4. Pembangunan budaya integritas di masyarakat yang didukung oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja kreativitas-keinovasian, difusi dan pembelajaran di daerah secara bersistem (sistemik dan sistematis) dalam konteks pembangunan budaya integritas di masyarakat dalam kerangka sistem inovasi daerah sebagai bagian integral pembangunan daerah.

Hal ini dilakukan melalui pendekatan :

- a. Mewujudkan kesetaraan gender dan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang kurang mampu
- b. Pendekatan pembangunan berbasis responsif gender
- c. Mengembangkan nilai-nilai etika masyarakat dan aparatur guna membangun daya kerja yang mendukung produktifitas kerja tinggi dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat
- d. Menyusun rencana aksi pembangunan masyarakat madani Palembang melalui roadmap strategi gerakan shalat subuh berjamaah dan roadmap strategi gerakan gotong royong
- e. Mengembangkan sistem dan regulasi pembangunan budaya integritas pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat
- f. Mengembangkan sistem dan regulasi pembangunan berbasis budaya integritas kepada pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat
- g. Mengembangkan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui sistem reward dan punishment, sistem kepastian (merit system) serta peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan
- h. Mengembangkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi
- i. Melakukan pembenahan manajemen pemungutan, dengan menggunakan sistem informasi yang kredibel dan akuntabel, sehingga ketersediaan data obyek pajak dan retribusi terintegrasi secara menyeluruh.
- j. Mengembangkan keterlibatan dan keberdayaan masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pembangunan
- k. Mendorong partisipasi aktif seluruh badan usaha swasta di dalam Forum CSR Kota Palembang melalui kebijakan insentif bagi pelaku usaha yang disusun melalui grand design

(Membangun Palembang EMAS DARUSSALAM Bersama MITRA)

- l. Pengembangan aplikasi berbasis web dan mobile di kelurahan (e- Kelurahan).
- m. Mengembangkan platform TIK untuk pelayanan publik yang terintegrasi (1 integrated ICT public services platform)
- n. Pelayanan administrasi terpadu di kelurahan
- o. Mengembangkan kebijakan pelayanan administrasi terpadu di Kelurahan
- p. Buat rencana smart city mulai dari kelurahan

Prioritas Pembangunan 5. Peningkatan investasi, pembangunan ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan implementasi teknologi bagi kepentingan publik serta memperbaiki elemen-elemen penguatan sistem yang berbentuk peningkatan investasi, pembangunan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan sebagai bagian integral pembangunan daerah. Hal ini dilakukan melalui pendekatan :

- a. Menjamin iklim investasi yang kondusif dari aspek hukum dan keamanan, investasi unggulan yang kompetitif dan komparatif serta mengembangkan kerjasama investasi regional, nasional dan internasional
- b. Mengembangkan satuan tugas promosi daerah untuk investasi dan pariwisata
- c. Meningkatkan akses pekerja kepada sumber daya produktif melalui peningkatan keterampilan pekerja dengan cara melakukan pelatihan.
- d. Membangun kebijakan pelatihan tenaga kerja
- e. Mengembangkan dan memperluas bantuan modal kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha keluarga (home industry)
- f. Menyediakan alokasi anggaran untuk mendukung program bantuan dan pendampingan modal usaha bagi usaha rintisan dan pelaku UMKM
- g. Mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi melalui lembaga keuangan di tingkat kelurahan, rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT) dengan memberikan fasilitas pinjaman tanpa agunan dan tanpa bunga
- h. Mengembangkan kualitas dan kuantitas pelatihan dan pendampingan untuk pengembangan usaha ekonomi kerakyatan
- i. Meluncurkan program pelatihan dan pendampingan untuk usaha ekonomi rakyat.
- j. Mengembangkan hilirisasi yang mendukung potensi sektor unggulan Kota Palembang dan Sumatera Selatan
Pembangunan sentra UKM
- k. Pembangunan sentra UMKM dan Koperasi
- l. Mengembangkan pemberdayaan pengelolaan dan penataan pasar tradisional menjadi pasar tradisional modern
- m. Menyusun sistem penataan pasar tradisional menjadi pasar tradisional moder.
- n. Mendorong 4000 UMKM dengan kredit tanpa agunan 3 juta rupiah per UKM
- o. Meluncurkan program Palembang 4000 UMKM dengan kredit tanpa agunan 3 juta rupiah per UKM
- p. Mengembangkan ekosistem startup digital

Prioritas Pembangunan 6. Pembangunan Kota Pariwisata, Budaya dan Olahraga yang Harmonis

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan implementasi teknologi bagi kepentingan publik serta memperbaiki elemen-elemen penguatan di bidang pariwisata, budaya dan olahraga sebagai pembangunan daerah Kota Palembang. Hal ini dilakukan melalui pendekatan :

- a. Mengembangkan kesadaran masyarakat dalam gerakan gotong royong dan shalat subuh berjama'ah dengan memberdayakan pemuka agama dan tokoh masyarakat setempat
- Mengembangkan kualitas dan kuantitas peribadatan, pendidikan keagamaan, sarana dan prasarana budaya serta mengantisipasi bahaya penyalahgunaan narkoba
- b. Menjadikan masjid, surau dan tempat peribadatan sebagai alternatif pusat kegiatan masyarakat dengan memberikan dukungan sarana dan prasarana sosial
- c. Mengembangkan kawasan tepian Sungai Musi (Musi Riverside Tourism Development) sebagai kawasan strategis pariwisata nasional berbasis Teknologi dan Informasi
- d. Menjalankan program gabungan terintegrasi untuk membangun kawasan tepian Sungai Musi (Musi Riverside Tourism Development)
- e. Mewajibkan kepada masing-masing instansi pemerintah daerah untuk memiliki 1 program pembangunan di kawasan Sungai Musi (Musi 101+ / Musi 1 OPD 1 Program)
- f. Mengembangkan SDM pariwisata yang profesional, ramah dan mampu berbahasa asing
- g. Pendidikan dan pelatihan SDM Pariwisata
- h. Mengembangkan sistem transportasi sungai yang modern dan terpadu Kawasan Riverside City dan Pengembangan Transportasi Sungai Kota Palembang
- i. Mengembangkan sarana dan prasarana kesungai dan keolahragaan yang berkualitas
- j. Menjalankan program kerjasama lintas sector dalam pembangunan sarana dan prasarana kesungai dan olahraga.
- k. Mengembangkan pelaksanaan event-event internasional yang terkait dengan sungai dan olahraga
- l. Menjalin kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk event2 internasional terkait sungai dan olahraga.
- m. Membangun dan mengembangkan pusat pelatihan kesungai dan olahraga bertaraf internasional
- n. Penyiapan khusus pusat pelatihan kesungai dan olahraga bertaraf internasional
- o. Mempromosikan kuliner khas Palembang sebagai kuliner kelas dunia
- p. Mengembangkan sarana publikasi berbasis IT untuk mempromosikan kuliner khas Palembang
- q. Pelestarian warisan budaya dan Kota Pusaka

5.2. Arah Kebijakan Penguatan Sistem Inovasi di Kota Palembang

Dalam upaya Penguatan Sistem Inovasi di Kota Palembang, arah kebijakan sebagai kerangka kerja kolaboratif yang merupakan pijakan bersama para pihak dalam pengembangan sinergitas dan koherensi kebijakan dan tindakan implementasi operasionalnya dirumuskan dalam Kerangka Kebijakan Inovasi (KKI) sebagai berikut :

1. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis.

Tujuan utama kebijakan ini adalah mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi perkembangan inovasi.

Adapun cakupan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis antara lain meliputi :

- a. Dokumen perencanaan daerah yang memuat sistem inovasi
 - b. Basis Data Inovasi dan Bisnis : Meliputi seluruh data untuk meningkatkan kapasitas inovasi dan bisnis.
 - c. Peraturan yang mendukung inovasi dan bisnis : Mencakup seluruh regulasi untuk mendukung inovasi dan bisnis secara berkelanjutan.
 - d. Infrastruktur Dasar Inovasi dan Bisnis : Melingkupi seluruh infrastruktur yang mendukung inovasi dan bisnis.
 - e. Insentif Inovasi dan Bisnis : Cakupan pemberian insentif untuk inovasi dan bisnis bisa merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
2. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung Iptek/Litbangyasa dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UMKM.

Tujuan utama kebijakan ini adalah mengembangkan atau memperkuat unsur-unsur lembaga/organisasi yang penting agar berfungsi tepat bagi pemajuan sistem inovasi di Kota Palembang, meningkatkan daya ungkit peran iptek/litbang yang sesuai dan spesifik bagi Kota Palembang, serta meningkatkan kemampuan industri, khususnya UMKM, dalam mengakses dan memanfaatkan pengetahuan dan hasil litbangyasa/ inovasi serta mengembangkannya.

Cakupan kelembagaan dan daya dukung iptek/ litbangyasa serta kemampuan absorpsi industri, khususnya UMKM antara lain meliputi :

- a. Kelembagaan Sistem Inovasi Daerah : Meliputi tim koordinasi, DRD, Balitbangda serta seluruh lembaga penelitian, pengembangan dan rekayasa (litbangyasa) yang terdapat di Kota Palembang.
 - b. Daya Dukung Iptek : Mencakup seluruh sumber daya iptek.
 - c. Daya Absorpsi Industri, khususnya UMKM : Melingkupi seluruh kapasitas daya absorpsi industri, khususnya UMKM.
3. Menumbuh kembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/ terbaik dan/ atau hasil litbangyasa serta meningkatkan pelayanan berbasis teknologi.

Tujuan utama kebijakan ini adalah mendorong interaksi produktif multipihak yang saling menguntungkan bagi perkembangan inovasi dan difusinya, penyebarluasan praktik baik dan hasil-hasil litbangyasa yang sesuai dengan potensi terbaik Kota Palembang.

Ini mencakup antara lain :

- a. Kemitraan strategis dan kolaboratif untuk inovasi (Jaringan Sistem Inovasi Daerah) : Menumbuhkan lembaga dan program yang strategis dan inovatif.
 - b. Peningkatan difusi inovasi : Meningkatkan difusi hasil-hasil inovasi (praktik baik, pengetahuan, kepakaran) dan alih inovasi.
 - c. Pelayanan berbasis teknologi : Memberikan pelayanan teknologi untuk peningkatan kapasitas adopter.
4. Mendorong budaya inovasi.

Tujuan utama kebijakan ini adalah membangun landasan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan, menumbuhkembangkan perusahaan-perusahaan baru (pemula) yang inovatif, serta memperkuat kohesi sosial di Kota Palembang. Ini antara lain terkait dengan :

- a. Penguatan Budaya Inovasi Melalui Jalur Pendidikan dan

Pelatihan Inovasi: Sejauhmana kondisi budaya inovasi yang telah diraih melalui jalur pendidikan dan pelatihan (kewirausahaan, keinovasian, peningkatan kapasitas sumber daya aparat).

- b. Penguatan Kohesi Sosial : Sejauhmana inventarisasi, dokumentasi dan sosialisasi teknologi-inovasi masyarakat (kearifan lokal) serta komponen modal sosial lainnya yang dimiliki Kota Palembang sebagai sumber inovasi dan program *reverse brain drain*.
 - c. Apresiasi dan Kampanye Inovasi : Sejauhmana Kota Palembang telah memberikan apresiasi terhadap karya yang inovatif dan terus mengkampanyekan budaya inovasi di wilayahnya.
 - d. Penumbuhan Usaha Baru Inovatif : Sejauhmana Kota Palembang telah mendorong tumbuhnya usaha baru yang inovatif melalui pemberian insentif.
5. Menumbuh kembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan kluster industri nasional dan daerah.

Tujuan utama kebijakan ini adalah mendorong investasi dan aktivitas dalam sistem inovasi sejalan, saling melengkapi dan memperkuat dengan penguatan rantai nilai dalam jaringan ataupun kluster industri di daerah.

Adapun cakupan pemajuan sistem inovasi dan kluster industri daerah dan nasional antara lain meliputi :

- a. Prakarsa Kluster Industri Spesifik Daerah dan/atau Prakarsa Sistem Inovasi : Memperlihatkan perkembangan aktor bisnis dan nonbisnis dalam suatu jaringan atau kluster industri.
 - b. Koordinasi Kebijakan Daerah dan Daerah-Nasional : Menunjukkan ada atau tidaknya mekanisme koordinasi yang lebih terbuka dan dapat memacu sistem inovasi dan kluster industri.
 - c. Pengembangan/ Penguatan Kelembagaan Khusus : Menggambarkan sejauhmana terbangunnya lembaga khusus untuk mempercepat proses terjadinya kolaborasi inovatif.
6. Penyelarasan dengan perkembangan global.

Tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kesiapan penentu kebijakan maupun pemangku kepentingan di Kota Palembang agar semakin dapat memahami dan menguasai perkembangan global untuk dimanfaatkan bagi kepentingan dan kemajuan Kota Palembang.

Hal ini antara lain mencakup :

- a. Lingkungan : Sejauhmana prakarsa dan respon terhadap isu lingkungan yang telah diprogramkan.
- b. Standarisasi : Hal ini terutama menyangkut sudah ada atau belumnya penerapan *Measurement Standard Test Quality (MSTQ)*.
- c. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Sejauhmana program Kota Palembang dalam meningkatkan kapasitas masyarakat tentang HKI.
- d. Hak Asasi Manusia (HAM) : Sejauhmana perhatian Kota Palembang terhadap isu HAM.
- e. Perburuhan : Sejauhmana perhatian Kota Palembang pada aspek perburuhan.

Dengan memperhatikan Strategi dan Arah Kebijakan Penguatan Sistem Inovasi di Kota Palembang seperti diuraikan di atas, maka secara matriks, Kerangka Strategis dalam upaya Penguatan Sistem Inovasi dapat

disampaikan pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Palembang

Visi : "PALEMBANG EMAS DARUSSALAM 2023 (ELOK, MADANI, AMAN, SEJAHTERA)"			
Misi yang berkaitan dengan penguatan SIDA : Misi 1 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis teknologi dan informasi			
Tujuan	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Penyediaan Infrastruktur Penopang Pembangunan Daerah, dengan sasaran Meratanya Kebutuhan Infrastruktur sebagai Penopang Pembangunan Daerah	Pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata yang berwawasan lingkungan	Tertatanya kawasan <u>kumuh</u> Bertambahnya sarana <u>air bersih</u> Bertambahnya sistem air limbah permukiman Terlaksananya normalisasi sungai, drainase dan pembuatan kolam retensi Adanya sarana dan prasarana persampahan Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penanganan dan sampah <u>perkotaan</u>	<ul style="list-style-type: none"> Menjadikan Automatic Traffic Control System (ATCS) Kota Palembang sebagai pusat komando dan koordinasi lalu lintas yang terintegrasi dengan layanan di Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya Mendorong penambahan kapasitas jalan dan jembatan Mendorong seluruh elemen masyarakat untuk memasyarakatkan pelatihan tanggap bencana Mengembangkan kawasan "green and clean zone" di seluruh
2. Pengelolaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup dengan sasaran Terlaksananya Tata Kelola Lingkungan Perkotaan secara lestari dan berkelanjutan			
3. Penyediaan Permukiman dan Kawasan Permukiman yang Layak dan Berwawasan		Tersedianya sistem transportasi	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong penambahan kapasitas jalan dan jembatan Mendorong seluruh elemen masyarakat untuk memasyarakatkan pelatihan tanggap bencana Mengembangkan kawasan "green and clean zone" di seluruh

n
Lingkungan
Hidup
dengan
sasaran
sasaran
Tersedianya
permukiman
dan
kawasan
permukiman
yang
layak dan
berwawasan
lingkungan
hidup

- pedestrian
dan taman
kota
- Mengembangkan kawasan “green and clean zone” di seluruh pedestrian dan taman kota seluruh wilayah Palembang
 - Mengembangkan ekosistem pelestarian ikan gabus dan belida di kawasan Sungai Musi dan perairan yang sesuai dengan habitatnya
 - Memperketat regulasi alih fungsi lahan pertanian
 - pengelolaan sampah dengan teknologi tinggi dan mendukung TPA tingkat regional yg dpt mengkomodir kab/kota sekitar
 - Pengolahan IPAL (air limbah) dan Pengembangan jaringan air limbah kota yang terintegrasi
 - Memperbanyak pembangunan kolam retensi dan normalisasi sungai

Pemerataan kualitas pendidikan	<p>Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan</p> <hr/> <p>Meningkatnya kualitas dan sebaran tenaga pendidik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memfokuskan pemenuhan SPM bidangbidang pelayanan dasar pendidikan dalam 2 tahun pertama periode RPJMD • Mendorong pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi (TIK) untuk mendukung percepatan dan perluasan jangkauan layanan pendidikan
Peningkatan akses dan layanan kesehatan	<p>Terbangunnya puskesmas, pustu dan penambahan fasilitas rawat inap Puskesmas di Kecamatan</p> <hr/> <p>Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat.</p> <hr/> <p>Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memfokuskan pemenuhan SPM bidangbidang pelayanan dasar kesehatan dalam 2 tahun pertama periode RPJMD • Mendorong pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi (TIK) untuk mendukung percepatan dan perluasan jangkauan layanan Kesehatan • Memfokuskan pada pemenuhan

indikator-indikator
SDGs dalam
pembangunan
kota

Misi yang berkaitan dengan penguatan SIDA :

Misi 2: Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional

Tujuan	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
<p>1. Peningkatan Daya Saing dan Kualitas Sumber Daya Manusia</p> <p>2. Mewujudkan pranata sosial yang kokoh dan solid di tengah masyarakat dengan sasaran Berkembangnya Nilai-Nilai Pri Kehidupan Umat Beragama Dan Budaya Yang Mengayomi Semua Elemen Masyarakat</p> <p>3. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel dengan sasaran Terlaksananya Good</p>	<p>Pembangunan budaya integritas di masyarakat yang didukung oleh pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional</p>	<p>Terpenuhinya SDM yang <u>Professional</u></p> <p>Terpenuhinya penempatan SDM yang kompetensi di <u>bidangnya</u></p> <p>Pelayanan berbasis IT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan pembangunan berbasis responsif gender • Menyusun rencana aksi pembangunan masyarakat madani Palembang melalui roadmap strategi gerakan shalat subuh berjamaah dan roadmap strategi gerakan gotong royong • Mengembangkan sistem dan regulasi pembangunan berbasis budaya integritas kepada pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat • Menjalankan program zona integritas dengan pemanfaatan TIK bagi ASN • Melakukan pembenahan

Governance
Practices
dan
Reformasi
Birokrasi

manajemen pemungutan, dengan menggunakan sistem informasi yang kredibel dan akuntabel, sehingga ketersediaan data obyek pajak dan retribusi terintegrasi secara menyeluruh.

- Mendorong partisipasi aktif seluruh badan usaha swasta di dalam Forum CSR Kota Palembang melalui kebijakan insentif bagi pelaku usaha yang disusun melalui grand design (Membangun Palembang EMAS DARUSSALAM Bersama MITRA)
- Mengembangkan platform TIK untuk pelayanan publik yang terintegrasi (1 integrated ICT public services platform)
- Mengembangkan kebijakan pelayanan administrasi terpadu di Kelurahan
- pembangunan daerah melalui

Misi yang berkaitan dengan penguatan SIDA :

Misi 3: Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan regional, nasional dan internasional yang kompetitif dan komparatif dengan menjamin rasa aman untuk berinvestasi

Misi 4: Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya saing tinggi

Tujuan	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Membangun daya saing kota yang unggul sebagai pusat simpul pembangunan dan investasi tingkat kawasan ASEAN	Peningkatan investasi, pembangunan ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan	Terlaksananya perizinan <u>terpadu</u> Bertambahnya pelatihan kepada <u>masyarakat</u> Meningkatnya pemberdayaan <u>masyarakat</u> Terbantunya masyarakat <u>miskin</u> Terciptanya lapangan <u>pekerjaan</u> Meningkatnya Diversifikasi produk industri	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan satuan tugas promosi daerah untuk investasi dan pariwisata • Membangun kebijakan pelatihan tenaga kerja • Menyediakan alokasi anggaran untuk mendukung program bantuan dan pendampingan modal usaha bagi usaha rintisan dan pelaku UMKM • Pembangunan lembaga keuangan tingkat Kelurahan, RW dan RT. • Meluncurkan program pelatihan dan pendampingan untuk usaha ekonomi rakyat. • Pembangunan sentra
2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berpusat pada masyarakat (community centered) berbasis inovasi dan daya kreasi dan berdaya saing tinggi dengan sasaran Berkembangnya ekonomi daerah berbasis inovasi dan daya kreasi yang			

digerakkan oleh masyarakat (community centered)

UMKM dan Koperasi

- Menyusun sistem penataan pasar tradisional menjadi pasar tradisional moder.
- Meluncurkan program Palembang 4000 UMKM dengan kredit tanpa agunan 3 juta rupiah per UKM
- Meluncurkan program Palembang Digital untuk pelaku usaha startup digital

Misi yang berkaitan dengan penguatan SIDA :

Misi 5: Menjadikan Palembang Kota Pariwisata sungai dan budaya serta event olahraga klas dunia yang harmoni antara kehidupan manusia dan alam

Tujuan	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Mewujudkan Palembang sebagai riverfront city dan pusat pengembangan olahraga terbaik di kawasan ASEAN dengan sasaran Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, kepemudaan dan olahraga.	Pembangunan Kota Pariwisata, budaya dan olahraga yang harmonis	Tertatanya kawasan wisata, budaya dan <u>olahraga</u> Tersedianya infrastruktur pendukung wisata, budaya dan <u>olahraga</u> Bertambahnya event wisata, budaya dan <u>olahraga</u> Bertambahnya jenis dan kualitas souvenir	<ul style="list-style-type: none"> • Aktifasi program safari shubuh yang wajib diikuti oleh pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Pemerintah Kota Palembang • Menjadikan masjid, surau dan tempat peribadatan sebagai alternatif pusat kegiatan

dan kuliner

- masyarakat dengan memberikan dukungan sarana dan prasarana sosial
- Menjalankan program gabungan terintegrasi untuk membangun kawasan tepian Sungai Musi (Musi Riverside Tourism Development)
 - Mewajibkan kepada masing-masing instansi pemerintah daerah untuk memiliki 1 program pembangunan d kawasan Sungai Musi (Musi 101+ / Musi 1 OPD 1 Program)
 - Pendidikan dan pelatihan SDM Pariwisata
 - Menyusun Blueprint Pengembangan Kawasan Riverside City dan Pengembangan Transportasi Sungai Kota Palembang
 - Menjalankan program kerjasama lintas sector dalam pembangnan sarana dan

prasarana kesungai dan olahraga.

- Menjalankan program kerjasama lintas sector dalam pembangunan sarana dan prasarana kesungai dan olahraga.
 - Penyiapan khusus pusat pelatihan kesungai dan olahraga bertaraf internasional
 - Mengembangkan sarana publikasi berbasis IT untuk mempromosikan kuliner khas Palembang
 - Mengembangkan kurikulum tambahan di sekolah-sekolah tingkat menengah tentang wawasan pariwisata daerah
-

BAB VI INDIKATOR DAN PROGRAM

6.1. FOKUS PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KOTA PALEMBANG

Program Pembangunan Kota Palembang yang mencakup keseluruhan program prioritas dengan tetap memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palembang 2005-2025. Selanjutnya, penetapan program pembangunan Kota Palembang Tahun 2021 yang disertai tolok ukur capaian perprogram per PD pelaksana. Sesuai dengan Tema Pembangunan Tahun 2021, Pemerintah Kota Palembang melalui 6 (enam) Prioritas Pembangunan pada tahun 2021 akan menitik beratkan pada pengoptimalan kapasitas daerah untuk pembangunan yang merata melalui penguatan infrastruktur dan sarana parasarana yang terpadu dan terintegrasi dan sejalan dengan prioritas nasional yang ada di RPJMN 2015-2019, serta memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, maka prioritas pembangunan Kota Palembang tahun 2021 sebagai berikut:

1. Fokus Pembangunan infrastuktur perkotaan yang terpadu dan merata yang berwawasan lingkungan, dengan program pembangunan adalah :
 - a. Penataan Kawasan Kumuh;
 - b. Peningkatan Sarana Air Bersih;
 - c. Penyediaan Sistem Air Limbah Permukiman;
 - d. Normalisasi Sungai, Drainase, dan Pembuatan Kolam Retensi;
 - e. Penyiapan Sarana dan Prasarana Persampahan;
 - f. Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Genangan dan Sampah; dan
 - g. Penyediaan Sistem Transportasi Perkotaan.
2. Fokus Pemerataan kualitas pendidikan, dengan program pembangunan adalah:
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
 - b. Peningkatan Kualitas dan Sebaran Tenaga Pendidik
3. Fokus Peningkatan akses layanan kesehatan, dengan program pembangunan adalah :
 - a. Pembangunan Puskesmas, Pustu dan Penambahan Fasilitas Rawat Inap Puskesmas di kecamatan;
 - b. Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
 - c. Peningkatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
4. Fokus Pembangunan budaya integritas di masyarakat yang didukung oleh pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional, dengan program pembangunan adalah :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Tugas dan Fungsi bagi ASN;
 - b. Penempatan SDM yang Berkompeten di Bidanganya;
 - c. Pelaksanaan Palembang Smart City.
5. Fokus Peningkatan investasi, pembangunan ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan, dengan program pembangunan adalah :
 - a. Pelaksanaan Perizinan Terpadu;
 - b. Peningkatan Pelatihan Kepada Masyarakat;
 - c. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat;

- d. Pemberian Bantuan kepada Masyarakat Miskin;
 - e. Menciptakan Lapangan Pekerjaan; dan
 - f. Diversifikasi Produk Industri
6. Fokus Pembangunan kota pariwisata, budaya dan olahraga yang harmonis, dengan program pembangunan adalah:
- a. Penataan Kawasan Wisata, Budaya dan Olahraga;
 - b. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Wisata, Budaya dan Olahraga;
 - c. Peningkatan Event Wisata, Budaya dan Olahraga;
 - d. Peningkatan Jenis dan Kualitas Sovenir dan Kuliner

6.2 KONDISI EKSTING INOVASI DAERAH KOTA PALEMBANG

1. SiABUH (Aplikasi Absen Subuh)

Dalam rangka mengimplementasikan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, Pemerintah Kota Palembang Membuat inovasi Sistem Aplikasi Absensi Subuh (SiAbuh). SiAbuh merupakan aplikasi Absensi Subuh yang berjalan untuk sistem Absensi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palembang dan masyarakat di Kota Palembang dalam melaksanakan shalat subuh berjamaah. SiAbuh juga merupakan bagian sosialisasi dan motivasi kepada masyarakat dalam meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat dalam mewujudkan visi misi Palembang EMAS Darussalam 2023. Launching SiAbuh bertepatan pada tanggal 18 September 2018 yang merupakan akselerasi dari Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2020. Operasional Aplikasi dimulai dari pukul 04.00- 06.00 WIB. SiAbuh sebagai absensi subuh berjamaah dilengkapi dengan beberapa fitur yang sangat mendukung di dunia digital sekarang.

Stakeholder Internal yaitu Walikota Palembang memberikan telaahan program kegiatan dalam rangka pencapaian visi, Sekretaris Daerah Kota Palembang mengkomunikasikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan, Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Palembang merencanakan dan melaksanakan program inovasi mendukung pencapaian visi, Kasubag Bina Mental dan Spiritual melaksanakan Instruksi pelaksanaan teknis kegiatan, Tim khusus SiAbuh bertugas melakukan Instruksi pelaksanaan kegiatan sesuai tupoksi masing-masing, Bagian Protokol Koordinasi Fasilitasi walikota dalam kegiatan, Bappeda Koordinasi dalam perencanaan dan monev, Camat Koordinasi untuk fasilitasi Walikota dalam kegiatan di wilayahnya. Stakeholder Eksternal yaitu Kementerian Agama bertugas Komunikasi, dan Penyedia SiAbuh.

Pengelola SiAbuh dilakukan melalui Tim internal bagian kesejahteraan Rakyat yang terdiri dari programer khusus SiAbuh dan tim yang bertanggung jawab pada pelayanan sosialiasi SiAbuh, sehingga akselerasi aplikasi SiAbuh dilakukan dengan sinergitas tim pengelola yang terus melakukan evaluasi kajian terhadap peningkatan aplikasi SiAbuh tersebut. Peningkatan aplikasi diwujudkan dengan penambahan fitur-fitur yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Palembang.

Pengguna SiAbuh hingga Juli 2020 mencapai 17.372 Se-kota Palembang dari pegawai pemerintah kota dan masyarakat Kota Palembang. Hal ini membuktikan bahwa

kecepatan kualitas dan kuantitas dari aplikasi SiAbuh termasuk dalam kategori terus mengalami progres yang baik. dan berlangsung secara terus menerus, hasil ini didukung dengan upaya peningkatan sistem dari SiAbuh tersebut. Aplikasi SiAbuh digagas untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang beriman dengan mengedepankan ketaqwaan sebagai referensi dalam bersikap. SiAbuh bertujuan sebagai mediator controlling dalam pelaksanaan subuh berjamaah bagi pegawai dan masyarakat yang melaksanakan shalat berjamaah ataupun tidak melaksanakan subuh berjamaah. Sehingga pada akhirnya Pemerintah Kota bersama masyarakat Kota Palembang dapat merealisasikan Palembang EMAS Darussalam 2023.

SiAbuh memiliki ragam kebermanfaatan baik bagi pegawai maupun masyarakat umum yang ada di Kota Palembang. Selain sebagai pengingat untuk selalu melaksanakan sholat subuh, aplikasi ini juga memotivasi setiap pengguna untuk istiqomah meramaikan masjid dalam bentuk konsistensi subuh berjamaah. Eksistensi SiAbuh secara khusus diwujudkan untuk mendukung masyarakat Kota Palembang dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, meningkatkan silaturahmi dengan memakmurkan masjid, serta mendukung program pemerintah kota untuk mewujudkan visi misi Palembang EMAS Darussalam 2023.

2. SELFI (Sekolah Filial Layanan Pendidikan Formal Narapidana Anak di LPKA Klas I Palembang)

SELFI (Sekolah Filial / Layanan Pendidikan Formal Narapidana Anak di LPKA Klas I Palembang) merupakan Upaya Pemerintah Kota Palembang dalam memberikan Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak yang Berhadapan Hukum (ABH) di LPKA Klas I Palembang. Anak-anak LPKA Klas I Palembang saat ini dapat menikmati pendidikan formal layaknya sekolah reguler, dengan tenaga pengajar langsung dari guru sekolah induk masing-masing.

Dalam rangka meningkatkan kualitas program dan menjamin mutu pendidikan di LPKA maka disediakan Sumber Daya Manusia yang berkompeten. Sebanyak 5% dari 1,5 juta lebih warga Kota Palembang berstatus pelajar, pada tahun 2014 sebanyak 191 anak usia sekolah berstatus narapidana penghuni LPKA Klas I Palembang. Melihat jumlah tersebut maka permasalahan ini perlu menjadi perhatian mengingat jumlah kasus tersebut termasuk tinggi karena berada di atas rata-rata nasional, yaitu 95 orang sedangkan di Palembang mencapai 191 orang (SDP Dirjenpas 2014).

Kondisi ini menimbulkan permasalahan baru bagi Anak-anak Berhadapan dengan Hukum yaitu tidak dapat mengakses pendidikan karena harus putus sekolah atau hilang kesempatan bersekolah. LPKA Klas I Palembang sudah mencoba melaksanakan program pendidikan paket yang tenaga pengajarnya berasal dari petugas LPKA sendiri, namun kondisi ini menyebabkan pencapaian tujuan pendidikan belum berhasil dengan baik karena keterbatasan kompetensi tenaga pengajarnya. Mensikapi permasalahan tersebut Dinas Pendidikan Kota Palembang bekerjasama dengan LPKA Klas I Palembang membuat program pendidikan formal dalam bentuk Sekolah Kelas Jauh (Filial)

yang menginduk ke sekolah terdekat, yaitu tingkat SD menginduk ke SDN 25 Palembang, tingkat SMP ke SMPN 22 Palembang, tingkat SMAN menginduk ke SMAN 11 Palembang.

Program ini bertujuan untuk memberikan hak pendidikan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam bentuk pendidikan formal. Melalui pendidikan formal tersebut Anak penghuni LPKA Klas I Palembang tetap dapat menyelesaikan pendidikan sebagai bekal untuk mencapai cita-cita. Anak-anak LPKA Klas I Palembang saat ini dapat menikmati pendidikan formal layaknya sekolah reguler, dengan tenaga pengajar langsung dari guru sekolah induk masing-masing. Selain memiliki kelas yang cukup layak, dilengkapi juga dengan fasilitas perpustakaan, ruang praktek komputer, dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti; pramuka, rohis, drumband, pencak silat dll. Saat ini sekolah filial di LPKA Klas I Palembang telah berhasil meluluskan peserta didik, dari lulusan tersebut ada yang telah melanjutkan pada jenjang pendidikan berikutnya, bahkan ada yang telah di terima bekerja dengan menggunakan ijazah yang diperoleh dari sekolah filial tersebut. Selain itu anak didiknya ada yang mampu berprestasi dalam berbagai kompetisi yang dilaksanakan berbagai pihak.

3. Layanan Palembang Siaga112

Banyak nya Call Center Pengaduan kegawat daruratan masyarakat yang ada di Kota Palembang seperti 113 (Kebakaran), 110 (Kepolisian) , 119 (Ambulance), 115 (Basarnas) dan nomor kontak umum lainnya dan persiapan pelaksanaan Asian Games 2018 di Kota Palembang, maka dibentuklah Call Center 112 / Layanan Palembang Siaga 112, untuk mempermudah masyarakat apabila membutuhkan layanan kegawatdaruratan secara terintegrasi. Melalui Layanan Palembang Siaga 112, layanan kegawatdaruratan secara keseluruhan cukup menghubungi Call Center 112 yang melayani kegawatdaruratan seperti kebakaran, kesehatan, tindak kriminal, bencana alam, kecelakaan dan kejadian kegawatdaruratan lainnya. Sehingga masyarakat cukup mengingat dan menghubungi satu nomor tunggal untuk kegawatdaruratan di Kota Palembang.

Call center 112, memastikan kebutuhan layanan kegawatdaruratan yang dibutuhkan masyarakat sampai di lokasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. layanan palembang siaga 112 dapat dihubungi 1x24 jam. Layanan Palembang siaga 112 ini dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang dengan bekerjasama dengan seluruh stakeholder terkait dengan layanan kegawatdaruratan di Kota Palembang.

Tujuan dari adanya program ini adalah :

- Menyatukan nomor kegawatdaruratan di Kota Palembang menjadi layanan palembang siaga 112
- mempermudah masyarakat yang membutuhkan layanan kegawatdaruratan
- Melakukan tindaklanjut kegawatdaruratan secara cepat dan tepat

Program ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat yang membutuhkan layanan kegawatdaruratan dengan

mengingat satu nomor kegawatdaruratan. Selain itu juga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menghubungi layanan palembang siaga 112 sehingga masyarakat tetap dapat mendapatkan solusi terhadap masalah kegawatdaruratan yang dihadapi mereka

4. Sistem Informasi Pengamanan Aset (BPKAD Kota Palembang)

Sistem pengamanan dan informasi aset milik daerah merupakan sistem informasi manajemen pengamanan dan pendataan aset yang terintegrasi langsung ke seluruh instansi dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan dan pendataan barang milik daerah. Selain itu, sistem pengamanan dan informasi aset milik daerah ini dirancang dengan platform web based atau berbasis online sehingga seluruh masyarakat bisa mengakses secara langsung terkait keberadaan aset baik meliputi aset bergerak maupun tidak bergerak. Dengan adanya system ini diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses dan mendapatkan informasi tentang keberadaan aset daerah

5. SISTEM INFORMASI NASKAH DINAS (SINDI)

Inovasi SINDI terkait dengan operasional serta administrasi surat-menyurat dalam suatu OPD. Dengan adanya SINDI, proses penandatanganan surat keluar dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan sertifikasi tanda tangan elektronik yang sah. Inovasi ini dapat mengatasi permasalahan pejabat penandatanganan yang tidak berada di tempat karena proses penandatanganan berkas dapat dilakukan secara mobile melalui aplikasi di ponsel. Selain itu pengarsipan berkas surat masuk, nota dinas, dan surat keluar dapat lebih tertata dengan lebih efektif dan efisien. Sisi inovatif SINDI adalah mempermudah pimpinan daerah dan OPD dalam mendisposisikan surat masuk atau pun menandatangani secara elektronik surat keluar dimanapun berada, serta mempermudah mendistribusikan surat ke seluruh OPD secara elektronik sehingga lebih efektif dan efisien.

Tujuan SINDI sendiri adalah untuk memudahkan operasional serta administrasi surat menyurat dalam suatu OPD, khususnya penandatanganan surat keluar yang dapat dilakukan secara elektronik karena kepala OPD telah diberikan sertifikasi tanda tangan elektronik oleh BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik). SINDI merupakan aplikasi untuk koordinasi di lingkungan intern pemerintah Kota Palembang di mana SINDI menjadi jembatan integrasi seluruh aplikasi yang ada di OPD. Untuk situasi sekarang di mana pemerintah menganjurkan masyarakat untuk melakukan social distancing dalam usaha untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19, SINDI sangat membantu karena meminimalisir pertemuan dan berkumpulnya masyarakat di satu tempat.

6. Pemetaan Sebaran Titik Reklame di Wilayah Kota Palembang

Pentingnya Optimalisasi Pajak Daerah bagi Pembangunan suatu Daerah, terutama dalam menyokong Pembangunan Daerah itu sendiri yang merupakan Pemasukan Anggaran Pembangunan Daerah Potensial seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Dalam Pembangunan Daerah, Pajak memegang

peranan penting dalam suatu Pembangunan.

Potensi Reklame yang ada di Kota Palembang saat ini yang belum terdaftar dan melakukan Pembayaran Pajak, maka diperlukan suatu system atau aplikasi yang dapat membantu untuk memetakan titik reklame dan menyediakan data reklame yang valid dan akurat.

Dengan adanya Pemetaan ini untuk memudahkan Pengawasan dan Pemantauan terhadap persebaran reklame yang ada di Kota Palembang, sehingga memudahkan dalam menginventarisasi reklame yang telah masa tayang reklame dan yang belum melaksanakan pelaporan. Pada akhirnya tersedianya data yang akurat diharapkan dapat memaksimalkan Penerimaan Pajak Reklame sekaligus merupakan upaya untuk memaksimalkan Potensi Pajak Reklame.

7. Sistem Informasi Lingkungan (SILINK) Kota Palembang

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah dikembangkan sejak tahun 2009, yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang dikembangkan BPS terdiri dari tiga indikator kualitas lingkungan, yaitu kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan. Sebagai pembanding atau target untuk setiap indikator adalah standar atau ketentuan yang berlaku berdasarkan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti ketentuan tentang baku mutu air dan baku mutu udara ambien.

Ketentuan yang mengatur penilaian pada ketiga indeks adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pedoman ini juga mengatur tatacara penghitungan indeks pencemaran air (IPA) atau indeks kualitas air (IKA) dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep- 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara. SILINK diharapkan dapat memberikan informasi tentang lingkungan hidup (kualitas air sungai, kualitas udara dan kualitas tutupan hutan) dan juga memberikan informasi terkait persampahan dan sanitasi permukiman.

8. PERAHU LANSIA (Pelayanan Ramah Terpadu Lansia)

Seiring bertambahnya usia, kondisi fisik pada pasien lanjut usia juga sudah menurun sehingga menyebabkan mereka akan mudah kelelahan. Selain itu penurunan kondisi fisik juga berpengaruh terhadap kondisi psikis pasien lanjut usia. Mereka akan merasa rendah diri dan mudah tersinggung. Terlebih lagi bila pelayanan puskesmas di poli lansia belum memberikan kenyamanan yang cukup maka para pasien lansia akan merasa enggan datang ke puskesmas untuk memeriksakan kesehatan dirinya. Hal ini tentunya akan sangat berdampak pada derajat kesehatan pasien lansia. Oleh karena itu, lahirlah program inovasi "PERAHU LANSIA" (Pelayanan Rumah Lansia) di Puskesmas Dempo Palembang. Program ini bertujuan agar seluruh pasien lansia di wilayah kerja Puskesmas Dempo mendapatkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh. Pasien lansia cukup menunggu kedatangan petugas kesehatan dari Puskesmas Dempo di

rumah mereka tanpa harus mengantri berdesak-desakan seperti saat di loket pendaftaran puskesmas.

Program ini bertujuan agar seluruh pasien lansia di wilayah kerja Puskesmas Dempo mendapatkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh. Pasien lansia cukup menunggu kedatangan petugas kesehatan dari Puskesmas Dempo di rumah mereka tanpa harus mengantri berdesak-desakan seperti saat di loket pendaftaran puskesmas. Kemudahan pelayanan bagi lansia diantaranya : Loket pendaftaran tersendiri, Ruang pemeriksaan/konseling yang terpisah dari kelompok umur lain, Mendahulukan pemberian yankes dengan memberikan suatu tanda untuk pasien prioritas dan Kemudahan pemberian layanan obat dengan petugas obat yang mendatangi pasien, bukan pasien yang mendatangi petugas

9. Kampung KB Layang-Layang

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan suatu sinergitas program lintas sektor disertai gerakan-gerakan pembangunan SDM berkualitas yang diwujudkan melalui kerja sama dan kepedulian antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat yang ada sehingga didapatkan komitmen untuk mencapai tujuan bersama.

Bentuk kegiatan prioritas yang memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan serta memperluas cakupan penggarapan Program BanggaKencana di seluruh tingkatan wilayah , maka dibentuklah Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB).

Kampung KB dilaksanakan di tingkatan pemerintahan terendah . Salah satunya di Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang, tepatnya di Kelurahan Dua Puluh Sembilan Ilir, dengan nama "Kampung KB Layang-Layang" Inovasi ini diharapkan dapat Menurunkan angka kemiskinan melalui gerakan-gerakan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

10. Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Online Kota Palembang (E-SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sistem ini diharapkan dapat menjamin kelancaran, efektifitas, dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja serta pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah secara daring dan elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Palembang

Manfaat yang dapat diterima dari system ini antara lain mempermudah OPD dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan

pelaporan kinerja serta pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah secara daring dan elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Palembang

6.3 PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KOTA PALEMBANG

Berdasarkan fokus penguatan sistem inovasi daerah pada setiap pilar di atas, serta merujuk pada nomenklatur program yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka di bawah ini dapat diuraikan program prioritas penguatan sistem inovasi daerah Kota Palembang tahun 2019-2023 sebagai berikut :

1. Program Prioritas Pembangunan pada Pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata yang berwawasan lingkungan terdiri dari:
 - a. Program Perencanaan Penataan Ruang
 - b. Prprogram Penerangan Jalan Dan Utilitas
 - c. Program Pengembangan Data/Informasi Inovasi Dan Bisnis
 - d. Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan
 - e. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
 - f. Program Pemanfaatan Ruang
 - g. Program Pegendalian Pemanfaatan Ruang
 - h. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan San Jembatan
 - i. Program, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
 - j. Program Rehabilitasi/Pemeliharaantalud/Bronjong
 - k. Program Pengelolaan Pengerangan Jalan Umum
 - l. Program Tanggap Darurat Jalan Dan Jembatan
 - m. Program Pembangunan System Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan
 - n. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya
 - o. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
 - p. Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan
 - q. Program Peningkatan Saran Dan Prasarana Pekerjaan Umum
 - r. Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku
 - s. Program Pengembangan, Pengelolaan, Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya
 - t. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Aor Minum Dan Air Limbah
 - u. Program Pengendalian Banjir
 - v. Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh
 - w. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan
 - x. Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan
 - y. Program Perencanaan Tata Ruang
 - z. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Jasa Konstruksi
 - aa. Program Pengembangan Perumahan
 - bb. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

- cc. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam.Sosial
 - dd. Program Pengelolaan Real Pemakaman
 - ee. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
 - ff. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
 - gg. Program Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan
 - hh. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
 - ii. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - jj. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - kk. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
 - ll. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
 - mm. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - nn. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
 - oo. Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan
 - pp. Program Pengendalian kebakaran hutan
 - qq. Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
 - rr. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
 - ss. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
 - tt. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
 - uu. Pogram peningkatan pelayanan angkutan
 - vv. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
 - ww. Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
 - xx. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
 - yy. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 - zz. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
 - aaa. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
 - bbb. Program kerjasama informasi dengan mass media
 - ccc. Program Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
 - ddd. Program Pengelolaan Sampah Secara Termal
 - eee. Program Lingkungan Sehat Perumahan
 - fff. Program Pengawasan Jasa Konstruksi
 - ggg. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
 - hhh. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
 - iii. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
 - jjj. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
 - kkk. Program Pengaturan Jasa Konstruksi
 - lll. Program Pengembangan Informasi Bidang Ke PU-an
 - mmm. Program pembangunan sarana kantor pemerintahan ibu kota
 - nnn. . Program pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana umum/sosial
2. Program Prioritas Pembangunan pada Meratanya Kualitas Pendidikan terdiri dari :
- a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - b. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS

- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - e. Program Pendidikan Anak Usia Dini
 - f. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 - g. Program Pendidikan Menengah
 - h. Program Pendidikan Non Formal
 - i. Program Pendidikan Luar Biasa
 - j. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - k. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
 - l. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - m. Program pendidikan politik masyarakat
 - n. Program pendidikan kedinasan
 - o. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
 - p. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 - q. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - r. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - s. Program Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara
3. Program Prioritas Pembangunan pada Meningkatnya Akses dan Layanan dan Kesehatan terdiri dari :
- a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - c. Program Pengawasan Obat dan Makanan
 - d. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
 - e. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
 - f. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - g. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
 - h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
 - i. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 - j. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
 - k. Program pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
 - l. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paruparu/ rumah sakit mata
 - m. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
 - n. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
 - o. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
 - p. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
 - q. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
 - r. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
 - s. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
 - t. Program Keluarga Berencana
 - u. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
 - v. Program pelayanan kontrasepsi
 - w. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
 - x. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat

- y. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
 - z. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
 - aa. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
 - bb. Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
 - cc. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
4. Program Prioritas Pembangunan pada Terbangunnya Budaya Integritas di Masyarakat yang didukung oleh Pemerintah yang Bersih, Berwibawa, dan Profesional terdiri dari :
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - c. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal
 - d. Program pengembangan wawasan kebangsaan
 - e. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
 - f. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
 - g. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
 - h. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
 - i. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
 - j. Dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum
 - k. Program Penataan Administrasi Kependudukan
 - l. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
 - m. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
 - n. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
 - o. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
 - p. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
 - q. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
 - r. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
 - s. Program Kerjasama Pembangunan
 - t. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
 - u. Program perencanaan pembangunan daerah
 - v. Program perencanaan pembangunan ekonomi
 - w. Program perencanaan pembangunan sosial budaya
 - x. Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam
 - y. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
 - z. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - aa. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - bb. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
 - cc. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - dd. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

- ee. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
 - ff. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
 - gg. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - hh. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - ii. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
 - jj. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
 - kk. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
 - ll. Program Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah
 - mm. Program Pengembangan data/informasi
 - nn. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
 - oo. Program Penelitian dan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
 - pp. Program penelitian dan pengembangan kota-kota menengah dan besar
 - qq. Program Peningkatan Kegiatan Keagamaan
 - rr. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
 - ss. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
 - tt. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
 - uu. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara
 - vv. Program Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja
5. Program Prioritas Pembangunan pada Meningkatnya Investasi, Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Penganggulungan Kemiskinan terdiri dari :
- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - c. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah
 - d. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
 - e. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - f. Program pembinaan anak terlantar
 - g. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
 - h. Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
 - i. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
 - j. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - k. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - l. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - m. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
 - n. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
 - o. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 - p. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Perempuan
 - q. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

- dalam pembangunan
- r. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
 - s. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
 - t. Program pengembangan lembaga ekonomi kelurahan
 - u. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan
 - v. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kelurahan
 - w. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif
 - x. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - y. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - z. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
 - aa. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Perijinan dan Non Perijinan
 - bb. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
 - cc. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
 - dd. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
 - ee. Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut
 - ff. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat
 - gg. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
 - hh. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
 - ii. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
 - jj. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
 - kk. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
 - ll. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - mm. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
 - nn. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
 - oo. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
 - pp. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
 - qq. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
 - rr. Program peningkatan produksi hasil peternakan
 - ss. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
 - tt. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
 - uu. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
 - vv. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
 - ww. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - xx. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
 - yy. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
 - zz. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - aaa. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
 - bbb. Program Penataan Struktur Industri
 - ccc. Program Pengembangan SentraSentra Industri Potensial
 - ddd. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
 - eee. Program Transmigrasi Lokal

- fff. Program Transmigrasi Regional
 - ggg. Program peningkatan peran perempuan di Kelurahan
 - hhh. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - iii. Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan (Ditjen Perkebunan)
 - jjj. Program Pencapaian swasembada daging dan peningkatan penyediaan pangan hewan yang aman, sehat, utuh dan halal
 - kkk. Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian
 - lll. Peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit
 - mmm. Program Pengolahan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
 - nnn. Program Peningkatan Nilai Tambah, daya Saing Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
 - ooo. Program pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan
 - ppp. Program Peningkatan Produksi Peternakan
 - qqq. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
 - rrr. Program Pengembangan Lahan dan Air
 - sss. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian
 - ttt. Program pemenuhan pangan asal ternak dan agrobisnis peternakan rakyat
 - uuu. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan
 - vvv. Program Peningkatan Produksi Tanaman Holtikultura
 - www. Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan
 - xxx. Program Peningkatan Kemampuan Lembaga Pelaku Utama
 - yyy. Peningkatan ketahanan pangan perkebunan
 - zzz. Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
 - aaaa. Program Pengembangan Distribusi dan Harga Pangan
6. Program Prioritas Pembangunan pada Terwujudnya Kota Pariwisata, Budaya dan Olahraga yang Harmonis terdiri dari :
- a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
 - b. Program peningkatan peran serta kepemudaan
 - c. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
 - d. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
 - e. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
 - f. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
 - g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
 - h. Program Pengembangan Nilai Budaya
 - i. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - j. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
 - k. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
 - l. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 - m. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - n. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - o. Program Pengembangan Kemitraan
 - p. Program Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Di Luar Negeri

- q. Program Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif
- r. Program Pengembangan Ekosistem Kreatif
- s. Program Pengembangan Infrastruktur Terpadu Ekonomi Kreatif

Tabel 6.1 Sasaran Dan Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Palembang

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN PRIORITYAS	HASIL PROGRAM (OUTCOME)	KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG TERPADU DAN MERATA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	TERBANGUNNYA INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG TERPADU DAN MERATA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	TERSEDINYA PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN 10 DOKUMENT/UNIT JEMBATAN	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN JALAN 10 DOKUMEN JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN JEMBATAN 2 DOKUMEN JUMLAH DOKUMEN PEMBANGUNA JEMBATAN 20 DOKUMEN	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Panjang sungai dan drainase yang di normalisasi	Terbangunnya saluran drainase/gorong-gorong (148 paket)	Dokumen perencanaan saluran drainase/gorong-gorong Dokumen kontur saluran drainase Dokumen Monitoring,	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

			evaluasi dan Pelaporan					
			Saluran Drainase/Gorong-Gorong terbangun					
	Sistem transportasi perkotaan yang efektif	Terehabilitasi jalan dan jembatan (745 paket)	panjang terbangun pada kecamatan Palembang	jalan terbangun setiap kota	Program rehabilitasi/peeliharaan dan Jalan Jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	dan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	terbangunnya infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata yang berwawasan lingkungan	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (25 paket)	Pengadaan berat 8 unit Pemeliharaan alat berat orang	alat berat 70	Program peningkatan sarana prasarana Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	dan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Panjang sungai dan drainase yang normalisasi	Tersedianya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya (70 Paket)	Dokumen perencanaan irigasi	Dokumen perencanaan pembangunan reservoir pemeliharaan jaringan irigasi	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	dan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			saluran sungai yang terpelihara					

	Tersedianya Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya (3 paket)		Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Tersedianya pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah (2 kegiatan)	Tersedianya prasarana sarana limbah Jumlah peserta pembinaan teknik pengolahan limbah kegiatan 1 Terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana limbah kegiatan 1 dan air	Program pengembangan & kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Terkendalinya banjir resevoir (4 resevoir)	terpeliharanya reservoir Pengendali banjir 12 bulan Peningkatan peran Masyarakat serta	Program pengendalian banjir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

				dalam pengendalian banjir 5 Kegiatan				
	terbangunnya infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata yang berwawasan lingkungan	Terbangunnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh (24 paket)	Dokumen perencanaan dokumen	7	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	dan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Terencananya tata ruang	Draft perda dokumen	1	Program Perencanaan Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	dan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Tersedianya Pemanfaatan Ruang (1 dokumen)	Peta 1 database peta	1	Program Pemanfaatan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	dan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Terlaksananya pelatihan jasa konstruksi (1050 orang)	Jumlah terampil Orang	SDM 1.050	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Jasa Konstruksi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	dan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase RTH (11%)	Jumlah terpeliharanya RTH 175 taman	Jumlah taman baru tercipta taman 10	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	dan	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

		Persentase sebaran pengembangan pembangunan (86%)	Jumlah database/DED kawasan permukiman Database/DED 28	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		Persentase pembangunan jalan lingkungan (91%)	Jumlah kecamatan yang mendapat pemeliharaan jalan dan jembatan di kota Palembang 16 kecamatan Jumlah pembangunan yang jalan dan jembatan di setiap kelurahan	Program pembangunan infrastruktur perkotaan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		Persentase penerangan jalan dan utilitas (86%)	Jumlah penerangan jalan dan utilitas yang baik di setiap titik di kota Palembang	Program Penerangan Jalan dan Utilitas	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	terbangunnya infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata yang berwawasan lingkungan	Persentase RTLH yang dibangun (56%)	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan 2 Kegiatan Jumlah pembangunan perumahan perumahan 60 Jumlah pembangunan perumahan	Program Pengembangan Perumahan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

		sederhana sehat 15 Kelurahan			
	Persentase pembangunan IPAL (60%)	Jumlah sarana air bersih dan sanitasi dasar di kota Palembang dalam waktu 1 Tahun 58 drainase/IPAB jumlah kelurahan yang terawasi 0 kelurahan	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	Persentase pembangunan sanitasi dasar (81%)	Jumlah pembangunan sarana prasarana dan sarana dasar permukiman yang dalam kondisi baik 2 ipal	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	Persentase pembangunan rumah yang terdampak bencana (56%)	Jumlah perbaikan rumah akibat bencana alam 10 unit Jumlah perbaikan rumah akibat bencana sosial 10 unit	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	Persentase pemenuhan	Jumlah sarana prasarana dan	Program pengelolaan	Perumahan Rakyat dan	Dinas Perumahan

	kebutuhan TPU (57%)	pemakaman yang baik kegiatan	10	areal pemakaman	Kawasan Pemukiman	Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		Jumlah sarana dan prasarana pemakaman yang baik kegiatan	18			
terbangunnya infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata yang berwawasan lingkungan	Meningkat Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam (100%)	Jumlah kecamatan yang berpotensi bencana alam Kecamatan	18	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana
		Jumlah tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam yang di sediakan 18 Kecamatan				
		Jumlah jenis sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam yang di beli 5 Jenis				
		Jumlah jenis Pengadaan logistik dan obat-				

			obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara yang di beli 50 Jenis			
	Perentase penanganan sampah	Pengurangan sampah; Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan; Tersedianya sistem pengangkutan sampah di perkotaan; Penanganan sampah	Jumlah penyusunan kebijakan manajmene pengelolaan persampahan 1 Jumlah pertemuan dalam penyusunan kebijakan manajmene pengelolaan persampahan pertemuan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Jumlah unit pembangunan alat pengelolaan persampahan Jumlah upah belanja jasa petugas kebersihan jumlah paket pengembangan teknologi persampahan 1 paket jumlah kali bimtek pengelolaan persampahan berbasis 3R 6 kali Jumlah kegiatan peningkatan	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan

				<p>kemampuan aparat pengelolaan persampahan 2 kegiatan</p> <p>jumlah bulan pengelolaan sampah dengan teknologi tinggi dan ramah lingkungan 12 bulan</p> <p>jumlah sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 2 sosialisasi</p>		
	Persentase pengurangan genangan dan sampah	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air; Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan kasus pencemaran dan/atau	jumlah koordinasi yang dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi dan pemantauan lapangan 4 kali koordinasi	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
			Jumlah lokasi/titik yang dilakukan pemantauan dalam rangka evaluasi kualitas udara perkotaan 3 Lokasi/titik			

kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	jumlah wilayah di dalam kota Palembang yang dipantau untuk menyediakan informasi kualitas air dan udara ambient 89 titik jumlah laporan perhitungan daya tampung beban pencemaran sungai bendung 1 laporan	titik
	Jumlah pembinaan/pengawasan terhadap ketaatan izin lingkungan usaha 60	
	Pengawasan Jumlah peserta bimtek pelaporan pelaksanaan izin lingkungan 50	
	peserta Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang	

ditindak lanjuti
30 kasus

Jumlah
perusahaan
peserta
pembinaan
dalam rangka
Proper 20
Peserta/perusah
aan

Persentase
jumlah usaha
atau kegiatan
yang mentaati
persyaratan
administratif dan
teknis
pengendalian
pencemaran air
80 Persen
jumlah peserta
sosialisasi
pengendalian
pencemaran air
40 peserta

jumlah
masyarakat yang
mampu
menghasilkan
produk ramah
lingkungan
bernilai
ekonomis 40
orang

	<p>Persentase luasan lahan yang ditetapkan status kerusakan lahan untuk produksi biomassa</p> <p>Jumlah grup diskusi 1 FGD kegiatan koordinasi rencana iklim koordinasi</p> <p>umlah laporan informasi kerusakan dan lahan rona awal, persentase luasan lahan ditetapkan status kerusakan lahan untuk produksi biomassa 1 Laporan</p> <p>Jumlah pemantauan kualitas air sumur/air tanah 20 Titik pantau</p>	<p>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</p> <p>Lingkungan hidup</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan</p>
	<p>Dokumen informasi data SDA lingkungan hidup (tidak ada)</p> <p>Jumlah bimtek/sosialisasi pembinaan, Ay Darlingku, penilaian</p> <p>Jumlah server/website/aplikasi DLHK</p>	<p>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p>

		<p>Kota Palembang 1 Server/website/aplikasi</p> <p>Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (DIKPLH)</p> <p>Jumlah sertifikat akreditasi kinerja laboratorium yang diakui 1 Sertifikat KAN</p>			
	<p>Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara</p>	<p>rasio jumlah kendaraan yang lulus uji 90 Persen</p> <p>jumlah yang emisi</p> <p>Program Peningkatan Pengendalian Polusi</p> <p>Lingkungan hidup</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan</p> <p>jumlah penyuluhan ke pelaku usaha</p>	<p>Program Peningkatan Pengendalian Polusi</p>	<p>Lingkungan hidup</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan</p>

			dalam pengendalian dampak kerusakan lingkungan kali penyuluhan	1		
	Sistem transportasi perkotaan yang efektif	Meningkatnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dokumen	4	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Perhubungan Dinas perhubungan
			Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kegiatan Jumlah Laporan Usulan DAK 1 laporan	1		
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan dibidang perhubungan			
			750 orang			
			Jumlah Peserta Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan			
			650 orang/peserta			

		Jumlah laporan dalam peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 10 laporan			
	Meningkatnya Pemeliharaan Terhadap Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah unit rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 18 unit kalibrasi jumlah perbaikan alat uji kendaraan bermotor 3 paket	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Perhubungan	Dinas perhubungan
		Jumlah gedung yang di perbaiki 2 Gedung			
		Jumlah rehabilitasi pemeliharaan Dermaga 2			
		Jumlah rehabilitasi pemeliharaan terminal 2			
		Jumlah Rehabilitasi Halte 1			
		Jumlah Rehabilitasi Pos Jaga 2 pos			

		Jumlah Pemeliharaan ATCS 1 tahun Jumlah marka/zebra cross yang terpelihara 500 m2 Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpelihara 1 Paket Jumlah Traffic light yang terpelihara 1 Paket				
		Jumlah kendaraan angkutan sungai yang terpelihara 5 unit				
	Meningkatnya Pelayanan Angkutan	Jumlah penyuluhan sopir/juru mudi untuk peningkatan pelayanan penumpang 30 orang	orang bagi mudi	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Perhubungan	Dinas perhubungan
		Jumlah pelaksanaan penertiban angkutan sungai 1 pelaksanaan				
		Jumlah kendaraan uji	uji			

		<p>kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang kendaraan 400</p> <p>Jumlah kegiatan diadakannya razia gabungan 2 kegiatan</p> <p>Jumlah laporan audit dan investigasi keselamatan transportasi Laporan 2</p> <p>Jumlah pengadaan alat kebersihan halte 11 jenisJumlah jasa kebersihan terminal dan halte BRT 13 OBJumlah premi asuransi jiwa 480 premi</p> <p>Jumlah laporan perijinan dibidang perhubungan laporan 2</p>			
	Meningkatnya Pembangunan	Jumlah Pengadaan halte	Program pembangunan	Perhubungan	Dinas perhubungan

	Terhadap Sarana dan Prasarana Perhubungan	portable unitJumlah Peningkatan ATCS 1 paket	5	sarana dan prasarana perhubungan		
		Jumlah pembangunan Dermaga 1 unit				
	Meningkatnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan Traffic Cone buahJumlah Pengadaan Power Suplay Traffic light paketJumlah Pengadaan Baterai APILL buahJumlah Pengadaan Rambu Lalu Lintas paketJumlah Pengadaan Papan Nama Jalan paketJumlah Pengadaan Cembung paket	150	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Perhubungan	Dinas perhubungan
		jumlah panjang pengadaan marka jalan m2	200			
		Jumlah Pengadaan		Pagar		

			Pengaman Jalan 1 paket				
		Persentase peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan petik 300 Unit	uji	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Perhubungan	Dinas perhubungan
	terbangunnya infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata yang berwawasan lingkungan	Kinerja Bidang Komunikasi, Informasi dan E-Government	Jumlah yang dalam Sistem Jumlah OPD Terkoneksi Rata-Rata Koneksi 600 MBps	Sistem Terintegrasi E-Gov 52 yang 177 Sistem	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Perhubungan	Dinas Komunikasi Dan Informatika
			Jenis Pengamanan Jenis	Sistem 2			
			Jumlah pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sistem informasi 1 Dokumen				
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pengkajian dan Penelitian Bidang	Dokumen Dokumen	2	Program pengkajian penelitian bidang informasi komunikasi dan dan	Perhubungan	Dinas Komunikasi Dan Informatika

			Komunikasi dan Informatika				
			Persentase Kualitas Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah Bimbingan Teknis Diikuti Bimtek	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Perhubungan	Dinas Komunikasi Dan Informatika
			Tingkat Keterbukaan Informasi Pembangunan	Jumlah Penyebarluasan Informasi 13 Jenis	Program kerjasama informasi dengan media mass	Perhubungan	Dinas Komunikasi Dan Informatika
				Jumlah Penyebarluasan Informasi 1 Jenis			
				Jumlah penyediaan penyebarluasan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat 11 Kegiatan			
2	Pemerataan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan	Meningkatnya Angka Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Pembangunan Gedung Sekolah 2 TK Negeri	Program Pendidikan Anak Usia Dini	pendidikan	Dinas pendidikan
				Jumlah Buku dan Alat Tulis Siswa 1 Paket			

		Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1 Paket			
		Jumlah Pengadaan Mebeleur Sekolah 3 paket			
		Jumlah Bangunan yang Baik 3 Ruang			
		Jumlah Tenaga Pendidik yang berkompeten 350 orang			
		Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 201 orang			
	Meningkatnya Angka Rata - Rata lama Sekolah	Jumlah gedung sekolah yang baik sesuai SPM 59 Ruang	Program Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Wajib pendidikan	Dinas pendidikan
		Jumlah Buku dan Alat Tulis Siswa 3 Paket			
		Jumlah Alat Praktik dan			

Peraga Siswa
199 paket

Jumlah
Pengadaan
Meubelair
sekolah 460
paket

Jumlah
Bangunan
Sekolah yang
baik 30 Paket

Jumlah Siswa
berprestasi 2.953
orang

Jumlah
Pelatihan
Penyusunan
Kurikulu 175 SD
Negeri

Jumlah
Penyediaan
Bantuan
Operasional
Sekolah (BOS)
jenjang
SD/MI/SDLB
dan SMP/MTs
serta Pesantren
Salafiyah dan
Satuan
Pendidikan Non
Islam setara SD
dan SMP (BOS)
25.322 orang

			Jumlah belajar pendidikan 100 Orang	wajib dasar			
			Jumlah belajar pendidikan 327 Orang	wajib dasar			
			Jumlah Bakat dan Kreativitas 1.500 Orang	Minat, dan Siswa			
			Jumlah Bakat dan Kreativitas 1.429 orang	Minat, dan Siswa			
			Jumlah Bakat dan Kreativitas 50 Orang	Minat, dan Siswa			
			Jumlah evaluasi bagi siswa 1.244 orang 6 Paket 350 Sekolah				
		Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar	Jumlah Pendidikan Menengah Orang	602	Program Pendidikan Menengah	pendidikan	Dinas pendidikan
	1. tenaga pendidik	Jumlah Meningkatkan Angka Melek Huruf Latin	Jumlah Lembaga Kursus yang baik 808 orang		Program Pendidikan Formal	Non pendidikan	Dinas pendidikan

	berkualitas2. Persentase sebaran tenaga pendidik	Jumlah pengembangan keaksaraan 376 Orang Jumlah Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 9 paket Jumlah Peserta Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal 50 Orang		
	Meningkatnya Jumlah guru yang tersertifikasi	Jumlah pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkompeten 180 orang Jumlah KKG yang aktif dan inovatif 18 KKG Jumlah Guru yang memiliki Legalitas Mengajar 25 guru Jumlah guru yang kompetitif 8 pendidik/guru	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pendidikan	Dinas pendidikan

		Jumlah pendidik dan tenaga Kependidikan yang bermutu 3.251 orang
		Jumlah Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 100 buku
	Meningkatnya Nilai Kelulusan	Jumlah data Program evaluasi Kinerja Manajemen Bidang Pendidikan 1 Pelayan Pendidikan Laporan
		Jumlah Sosialisasi dan Advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan 496 orang
		Jumlah Dewan Pendidikan yang aktif dan berintegritas 10 Orang
		Jumlah Peserta pelatihan,semina

				r dan lokakarya,serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan 662 Orang				
		Meratanya kualitas pendidikan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih; Jumlah Ormas yang sesuai aturan; Jumlah parpol yang menerima bantuan keuangan	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan 1.600 Orang Jumlah orang yang mengikuti kegiatan 450 Orang Jumlah Laporan Perkembangan Politik 12 Laporan	Program pendidikan politik masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
3	Peningkatan akses dan layanan kesehatan	Terbangunnya puskesmas, dan penambahan fasilitas rawat inap Puskesmas di Kecamatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Jumlah jenis dan perbekalan kesehatan yang dibeli 270 Jenis Jumlah petugas Puskesmas yang membuat rencana kebutuhan obat (e-monev) 41 Orang	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan	Dinas kesehatan	
		Meningkatnya kesadaran masyarakat	Persentase penduduk yang memiliki	Jumlah Rumah sakit yang melakukan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas kesehatan	

	untuk sehat	hidup	Jaminan Kesehatan	revitalisasi sistem kesehatan melalui SIRS 34 Rumah Sakit			
				Jumlah tim PSC di Kota Palembang 41 Tim			
				Jumlah Posbindu di Kota Palembang 75 Posbindu			
				Jumlah peserta integrasi program BPJS bagi Masyarakat Miskin 188.834 Orang			
			Tidak ditemukannya pangan kadaluarsa di sarana distribusi	Jumlah lokasi / obyek yang dipantau pangan kadaluarsa dan bahan berbahaya di sarana distribusi 64 Lokasi	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Kesehatan	Dinas kesehatan
			Jumlah Puskesmas yang mengembangk an pelayanan pengobatan tradisonal	Jumlah peserta Pertemuan petugas pengobat tradisional dan Kader di Puskesmas 135 Orang	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia		

	Persentase Rumah Tangga PHBS	ber-	Jumlah Desa / Kelurahan Aktif Mandiri Kelurahan	Siaga Purnama 66	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Kesehatan	Dinas kesehatan
			Jumlah peserta yang mengikuti HKN Orang	1.000			
			Jumlah kecamatan mempunyai bakti husada	2 Kecamatan			
	Cakupan balita buruk mendapat perawatan	gizi	Jumlah rapat & stunted Palembang Orang	peserta koordinasi evaluasi dikota 60	Program Perbaikan Masyarakat	Gizi	
			Jumlah Hamil dan Kurang Mendapat 1.000 dan Kurang Gizi	Ibu dan Balita Gizi PMT Hamil Balita			
			Jumlah evaluasi distribusi pada	peserta FE remaja			

		<p>putri Kota Palembang dan jumlah balita kurang gizi pasca perawatan yg mendapat PMT 0 Orang</p> <p>Jumlah peserta pertemuan orientasi pencatatan dan pelaporan posyandu balita 100 Orang</p> <p>Jumlah peserta seminar penanggulangan Gizi Lebih 41 orang</p>			
	<p>Jumlah kelurahan yang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)</p>	<p>Jumlah Sarana/lokasi air bersih dipantau SPL 209</p> <p>Jumlah Lokasii dinilai kebersihan Toilet perkantoran dan TTU yang bersih dan sehat , Jumlah pasar tradisional yang dibina, Jumlah hotel yang diawasi akses</p>	<p>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</p>	<p>Kesehatan</p>	<p>Dinas kesehatan</p>

			sanitasi masyarakat yang memenuhi syarat kesehatan 133 Lokasi				
			Jumlah Peserta Pertemuan Kesling 41 Puskesmas				
			Jumlah lokasi TPS/TPA yang dipantau 32 TPA/TPS				
			Jumlah kelurahan yang dinilai faktor resiko kesehatan lingkungan terhadap kesehatan masyarakat 26 Kelurahan				
	Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan Tuberculosis (TB)	Jumlah lokasi dilakukan penyemprotan/ Fogging Nyamuk Lokasi	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinas kesehatan	
			Jumlah peserta pertemuan penguatan program imunisasi tingkat kota palembang				

		(41 PKM, 16 RS, 41 Fasyankes Swasta/BPM) 98 Orang			
		Jumlah penderita TB yang ditangani 1.715 kasus TB BTA (+)			
		Jumlah Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD , filariasis dan Malaria 200 Kasus			
		Jumlah pelacakan kasus penyakit PD3I: Jumlah PE Penyakit Potensial KLB 85 Kasus			
	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pendampingan dalam penyusunan standar akreditasi 11 Puskesmas	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas kesehatan

			Jumlah Puskesmas yang dilakukan penilaian/survei akreditasi oleh komisi akreditasi 18 Puskesmas			
			Jumlah Buku Data Dasar dan Tersedianya Data SPM 50 Buku			
	Terbangunnya puskesmas, pustu dan penambahan fasilitas rawat inap Puskesmas di Kecamatan	Jumlah Puskesmas/sarana prasarana yang sesuai standar	Jumlah Puskesmas yang dibangun 11 Gedung Jumlah Pustu yang di Bangun 6 Gedung Jumlah alat kesehatan Puskesmas 15 Set Jumlah Puskesmas yang menjadi puskesmas rawat inap 2 Puskesmas Jumlah Alat Kesehatan Puskesmas Yang di kalibrasi 1 Paket	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya	Kesehatan	Dinas kesehatan

		Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang di rehabilitasi 15 Puskesmas dan Pustu					
	Persentase sarana dan prasarana dan alat kesehatan RSUD Gandus	Jumlah Sakit dibangun Gedung	Rumah yang 1	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru/ rumah sakit mata	Kesehatan	Dinas kesehatan	
		Jumlah Poliklinik dibangun Gedung	ruang yang 5				
		Jumlah obat dibangun Gedung	gudang yang 1				
		Jumlah Operasi dibangun Ruang	Ruang yang 1				
		Jumlah Bangunan di rehab Gedung	yang 1				
		Jumlah Kesehatan Paket	Set Alat 1				

		Jumlah obat yang disediakan 1 Paket			
		Jumlah alat rumah tangga 1 Paket			
		Jumlah mebeulair yang di sediakan 1 1 Paket			
		Jumlah Rumah Sakit Yang dikembangkan tipenya /klasifikasi 1 Paket			
		Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi 1 Pt			
	Persentase sarana dan prasarana dan alat kesehatan RSUD Gandus	Jumlah Gedung rumah sakit yang dipelihara 1 Gedung	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru/ rumah sakit mata	Kesehatan	Dinas kesehatan
		Jumlah Alat Kesehatan yang dipelihara 7 Set			
		Jumlah Mobil Ambulance 1 Unit			

			Jumlah Mebelair yang dipelihara 1 Paket			
			Jumlah Alkes yg di			
		Persentase tenaga kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit Gandus yang memiliki Surat Izin Praktek (SIP)	Jumlah peserta Sinkronisasi data Pencatatan dan Pelaporan Gigi dan Mulut di Puskesmas Kota Palembang 41 Orang	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas kesehatan
	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat	Persentase pelayanan kesehatan anak balita	Jumlah asal peserta Imba Balita sehat 55 Orang jumlah peserta pembinaan kesehatan Balita Apras, pelacakan kasus KTA 88 Orang	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Kesehatan	Dinas kesehatan
		Persentase pelayanan kesehatan pada lanjut usia	jumlah peserta yang mengikuti hari lanjut usia, jumlah peserta yang mengikuti pembinaan kebugaran bagi kader usia lanjut 200 Org	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Kesehatan	Dinas kesehatan

				Jumlah Puskesmas Santun Lansia 41 Puskesmas				
		Jumlah dan Restaurant yang sudah dilakukan pengawasan dan pengendalian (Wasbindal) tentang kesehatan makanan	IRTP sudah	Jumlah produksi tangga dinilai hygiene 40 Sarana	jumlah sarana rumah yang kualitas sanitasi,	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Kesehatan	Dinas kesehatan
		Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar; Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin		Jumlah Restoran, RM daerah	jumlah peserta peningkatan pemahaman petugas standar pelayanan terpadu ANC 81 Orang	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Kesehatan	Dinas kesehatan
				Jumlah kantin sekolah yang sudah dilakukan pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 70 Restoran, kantin, RM daerah	Jumlah peserta peningkatan kemampuan petugas dalam melakukan kajian kasus			

			kematian mernal perinatal (Orang) 250 Orang				
			Jumlah Puskesmas yang mampu melakukan PONED Puskesmas	11			
	Persentase kepuasan pelanggan terhadap pelayanan kesehatan		Jumlah Puskesmas Menerapkan BLUD RSUD Gandus	Yang Menerapkan PPK 41 Puskesmas 1	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		
	cakupan upaya kesehatan masyarakat		Jumlah Pelayanan Kefarmasian dan alat kesehatan yang tersedia 4 paket		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas kesehatan
	Terbangunnya puskesmas, pustu dan penambahan fasilitas rawat inap Puskesmas di Kecamatan	cakupan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Jumlah gedung dibangun Paket	unit yang 2	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru/ rumah sakit mata	Kesehatan	Dinas kesehatan
			jumlah kesehatan tersedia unit	alat yang 1.734			
			jumlah perlengkapan rumat tangga				

			yang tersedia sakit 3 Paket			
			Jumlah paket sarana prasarana rumah sakit 4 PK			
		cakupan pelayanan kesehatan BLUD	cakupan pelayanan kesehatan BLUD yang dilaksanakan 1 Paket	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Kesehatan	Dinas kesehatan
			cakupan pelayanan kesehatan BLUD yang dilaksanakan 1 Paket			
	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat	Jumlah masyarakat yang terlayani Keluarga Berencana	Jumlah akseptor yang mendapatkan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin 1.440 Akseptor	Program Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan Komunikasi, Informasi dan			

	Edukasi Orang	512			
	Jumlah orang yang dibina mengenai KB keluarga yang terencana orang	780			
	Jumlah laporan analisis data program KB laporan	10			
	Jumlah laporan pemuktahiran data keluarga laporan	25			
	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Rakerda Review orang	300			
	Jumlah balai yang disediakan 8 Balai				
Pelayanan kesehatan remaja	Jumlah orang yang mengikuti advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja orang	1.230	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

			Tersedianya Pelayanan Kontrasepsi	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan KB medis operasi 160 Orang	Program pelayanan kontrasepsi	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Kelompok masyarakat peduli KB	Jumlah orang yang peduli KB 588 orang	Program pembinaan peran masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Cakupan remaja mendapat informasi dan konseling KRR	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah 60 orang	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Ketersediaan kelompok Bina Tri	Jumlah orang yg mengikuti pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan 50 orang	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga		
4	Pembangunan budaya integritas masyarakat yang didukung	Terpenuhinya SDM yang Professional	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kendaraan Pendidikan unit	Dinas 1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pendidikan Dinas Pendidikan

	oleh pemerintahan yang bersih, berwibawa dan professional	Terpenuhinya penempatan SDM yang berkompentensi di bidangnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12 unit/bln Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 39 Unit/bulan	
		Persentase Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi	Jumlah Sosialisasi peraturan Perundang-undangan Orang 625 Jumlah Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 938 Jumlah Pemutakhiran Administrasi Aparatur Orang 280 Jumlah Aparatur Kinerja Orang 831	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tersusun Tepat waktu	Jumlah Laporan Kinerja laporan Keuangan Laporan Perencanaan SKPD Jumlah DPA dan DPPA yang Baik dan Benar 10 laporan	Laporan SKPD 3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Persentase kepuasan pelanggan terhadap pelayanan kesehatan	Jumlah Pembangunan Gedung Untuk Kesehatan Kantor Jumlah Kendaraan dinas yang dibeli Mobil Jumlah dinas yang diperbaiki (1 Gedung Dinkes, 1 Gedung Gudang Farmasi) 2 Unit Pemeliharaan Rutin/ berkala	Gedung Kantor Dinas Kesehatan 1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kesehatan	Dinas Kesehatan

		<p>kendaraan dinas/ operasional (21 Mobil dan 26 Motor) 47 Unit</p> <p>Jumlah Gedung Kantor yang di peliharaan 2 Gedung</p> <p>Jumlah Kendaraan Dinas Yang di Pelihara 20 Mobil /Motor</p>			
	Persentase kepuasan pelanggan terhadap pelayanan kesehatan	<p>Jumlah pegawai yang mendapat pakaian dinas dan perlengkapannya 390 Steel Pakaian PDH</p> <p>Jumlah pegawai yang mendapat pakaian Hari - hari tertentu 390 Steel Pakaian Hari-hari tertentu</p>	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Persentase kepuasan pelanggan terhadap pelayanan kesehatan	<p>Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Selama 1 tahun 83 Orang</p>	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kesehatan	Dinas Kesehatan

	Persentase kepuasan pelanggan terhadap pelayanan kesehatan	Jumlah capaian dan realisasi SKPD disusun (Profil, Tapkin, LPPD, Sarana, Kebutuhan BKDA dan buku selayang pandang) Laporan	Jumlah laporan kinerja ikhtisar kinerja yang (Lakip, Renja, IKU, Profil Rencana SDM, dan buku selayang pandang) Laporan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			14			
			Jumlah laporan keuangan yang disusun 1 Laporan			
			Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun 1 Laporan			
			Jumlah dokumen PD kegiatan disusun 2 Dokumen	RKA yang 2		
			Jumlah dokumen dan DPPA dicetak 2 Dokumen	DPA yang 2		

	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah kantor terbangun gedung	gedung yang 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang ada 2 unit		
				Jumlah rutin berkala kendaraan dinas / operasional kegiatan 1		
				Jumlah gedung yang direhab 1 gedung		
				Jumlah gedung kantor yang direhab 5 gedung		
	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	Pakaian Beserta Perlengkapannya 180 stel	Dinas	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
		Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu 180 Stel				

	Persentase Aparatur yang memenuhi standar kompetensi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal 12 bulan Jumlah manajemen mutu aparatur 60 orang	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase laporan capaian kinerja keuangan yang tersusun tepat waktu	Jumlah laporan capaian dan realisasi kinerja 6 Laporan Jumlah laporan keuangan semesteran 2 laporan Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun 4 laporan Jumlah laporan triwulan 4 laporan Jumlah buku RKA SKPD 2 buku	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Tingkat kelengkapan sarana prasarana aparatur	jumlah kendaraan yang diadakan 6 Unit	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Daerah pemukiman	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

		Jumlah gedung/bangunan yang dipelihara 1 Gedung				
		jumlah mobil jabatan yang dipelihara 1 unit				
		Jumlah kendaraan yang dipelihara 114 Unit				
		Jumlah perlengkapan gedung/bangunan yang dipelihara (Gedung) 25 jenis				
		jumlah gedung/bangunan yang di rehab (Gedung) 1 Gedung				
	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	Jumlah pakaian dinas 224 stel	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Daerah pemukiman	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	
		Jumlah kaos 721 kaos				
		jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu				

		diadakan Stel	224			
	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan orang	500	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Daerah pemukiman	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	Jumlah dokumen yang terlapor 10 jenis Jumlah laporan yang tersedia 2 Buku Jumlah laporan yang ada 1 buku Jumlah jenis dokumen yang terlaporkan dalam 1 tahun 4 buku Jumlah dokumen yang dibuat dalam waktu 1 tahun 4 dokumen		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Daerah pemukiman	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Gedung Kantor 1 Gedung Jumlah Kendaraan Dinas 104 Unit		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana	Satuan Polisi Pamong Praja

		Jumlah Gedung Kantor 1 Gedung				
	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	Jumlah Dinas 585 Stel Jumlah Pakaian Kerja Lapangan 580 Stel Jumlah Pakaian Olah raga dan Pakaian Dinas Upacara 160 Stel	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Sarana dan Prasarana	Satuan Polisi Pamong Praja	
	Persentase Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi	Jumlah Orang 10 Orang	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sarana dan Prasarana	Satuan Polisi Pamong Praja	
	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah unit kend.operasional 4 unit Jumlah gedung yang diperbaiki 1 unit Jumlah kendaraan yang di pelihara 20 unit	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
	Tingkat kedisiplinan aparatur aparatur	Jumlah stel pakaian dinas 48 stel	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Sarana dan Prasarana	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	

	dalam kehadiran dan penggunaan atribut	Jumlah stel pakaian khusus hari tertentu (Pakaian Olahraga) 50 Stel		
	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan orang 52 Jumlah peraturan yang diimplementasikan 1 peraturan Jumlah tenaga pemuktahiran data aparatur 2 Orang	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	Jumlah Laporan 8 Lap Jumlah Laporan Keuangan semesteran Lap 6 Jumlah laporan keuangan akhir Tahun 1 Lap Jumlah org dalam penyusunan RKA 150 OH	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	

	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah kendaraan dinas/operasional 1 unit kendaraan	unit	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Social	Dinas Sosial
		Jumlah gedung kantor dipelihara 1 gedung				
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala 34 kendaraan				
		Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi 1 gedung				
	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	Jumlah pakaian beserta perlengkapannya 110 stel	stel dinas	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Social	Dinas Sosial
		Jumlah pakaian kerja lapangan beserta perlengkapannya 50 stel	stel			
		Jumlah pakaian hari-hari tertentu beserta	Stel khusus			

			perengkapannya 110 stel			
	Persentase Aparatur Yang Memenuhi Standar Kompetensi	Jumlah Orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 8 orang	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Social	Dinas Sosial	
		Jumlah laporan sosialisasi Perda Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan dan Gepeng 0 Laporan				
		Jumlah orang yang mengikuti peningkatan manajemen mutu aparatur 240 orang				
	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 13 laporan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Social	Dinas Sosial	
		Jumlah laporan keuangan semesteran 2 laporan				

	Jumlah laporan keuangan akhir tahun 1 laporan				
Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah gedung kantor yang dibangun 2 Gedung	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penanggulangan bencana	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana	
	Jumlah kendaraan dinas yang di beli 3 Unit				
	Jumlah pos pemadam yang dipelihara secara rutin/berkala 4 Gedung				
	Jumlah Unit kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala 80 Unit				
	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi 4 Gedung				
	Jumlah Kendaraan Dinas operasional yang direhabilitasi 50 Unit				

	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	Jumlah mesin kartu absensi yang di beli 10 Unit Jumlah sepatu PDH yang di beli 150 PasangJumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang dibeli 150 Stel Jumlah Sepatu PDL yang dibeli 400 PasangJumlah pakaian kerja lapangan beserta kelengkapannya yang dibeli 400 Stel Jumlah baju kopri yang di beli 300 Stel Jumlah baju olahraga yang di beli 550 Stel	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Penanggulangan bencana	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana
	Persentase Laporan Capaian Kinerja Keuangan Yang	Jumlah laporan capaian dan realisasi SKPD	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Penanggulangan bencana	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana

	Tersusun Tepat Waktu	disajikan Laporan	4	Capaian Kinerja dan Keuangan		
		Jumlah laporan keuangan semester yang disajikan Laporan	2			
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disajikan Laporan	1			
		Jumlah laporan triwulan yang disajikan Laporan	4			
		Jumlah dokumen yang disajikan Dokumen	1	RKA		
		Jumlah dokumen yang disediakan 1 Dokumen		SOP		
		Jumlah dokumen dan DPPA yang di sediakan Dokumen	1	DPA		
	Persentase Tingkat kelengkapan	Jumlah Gedung kantor / Gedung Workshop	Gedung Las	Program Peningkatan Sarana dan	Ketenagakerj aan	Dinas ketenagakerj aan

	sarana dan prasarana aparatur	dan yang dibangun 1 gedung	<p>Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional 7 unit</p> <p>Terpeliharanya gedung kantor dengan baik, pengecatan pagar 500 m2</p> <p>Tersedianya Kendaraan Dinas operasional yang baik 47 unit</p> <p>Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor 15 jenis</p> <p>Jumlah gedung kantor yang di rehab 3 Gedung</p>	Prasarana Aparatur		
	persentase Terwujudnya pola kerja yang lancar dan nyaman dalam penyelesaian tugasTingkat kedisiplinan aparatur dalam	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya 60 stel	Jumlah pakaian lapangan yang tersedia 93 stel	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Ketenagakerj aan	Dinas ketenagakerj aan

	kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	Jumlah pakaian KORPRI yang tersedia 60 stel	Jumlah Pakaian Khusus Hari yang tersedia 93 stel			
	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan 15 orang	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Ketenagakerjaan	Dinas ketenagakerjaan	
		terlaksananya Kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kegiatan 1				
		Terlaksananya Bimbingan Teknis ASN 20 orang				
		Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Pelatihan Informal kegiatan 1				
		terlaksananya kegiatan peningkatan manajemen				

				mutu 10 orang	aparatur			
			Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	Tersedianya laporan Kinerja dan Ikhtisarkinerja SKPD 12 Bulan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketenagakerj aan	Dinas ketenagakerj aan	
				Tersedianya Laporan Keuangan `Laporan	2			
				Jumlah Laporan keuangan akhir tahun disusun laporan	1			
				Tersedianya RKA, RKAP, DPA, DPAP SKPD dokumen (403)	2			
5	Peningkatan investasi, pembangunan ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan	Terbantunya masyarakat miskin	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	Jumlah orang dan petugas pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya 79.978 orang KPM	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	sosial	Dinas sosial	
				Jumlah UEP yang mendapat				

		pelatihan UEP	99			
		Jumlah orang yang mengikuti pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	60 orang			
	Persentase Pelaksanaan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah orang dan pelayanan perlindungan sosial, bagi eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	1.316 orang KPM	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	social	Dinas sosial
		Jumlah dan KPM dalam pelaksanaan KIE dan Kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	520.686 orang KPM			
		Jumlah dalam mekanisme	KPM			

			<p>pemutakhiran mandiri 79.293 KPM</p> <p>Jumlah orang yang mengikuti peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 169 orang</p> <p>Jumlah laporan, orang dan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat kejadian luar biasa 172 laporan orang dan penanganan masalah</p>			
	Persentase Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah orang dalam penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar 15 orang	Program pembinaan anak terlantar	social	Dinas sosial	
	Persentase Pembinaan	Jumlah orang penyandang	Program pembinaan para	social	Dinas sosial	

	para penyandang cacat dan trauma yang dilaksanakan	cacat penyakit kejiwaan orang	dan 322	penyandang cacat dan trauma		
		Jumlah laporan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	1	Laporan		
	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan yang terlaksana	Jumlah peningkatan peran masyarakat dunia usaha Unit	unit aktif dan 412	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	social	Dinas sosial
		Jumlah orang dan PSM dalam peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat orang dan PSM	589			
		Jumlah laporan peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	7	Laporan		

BAB. VII PROGRAM DAN RENCANA AKSI

Sasaran, strategi dan arah kebijakan penguatan sistem inovasi daerah Kota Palembang tahun 2017-2021 itu sendiri dirumuskan berdasarkan kondisi saat ini penguatan sistem inovasi daerah (Bab II) yang dilengkapi oleh tantangan dan peluang penguatan sistem inovasi daerah (Bab III), dan kemudian dilanjutkan dengan penyusunan kondisi penguatan sistem inovasi daerah yang diinginkan hingga tahun 2021 (Bab IV).

Rencana aksi (*action plan*) penguatan sistem inovasi daerah Kota Palembang tahun 2017-2021 adalah sehimpunan rencana kegiatan yang lebih terperinci untuk menerjemahkan sasaran, strategi dan arah kebijakan penguatan sistem inovasi daerah Kota Palembang tahun 2017-2021 (Bab V) yang telah diindikasikan dalam fokus dan program prioritas penguatan sistem inovasi daerah Kota Palembang tahun 2017-2021 (Bab VI). Dalam hal ini, rencana aksi penguatan sistem inovasi daerah Kota Palembang tahun 2016-2021 disajikan dalam bentuk tabulasi yang terdiri dari komponen-komponen berikut :

1. Sasaran.
2. Arah Kebijakan.
3. Indikator Kinerja (Output).
4. Capaian Kinerja.
5. Program dan Kegiatan.
6. Target dan Waktu Pelaksanaan.
7. Institusi Penanggung Jawab.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel – table di bawah ini :

Tabel 7.1.Rencana Aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Palembang 2018 - 2023

No	Prioritas Pembangunan	SASARAN	ISU STRATE GIS	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	RENCANA AKSI	KONDISI YANG DIINGINKAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata yang berwawasan lingkungan Terlaksananya normalisasi sungai, drainase, dan pembuatan kolam retensi Adanya sarana dan prasarana persampahan Meningkatnya	Mengembangkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi intermodal dan antarmoda yang terpadu angkutan massal berbasis teknologi dan Informasi Mengembangkan keterampilan	Menjadikan Automatic Traffic Control System (ATCS) Kota Palembang sebagai pusat komando dan koordinasi lalu lintas yang Terintegrasi dengan layanan Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya Mendorong penambahan kapasitas jalan dan Jembatan Mendorong seluruh elemen masyarakat untuk	Program Perencanaan Penataan Ruang program Penerangan Jalan Dan Utilitas Program Pengembangan Data/Informasi Inovasi Dan Bisnis Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan San	terbangunnya infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata yang berwawasan lingkungan Panjang sungai dan drainase yang di normalisasi Perentase penanganan sampah Persentase pengurangan dan sistem transportasi perkotaan yang efektif jumlah SDM yang profesional	Pembangunan sarana dan prasarana utilitas di setiap kecamatan Pembangunan Penerangan Jalan dan Sarana Umum di Kota Palembang Perencanaan pembangunan jalan dan jembatan Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Penataan Kawasan Kumuh; Peningkatan Sarana Bersih; Penyediaan Sistem Limbah Permukiman; Normalisasi Sungai, Drainase, dan Pembuatan Kolam Retensi; Penyiapan Sarana dan Prasarana Persampahan; Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Genangan dan Sampah; dan	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi Dan Informatika

kesadaran masyarakat terhadap genangan dan sampah	jaringan jalan dan jembatan yang mendukung mobilitas barang dan jasa melalui penambahan kapasitas dan peningkatan jalan dan jembatan.	memasyarakatkan pelatihan tanggap bencana Mengembangkan kawasan "green and clean zone" di seluruh pedestrian dan taman kota Mendorong kebijakan 1 RW 1 Taman di seluruh wilayah Palembang Mengembangkan ekosistem pelestarian ikan gabus dan belida di Kawasan Sungai Musi dan perairan yang sesuai dengan habitatnya Memperketat regulasi alih lahan Pertanian	Jembatan Program, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Program Rehabilitasi/Pemeliharaan/Bronjong Program Pengelolaan Pengerangan Jalan Umum Program Tanggap Darurat Jalan Dan Jembatan Program Pembangunan System Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan Program Pengembangan Dan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Program Inspeksi	Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan Survey dan pemetaan Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang Peningkatan Sarana Dan Prasarana Jasa Konstruksi Perencanaan pembangunan	Penyediaan Sistem Transportasi Perkotaan	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana
---	---	---	---	---	--	--

Informasi	Pengelolaan sampah dengan teknologi tinggi dan mendukung TPA tingkat regional yg dpt mengkomodir kab/kota sekitar	Kondisi Jalan Dan Jembatan	an jaringan irigasi
Penataan seluruh pedestrian		Program Peningkatan Saran Dan Prasarana Pekerjaan Umum	Perencanaan pembangunan reservoir
Mengembangkan kawasan baru dan pembangunan ruang publik serta ruang terbuka hijau di setiap kecamatan dan kelurahan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Pengolahan (air limbah) dan Pengembangan jaringan air limbah kota yang terintegrasi	Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku	Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi
		Program Pengembangan, Pengelolaan, Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya	Rehabilitasi / pemeliharaan normalisasi saluran sungai
	Memperbanyak pembangunan kolam retensi dan normalisasi sungai	Program Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun
		Program Pengendalian Banjir	
		Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	Perencanaan turap/talud / bronjong
Pelestarian ikan		Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Pembangunan

belida dan ikan gabus	Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan	turap/talud /bronjong
Memper tahankan lahan pertanian yg ada di kota Palembang	Program Perencanaan Tata Ruang	Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya
Mengembangkan sistem dan manajemen pengelolaan sampah	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Jasa Konstruksi	Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir
sanitasi kawasan dan perkotaan	Program Pengembangan Perumahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir
Pengelolaan persampahan jangka panjang	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam.Sosial	Peningkatan pembersihan
	Program Pengelolaan Real Pemakaman	
	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan	

dilaksanakan juga melalui pengelolaan sampah dengan teknologi tinggi dan mendukung TPA tingkat regional yang dapat memodifikasi kab/kota.	Pemanfaatan Tanah	n dan pengerukan sungai/kali
Mengembangkan perbaikan sistem drainase dan manajemen banjir dengan memperbanyak membud	Program Penyelesaian Konflik Pertanahan	Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendalian banjir
	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Perencanaan pengembangan infrastruktur
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Pembangunan/peningkatan infrastruktur
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perkotaan
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Pembangunan jalan dan jembatan di setiap kecamatan
	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	

at
kolam
retensi
dan
normali
sasi
sungai.

Program
Peningkatan
Pengendalian Polusi

Program
pengembangan
ekowisata dan jasa
lingkungan
dikawasan-kawasan
konservasi laut dan
hutan

Program
Pengendalian
kebakaran hutan

Program Pengelolaan
dan rehabilitasi
ekosistem pesisir
dan laut

Program Pengelolaan
ruang terbuka hijau
(RTH)

Program Rehabilitasi
dan Pemeliharaan
Prasarana dan
Fasilitas LLAJ

Pogram peningkatan
pelayanan angkutan

Program
pembangunan
sarana dan
prasarana

Penyusunan Rencana
Detail Tata
Ruang
Kawasan

Penyusunan
rancangan
peraturan
daerah
tentang
RTRW

Rapat
koordinasi
tentang
rencana
tata ruang

Peningkatan Sumber
Daya
Aparatur
Jasa
Konstruksi

Sosialisasi
peraturan
perundang-
undangan di
bidang
perumahan

Pembangunan
an
perumahan

perhubungan	masyarakat kurang mampu
Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam
Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat
Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	
Program kerjasama informasi dengan mass media	
Program Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	

Program Pengelolaan Sampah Secara Termal		bencana sosial
Program Lingkungan Sehat Perumahan		Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
Program Pengawasan Konstruksi	Jasa	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan kebakaran	dan bahaya	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan		Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
Program Pemberdayaan Konstruksi	Jasa	
Program Pemberdayaan Konstruksi	Jasa	Pengembangan data dan informasi lingkungan
Program Pengaturan Jasa Konstruksi		
Program Pengembangan Informasi Bidang Ke PU-an		Penyusunan data sumberdaya alam dan

Program
pembangunan
sarana kantor
pemerintahan ibu
kota

Program
pembangunan dan
peningkatan prasarana
dan
sarana
umum/sosial

neraca
sumberdaya
hutan
(NSDH)
nasional
dan daerah

Penyediaan
sertifikasi
Laboratorium

Pengujian
emisi
kendaraan
bermotor

Pengujian
emisi/polusi
udara
akibat
aktivitas
industri

Penyuluhan
dan
pengendalian
polusi
dan
pencemaran

Rehabilitasi
/pemeliharaan
sarana
alat
pengujian
kendaraan
bermotor

Rehabilitasi
/pemeliharaan
prasarana
balai
pengujian
kendaraan
bermotor

Rehabilitasi
/pemeliharaan
terminal/pe
labuhan

Pemeliharaan
n marka
jalan/ zebra
cross,
rambu-
rambu lalu
lintas dan
pemeliharaan
n traffict
light

Rehabilitasi
/Pemeliharaan
Kendaraan
Angkutan
Sungai

Kegiatan
penyuluhan
bagi para
sopir/juru

mudi untuk
peningkata
n
keselamata
n
penumpang

Kegiatan
peningkata
n disiplin
masyarakat
menggunak
an
angkutan

Kegiatan uji
kelayakan
sarana
transportasi
guna
keselamatan
penumpang

Kegiatan
pengendalia
n disiplin
pengoperasi
an
angkutan
umum
dijalan raya

Kegiatan
pengawasan
peralatan
keamanan
dalam
keadaan

darurat dan
perlengkapan
pertolongan
pertama

Kegiatan
penciptaan
disiplin dan
pemeliharaan
kebersihan
dilingkungan
terminal

Fasilitasi
perijinan di
bidang
perhubungan

Sosialisasi/
penyuluhan
ketertiban
lalu lintas
dan
angkutan

Kegiatan
pemilihan
dan
pemberian
penghargaan
sopir/juru
mudi/awak
kendaraan
angkutan

umum
teladan

Koordinasi
dalam
peningkata
n pelayanan
angkutan

Pembangun
an Halte
bus, taxi
gedung
terminal

Pembangun
an Dermaga

Pengadaan
rambu-
rambu lalu
lintas

Pengadaan
marka jalan

Pengadaan
pagar
pengaman
jalan

Pelaksanaa
n uji petik
kendaraan
bermotor

Pembinaan
dan

Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin

Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan

Sosialisasi
norma,
standar,
prosedur, dan
manual
pencegahan
bahaya
kebakaran

Pengawasan
Pelaksanaan

Kegiatan
pendidikan
dan pelatihan
pertolongan
dan
pencegahan
kebakaran

Kegiatan
penyuluhan
pencegahan
bencana
kebakaran

Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
Pencegahan
Bencana
Kebakaran

Pencegahan
dan
Pengendalian
Bahaya
Kebakaran

								Implementasi setiap program yang direncanakan					
								Dilakukannya sosialisasi pada setiap aparatur dan masyarakat					
Pemerataan kualitas pendidikan	Terpenuhiya yang Professional	Mengembangkan kualitas pendidikan dengan menggunakan sekolah - sekolah unggulan di kecamatan dan kelurahan dan emenuhan SPM Bidang Pendidikan	Memfokuskan pemenuhan SPM bidang-pelayanan dasar pendidikan dalam 2 tahun periode RPJMD Mendorong pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi (TIK) untuk mendukung percepatan dan perluasan jangkauan layanan pendidikan	Program Peningkatan dan Aparatur Program pindah/purna PNS Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Belajar Wajib Pendidikan	Sarana Prasarana fasilitas tugas	jumlah SDM yang profesional persentase penempatan SDM yang berkompeten di bidangnya persentase sarana dan prasarana yang baik Jumlah tenaga pendidik berkualitas Persentase sebaran tenaga pendidik	pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pembangunan gedung kantor pengadaan Kendaraan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan; Peningkatan Kualitas dan Sebaran Tenaga Pendidik	Dinas pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Satuan Polisi Pamong Praja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik				

Meratanya kualitas pendidikan	Dasar Sembilan Tahun	dinas/operasional	Dinas Sosial
	Program Pendidikan Menengah	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana
	Program Pendidikan Non Formal	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Ketenagakerjaan Dinas Perikanan
	Program Pendidikan Luar Biasa	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pengadaan mobil jabatan	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Upacara pemakaman PNS	Dinas Perhubungan
	Program pendidikan politik masyarakat	Pemulangan pegawai yang pensiun	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Program pendidikan kedinasan		
	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur		
Program Pembinaan dan Pengembangan			

Aparatur		Pemindahan tugas PNS	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Upacara pemakaman	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
Program Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
		Penyusunan laporan fisik dan konsolidasi capaian kinerja keuangan	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
		Penyusunan RKA SKPD	Inspektorat Kota
		Penyusunan DPA dan DPPA dalam rangka penyusunan anggaran kas	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
			Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
			Badan Kepegawaian

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jakabaring
Pembangunan gedung sekolah	Sematang Borang
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	
Pengadaan mebeluer sekolah	
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	
Pelatihan kompetensi	

tenaga
pendidik

Penyelengga
raan
Pendidikan
Anak Usia
Dini

Penyediaan
Bantuan
Operasional
Sekolah (BOS)
jenjang
SD/MI/SDLB
dan SMP/MTS
serta
pesantren
Salafiyah dan
Satuan
Pendidikan
Non-Islam
Setara SD dan
SMP

Penyelengga
raan Paket

Penyebaru
asan dan
sosialisasi
berbagai
informasi
pendidikan
dasar

Pembinaan
pendidikan

kursus dan
kelembagaan

Pengembangan
pendidikan
keaksaraan

Penyediaan
sarana dan
prasarana
pendidikan
non formal

Pengembangan
data dan
informasi
pendidikan
non formal

Pelaksanaan u
kompetensi
pendidik da
tenaga
kependidikan

Pembinaan
Kelompok
Kerja Guru
(KKG)

Pengembangan
mutu dan
kualitas
program
pendidikan
dan pelatihan
bagi pendidik

dan tenaga
kependidikan

Pengembanga
n sistem
pendataan dan
pemetaan
pendidik dan
tenaga
kependidikan

Pelaksanaan
evaluasi hasil
kinerja bidang
pendidikan

Sosialisasi
dan advokasi
berbagai
peraturan
pemerintah
dibidang
pendidikan

Penyelengga
raan
pelatihan,se
minar dan
lokakarya,s
erta diskusi
ilmiah
tentang
berbagai isu
pendidikan

Penyuluhan
kepada
masyarakat

Koordinasi
forum-forum
diskusi politik

Monitoring,
evaluasi dan
pelaporan

Pendidikan
penjenjangan
struktural

Pendidikan
dan pelatihan
prajabatan
bagi calon
PNS daerah

Pendidikan
dan pelatihan
teknis tugas
dan fungsi
bagi PNS
daerah

Penyusunan
rencana
pembinaan
karir PNS

Seleksi
penerimaan
calon PNS

Peningkatan akses dan layanan kesehatan;	Terbangunnya puskesmas, pustu dan penambahan fasilitas rawat inap Puskesmas di Kecamatan	Mengembangkan kualitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan bagi masyarakat dengan membangun dan menjadi seluruh puskesmas rawat inap yang terakreditasi dan penambahan fasilitas rawat inap Puskesmas di Kecamatan	Memfokuskan pemenuhan SPM bidang pelayanan dasar kesehatan dalam 2 tahun pertama periode RPJMD	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Upaya	jumlah puskesmas, pustu dan fasilitas rawat inap yang terbangun	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pembangunan Puskesmas, Pustu dan Penambahan Fasilitas Rawat Inap Puskesmas di kecamatan;	Dinas kesehatan
	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat	Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Mendorong pemanfaatan teknologi pada pemenuhan indikator - indikator dalam pembangunan kota informatika dan komunikasi (TIK) untuk percepatan dan perluasan jangkauan layanan kesehatan	Program Pengawasan dan Makanan	Obat	persentase masyarakat yang memiliki kesadaran hidup sehat	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);	
	Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Memfokuskan pada pemenuhan indikator - indikator dalam pembangunan kota informatika dan komunikasi (TIK) untuk percepatan dan perluasan jangkauan layanan kesehatan	Program Kesehatan Masyarakat	Promosi dan	penyakit menular dan tidak menular	Peningkatan kesehatan masyarakat dan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Peningkatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	
	Terbangunnya puskesmas, pustu dan penambahan fasilitas rawat inap Puskesmas di Kecamatan	Terbangunnya puskesmas, pustu dan penambahan fasilitas rawat inap Puskesmas di Kecamatan	Memfokuskan pada pemenuhan indikator - indikator dalam pembangunan kota informatika dan komunikasi (TIK) untuk percepatan dan perluasan jangkauan layanan kesehatan	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	dan	jumlah puskesmas, pustu dan fasilitas rawat inap yang terbangun	Penyediaan pelayanan pemeliharaan kesehatan	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan	

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat	diseluruh kecamatan di Kota Palembang dan pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	jumlah puskesmas, pustu dan fasilitas rawat inap yang terbangun	bahan berbahaya
Terbangunnya puskesmas, pustu dan penambahan fasilitas rawat inap Puskesmas di Kecamatan	Pengembangan pambangunan wilayah berbasis Kota Layak Anak, Kota Ramah Lansia, Kota Sehat, dan Kota Kreatif	Program pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya		Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam indonesia
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paruparu/ rumah sakit mata		Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata		Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan		Peningkatan pendidikan pramuka saka bakti husada
		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan		Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

Kesehatan	Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Penanggulangan Gizi-Lebih
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	
Program Keluarga Berencana	
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	
Program pelayanan kontrasepsi	
Program pembinaan peran masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	

Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga

Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pengendalian dampak kesehatan lingkungan

Pengembangan kota sehat

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

Pelayanan
pencegahan
dan
penanggula
ngan
penyakit
menular

Pencegahan
penularan
penyakit
Endemik/E
pidemik

Penyusunan
standar
pelayanan
kesehatan

Pembangunan
puskesmas

Pembangunan
puskesmas
pembantu

Pengadaan
sarana dan
prasarana
puskesmas

Peningkatan
puskesmas
menjadi
puskesmas
rawat inap

Pemeliharaan
rutin/berkala
sarana dan
prasarana
puskesmas

Pembangun
an rumah
sakit

Pembangun
an ruang
poliklinik
rumah sakit

Pengemban
gan ruang
operasi

Rehabilitasi
bangunan
rumah sakit

Pengadaan
alat-alat
kesehatan
rumah sakit

Pengadaan
perlengkapan
rumah tangga
rumah sakit
(dapur, ruang
pasien,
laundry,
ruang tunggu
dan lain-lain)

Pemeliharaan
n
rutin/berka
la rumah
sakit

Pemeliharaan
rutin/berkala
mobil
ambulance/je
nazah

Pemeliharaan
rutin/berkala
mebeuleur
rumah sakit

Penyuluhan
kesehatan
anak balita

Pelatihan dan
pendidikan
perawatan
anak balita

Pelayanan
pemeliharaan
kesehatan

Pendidikan
dan pelatihan
perawatan
kesehatan

Pengawasan
dan
pengendalian

keamanan
dan kesehatan
makanan
hasil produksi
rumah tangga

Pengawasan
dan
pengendalian
keamanan
dan kesehatan
makanan
restaurant

Penyuluhan
kesehatan
bagi ibu
hamil dari
keluarga
kurang
mampu

Perawatan
secara berkala
bagi ibu hamil
bagi keluarga
kurang
mampu

Penyediaan
Pelayanan
kesehatan
BLUD

Pelayanan
kefarmasian
dan alat
kesehatan

Pembangunan budaya integritas di masyarakat yang didukung oleh Pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional	Terbangunnya budaya integritas di masyarakat yang didukung oleh pemerintah yang bersih, berwibawa, dan profesional	Mewujudkan kesetaraan gender dan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang mampu Meningkatkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata yang berwawasan lingkungan	Pendekatan pembangunan berbasis gender Menyusun rencana aksi pembangunan masyarakat madani melalui roadmap gerakan shalat berjamaah dan roadmap strategi gerakan gotong royong Mengembangkan sistem dan regulasi pembangunan berbasis budaya integritas kepada pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat	Program Administrasi Perkantoran Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan kriminal Program pengembangan wawasan kebangsaan Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Pelayanan jumlah SDM yang profesional terbangunnya infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata yang berwawasan lingkungan jumlah pelayanan berbasis IT Pelayanan dan keamanan	Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan	Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Tugas dan Fungsi bagi ASN; Penempatan SDM yang Berkompeten di Bidanganya; Pelaksanaan Palembang Smart City	Dinas pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Satuan Polisi Pamong Praja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dinas Sosial Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Dinas Ketenagakerjaan
--	--	--	--	--	--	---	---	---

mendukung produktifitas kerja tinggi dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat	Menjalankan program zona integritas dengan pemanfaatan TIK bagi ASN	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	kendaraan dinas/operasional	Dinas Perikanan
Meningkatkan sistem dan regulasi pembangunan budaya integritas pemerintah dan seluruh	Melakukan pembenahan manajemen pemungutan, dengan menggunakan sistem informasi yang kredibel dan akuntabel, sehingga ketersediaan data obyek pajak dan retribusi terintegrasi secara menyeluruh.	Pogram Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Pengendalian keamanan lingkungan	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan	Dinas Perhubungan
	Mendorong partisipasi aktif seluruh badan usaha swasta di dalam Forum CSR Kota Palembang	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Pengendalian kinerja satuan keamanan lingkungan	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

lapisa n masya rakat	melalui kebijakan insentif bagi pelaku usaha yang	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	di masyarakat	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
Menge mbang kan pelaks anaan prinsi pprinsi ip penyel enggar aan kepem erinta han yang baik melalu i sistem rewar d dan punis hment , sistem kepan tasan (merit syste m) serta pening katan	disusun melalui grand design (Membangun Palembang EMAS DARUSSALA M Bersama MITRA) Mengembang kan platform TIK untuk pelayanan publik yang terintegrasi (1 integrated ICT public services platform) Mengembang kan kebijakan pelayanan administrasi terpadu di Kelurahan Integrasi pengendalia n dan koordinasi kinerja	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program Kerjasama Pembangunan Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan daerah Program	Peningkata n toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Peningkata n rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat Peningkata n kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa Pembekalan wawasan kebangsaan gener Peningkatan kinerja satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Inspektorat Kota Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jakabaring Sematang Borang

akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan	pembangunan daerah melalui command center dan platform smart city	perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan pembangunan sosial budaya Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan	Pembinaan dan pelatihan satuan keamanan di lingkungan masyarakat Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Pengadaan logistik dan
Mengembangkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi			
Mengembangkan keterlibatan			

<p>dan keberdayaan masyarakat rakat dan swasta dalam penyelenggaraan pembangunan</p> <p>Pengembangan aplikasi berbasis web dan mobile di keluaraha (e-Kelurahan).</p> <p>Pelayanan administrasi terpadu di kelurahan</p>	<p>Program Peningkatan Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</p> <p>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Daerah/Wakil Kepala Daerah</p> <p>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga dan Aparatur Pengawasan</p> <p>Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan</p> <p>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan</p>	<p>Sistem dan</p> <p>Kepala</p>	<p>obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara</p> <p>Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu</p> <p>Pelatihan tenaga pengelola SIAK</p> <p>Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)</p> <p>Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase</p>
--	--	---------------------------------	--

Buat rencana smart city mulai dari kelurahan

Masyarakat

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Program Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah

Program Pengembangan data/informasi

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Program Penelitian dan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Program penelitian

Tahap Awal) NIK

Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah /swasta

Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

<p>dan pengembangan kota-kota menengah dan besar</p> <p>Program Peningkatan Kegiatan Keagamaan</p> <p>Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja</p> <p>Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar</p> <p>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh</p> <p>Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara</p> <p>Program Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas</p>	<p>Pendataan dokumen arsip informasi teknologi</p> <p>Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah</p> <p>Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga</p> <p>Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah</p> <p>Penyusunan Rancangan RKPD</p> <p>Penyelenggaraan Musrenbang RKPD</p> <p>Penetapan RKPD</p>
--	---

Kinerja

Monitoring,
Evaluasi, dan
Pelaporan

Penyusunan
perencanaan
pengembangan wilayah
strategis
dan cepat
tumbuh

Koordinasi
perencanaan
pembangunan
bidang sosial
dan budaya

Penyusunan analisa
standar
belanja

Penyusunan standar
satuan
harga

Penyusunan sistem
dan
prosedur
pengelolaan
keuangan
daerah

Penyusunan
rancangan
peraturan
daerah
tentang APBD

Penyusunan
rancangan
peraturan
daerah
tentang
perubahan
APBD

Peningkata
n
manajemen
aset/barang
daerah

Penyusunan
rancangan
peraturan
daerah
tentang
pertanggungja
waban
pelaksanaan
APBD

Revaluasi /
Appraisal /
Aset /
Barang
Daerah

Penyusuna
n standar

satuan
harga

Analisa dan
evaluasi
pelaksanaan
sistem
penerimaan
daerah

Pembinaan
dan
penyuluhan
pajak daerah

Sampling
pemuktahiran
data,
perhitungan
potensi
pajak
daerah

Pelaksanaan
pengawasan
Internal
secara
berkala

Penanganan
kasus
pengaduan di
lingkungan
pemerintah
daerah

Tindak
lanjut hasil
temuan
pengawasan

Koordinasi
pengawasan
yang lebih
komprehensif

Dialog/audi
ensi dengan
tokoh-tokoh
masyarakat

,
pimpinan/a
nggota
organisasi
sosial dan
kemasyarak
atan

Penerimaan
kunjungan
kerja pejabat
negara/depart
emen/lembag
a pemerintah
non
departemen/l
uar negeri

Koordinasi
dengan
pemerintah
pusat dan
pemerintah

daerah
lainnya

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

Peningkatan sosialisasi peraturan perundang-undangan

Kerjasama Bantuan Hukum Terhadap Permasalahan Hukum

Penyusunan peraturan /keputusan walikota

Penyusunan rencana kerja protap

pelayanan
publik

Penyusunan
uraian
tugas/fungs
i perangkat
daerah

Pembentuk
an,
penggabung
an dan
penghapusa
n unit
SKPD

Revitalisasi
struktur
organisasi

Asistensi
analisis
beban kerja

Penyusunan
laporan
pelayanan
publik

Pelaksanaan
MTQ tingkat
kota
palembang

Koordinasi
Perencanaan
Air Minum,

						Drainase, dan Sanitasi Perkotaan		
Peningkatan investasi, pembangunan ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan;	Terlaksananya perizinan terpadu Terbantunya masyarakat miskin Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Meningkatnya Diversifikasi produk industri	Menjamin iklim investasi yang kondusif dari aspek hukum dan keamanan, investasi asing yang kompetitif dan komparatif serta membangun kerjasama investasi regional,	Mengembangkan satuan tugas promosi daerah untuk investasi dan pariwisata Membangun kebijakan pelatihan tenaga kerja Menyediakan anggaran untuk mendukung program bantuan dan pendampingan modal usaha bagi usaha rintisan dan pelaku UMKM Pembangunan lembaga keuangan tingkat Kelurahan,	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Investasi dan Realisasi Investasi Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program pembinaan anak	jumlah perizinan yang terpadu jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah Pengembangan potensi unggulan daerah Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian investasi PMDN/PMA Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Pelaksanaan Perizinan Terpadu; Peningkatan Pelatihan Kepada Masyarakat; Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat; Pemberian Bantuan kepada Masyarakat Miskin; Menciptakan Lapangan Pekerjaan; dan Diversifikasi Produk Industri	Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas pertanian Dinas perikanan

nasional dan internasional	RW dan RT. Meluncurkan program pelatihan dan pendampingan untuk usaha ekonomi rakyat.	terlantar Program pembinaan penyandang dan trauma Program pembinaan asuhan jompo	para cacat panti /panti	Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
Meningkatkan akses pekerja kepada sumber daya produktif melalui peningkatan keterampilan pekerja dengan melakukan pelatihan	Pembangunan sentra UMKM dan Koperasi Menyusun sistem penataan pasar tradisional menjadi pasar tradisional moder. Meluncurkan program Palembang 4000 UMKM dengan kredit tanpa agunan 3 juta rupiah per UKM	Program pembinaan penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Kualitas Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja	eks PSK, dan sosial dan	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
Meningkatkan dan	Meluncurkan	Program		Kajian kebijakan penanaman modal

mempertukarkan bantuan modal kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha keluarga (home industry)	n program Palembang Digital untuk pelaku usaha startup digit	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Perempuan	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi Sosialisasi Prosedur Pembuatan Perijinan dan Non Perijinan Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pemberian Perijinan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi melalui lembaga		Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping

keuangan di tingkat kelurahan, rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT) dengan memberikan fasilitas pinjaman tanpa agunan dan tanpa bunga	Kelurahan	sosial
	Program pengembangan lembaga ekonomi kelurahan	pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kelurahan	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
	Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan dan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	
	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye

<p>pendampingan untuk pengembangan usaha ekonomi kerakyatan</p>	<p>Perikanan</p> <p>Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</p>	<p>sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</p>
<p>Meningkatkan kualitas ekonomi kerakyatan</p>	<p>Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar</p>	<p>Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS</p>
<p>Mengembangkan hilirisasi yang mendukung potensi sektor unggulan Kota Palembang dan Sumatera Selatan</p>	<p>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</p>	<p>Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat dan kejadian luar biasa</p>
<p>Meningkatkan potensi sektor unggulan Kota Palembang dan Sumatera Selatan</p>	<p>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan</p>	<p>Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat dan kejadian luar biasa</p>
<p>Meningkatkan potensi sektor unggulan Kota Palembang dan Sumatera Selatan</p>	<p>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</p>	<p>Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja</p>
<p>Meningkatkan potensi sektor unggulan Kota Palembang dan Sumatera Selatan</p>	<p>Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</p>	<p>Penyelesaian prosedur perselisihan</p>

pembe rdayaa n pengel olaan dan penata an pasar tradisi onal menja di pasar tradisi onal moder n	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan		hubungan industrial
	Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak	dan	Penyelesaia n prosedur pemberian perlindunga n hukum dan jaminan sosial ketenagaker jaan
	Program peningkatan produksi peternakan	hasil	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaa n tentang ketenagaker jaan
Mendo rong 4000 UMKM denga n kredit tanpa aguna n 3 juta rupiah per UKM	Program Peningkatan Pemasaran Produksi Peternakan	Hasil	Pemantaua n kinerja lembaga penyalur tenaga kerja
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		Pelaksanaa n kebijakan perlindunga n perempuan di daerah
Menge mbang kan ekosis	Program Pengembangan SentraSentra Industri Potensial		Fasilitasi upaya perlindunga
	Program		

tem
startu
p
digital

Pengembangan
Wilayah
Transmigrasi

Program
Transmigrasi Lokal

Program
Transmigrasi
Regional

Program
peningkatan peran
perempuan di
Kelurahan

Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak

Program
Peningkatan
Produksi,
produktivitas dan
mutu tanaman
perkebunan
berkelanjutan
(Ditjen Perkebunan)

Program
Pencapaian
swasembada daging
dan peningkatan
penyediaan pangan
hewan yang aman,
sehat, utuh dan
halal

n
perempuan
terhadap
tindak
kekerasan

Kegiatan
pembinaan
organisasi
perempuan

Kegiatan
pendidikan
dan
pelatihan
peningkata
n peran
serta dan
kesetaraan
jender

Kegiatan
penyuluhan
peran serta
dan
kesetaraan
jender dalam
pembangunan

Kegiatan
bimbingan
manajemen
usah abagi
perempuan
dalam
mengelola
usaha

Program penyediaan pengembangan prasarana sarana pertanian	dan dan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perkotaan
Peningkatan kualitas kuantitas dan bibit	dan benih	Penyelenggara an Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
Program Pengolahan Pemasaran Produksi Pternakan	Hasil	Penyelengga raan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Perkotaan
Program Peningkatan Tambah, Saing Industri Pemasaran Ekspor Pertanian	Nilai daya Hilir, dan Hasil	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik kelurahan
Program pengembangan ketersediaan pangan penanganan pangan	dan rawan	Pengemban gan bibit ikan unggul
Program Peningkatan Produksi Pternakan		Pendampin gan pada kelompok tani pembudiday a ikan

Program
Peningkatan
Penerapan
Teknologi
Peternakan

Pembinaan
dan
pengembangan
perikanan

Program
Peningkatan
Diversifikasi dan
ketahanan pangan
masyarakat

Pengembangan
kawasan
minapolitan

Program
Pengembangan
Distribusi dan
Harga Pangan

Pengembangan Sistem
Pengelolaan
Sarana dan
Prasarana
Pembudidaya
Ikan

Pengembangan Sistem
Usaha
Perikanan
Budidaya

Pengembangan Sistem
Pengelolaan
Kesehatan
Ikan dan
Lingkungan
Pembudidaya
Ikan

Pengembangan Sistem
Produksi
Pakan Ikan

Kajian
kawasan
budidaya
laut, air
payau dan
air tawar

Pengendalia
n,
Pelestarian,
Budidaya,
dan
Penangkapa
n Perairan
Air Tawar

Pengendalian
dan
Pelestarian
Pengelolaan
Hasil
Perikanan

Penyuluhan
peningkata
n produksi
pertanian/p
erkebunan

Penyediaan
sarana
produksi
pertanian/per
kebunan

Pengemban
gan bibit

unggul
pertanian/p
erkebunan

Pengemb
gan
tanaman
obat dan
keluarga
(TOGA

Penyuluhan
distribusi
pemasaran
atas hasil
produksi
peternakan
masyarakat

Pemeliharaan
rutin/berkala
pusat-pusat
etalase/eksebi
si/promosi
atas hasil
produksi
peternakan

Penelitian dan
Pengembanga
n Teknologi
Peternakan
Tepat Guna

Perluasan
penerapan SNI
untuk
mendorong

daya saing
industri
manufaktur

Perluasan
penerapan SNI
untuk
mendorong
daya saing
industri
manufaktur

Kebijakan
keterkaitan
industri
hulu-hilir

Penyediaan
sarana
maupun
prasarana
klaster
industri

Pembinaan
keterkaitan
produksi
industri hulu
hingga ke hilir

Pembangun
an akses
transportasi
sentra-
sentra
industri
potensial

Meningkatkan kualitas dan kuantitas peribadatan, pendidikan keagamaan, sarana dan prasarana budaya serta mengantisipasi bahaya penyalahgunaan narkoba	terintegrasi untuk membangun kawasan tepian Sungai Musi (Musi Riverside Tourism Development) Mewajibkan kepada masing-masing instansi pemerintah daerah untuk memiliki 1 program pembangunan d kawasan Sungai Musi (Musi 101+ / Musi 1 OPD 1 Program) Pendidikan dan pelatihan SDM Pariwisata Menyusun Blueprint Pengembangan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan	ketaqwaan kepemudaan Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembinaan organisasi kepemudaan Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Penyelenggaraan Paskibraka Pendidikan dan pelatihan
---	---	--	--

(Musiriverside Tourism Development) sebagai kawasan strategis pariwisata nasional berbasis Teknologi dan Informasi Mengembangkan SDM pariwisata yang profesional, ramah dan mampu berbahasa	an Kawasan Riverside City dan Pengembangan Transportasi Sungai Kota Palembang Menjalankan program kerjasama lintas sector dalam pembangunan sarana dan prasarana kesungai dan olahraga Menjalin kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk event2 internasional terkait sungai dan olahraga Penyiapan khusus pusat pelatihan kesungai dan olahraga bertaraf	Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Program Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Di Luar Negeri Program Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif Program Pengembangan Ekosistem Kreatif Program Pengembangan Infrastruktur Terpadu Ekonomi Kreatif	dasar kepemimpinan Fasilitas aksi bhakti sosial kepemudaan Penyelenggaraan lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan Pameran prestasi hasil karya pemuda Peringatan hari besar pemuda Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Pelatihan ketrampilan
---	---	---	--

asing	intersional	bagi pemuda
Mengembangkan sistem transportasi sungai yang moder n dan terpadu	Mengembangkan sarana publikasi berbasis IT untuk mempromosikan kuliner khas Palembang	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
Mengembangkan sarana prasarana kesun gaian dan keolah ragaa n yang berku alitas	Mengembangkan kurikulum tambahan di sekolah-sekolah tingkat menengah tentang wawasan pariwisata daerah	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaa n
Mengembangkan pelaksanaan event-event		Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
		Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
		Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

intern
asiona
l yang
terkait
denga
n
sungai
dan
olahra
ga

Memb
angun
dan
menge
mbang
kan
pusat
pelatih
an
kesun
gaian
dan
olahra
ga
bertar
af
intern
asiona
l

Memp
romosi
kan
kuline
r khas
Palem
bag

Membangu
n
kemitraanp
engelolaan
kebudayaan
anatar
daerah

Masyarakat
minat dan
kebiasaan
membaca
untuk
mendorong
terwujudnya
masyarakat
pembelajar

Pengemban
gan minat
dan budaya
baca

Supervisi,
pembinaan
dan stimulasi
pada
perpustakaan
umum

Penyediaan
bahan
pustaka
perpustakaan
umum daerah

Peningkata
n Kapasitas

sebagai
kuliner kelas
dunia

Pelestarian
warisan
budaya dan
Kota Pusaka

Pelaku
Ekonomi
Kreatif
Festival
CAP GO
MEH

Peningkatan
Kapasitas
Pelaku
Ekonomi
Kreatif
Fashion
Dari Masa
ke Masa

Peningkatan
Kapasitas
Pelaku
Ekonomi
Kreatif
Kuliner
Mendunia

Peningkatan
Kapasitas
Pelaku
Ekonomi
Kreatif
Lomba
Kreakreatif

Pendukung
Inkubasi,
Eksibisi,
Kompetisi, dan
Sosialisasi
Bagi Pelaku

Ekonomi
Kreatif musie
indie fest

Pendukungn
Inkubasi,
Eksibisi,
Kompetisi,dan
Sosialisasi
Bagi Pelaku
Ekonomi
Kreatif Asia
Art & Culture
Festival

BAB VIII PENUTUP

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah merupakan dokumen yang berisi kebijakan *roadmap* penguatan sistem inovasi di Kota Palembang yang dihasilkan oleh tim koordinasi *roadmap* sistem inovasi daerah Kota Palembang yang memuat kebijakan umum dan program percepatan pembangunan dengan pendekatan penguatan sistem inovasi.

Yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Palembang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu acuan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan dengan inovatif dan progresif serta salah satu landasan dan pedoman operasional bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja (renja).

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : kondisi eksiting *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah; tantangan dan peluang *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah; strategi dan arah kebijakan; fokus dan program prioritas; *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota. *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : membangun basis data inovasi daerah; melaksanakan kegiatan bersama yang dapat menguatkan jejaring antarpemangku kepentingan; membangun sistem difusi inovasi berbasis teknologi informasi dan forum komunikasi antar pemangku kepentingan; dan membangun penguatan kelembagaan vertical dan horizontal melalui komunikasi dan kontribusi antar lembaga.

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah menjadikan inovasi daerah sebagai kunci guna meningkatkan daya saing. Untuk itu, berbagai terget kinerja Pemerintah Kota sangat perlu didekatkan dengan inovasi sebagai perangkat berkerja guna mengakselerasinya. Seluruh aspek pembangunan dan penyelesaian permasalahan perkotaan didekatkan dengan cara dan ide baru yang lebih mengedepankan kolaborasi dengan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia.

WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO